

**PERBANDINGAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA DAN
THAILAND**



SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Tiffany Vika Noviadhealiyani

5116500196

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERBANDINGAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PENGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA DAN THAILAND

Tiffany Vika Noviadhealiyani
NPM 5116500196

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 27 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604



Kanti Rahayu, S.H., M.H.
NIDN 0620108203

Mengetahui
Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

PERBANDINGAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PENGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA DAN THAILAND

Tiffany Vika Noviadhealiyani

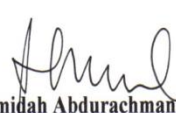
NPM 511600196

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 27 Januari 2020

Penguji I

Penguji II


Dr. Hamidah Abdurachman, S.H., M.Hum.


H. Dwijoyo Hartoyo, S.H., M.H.

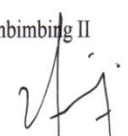
NIDN 0022105601

NIDN 0616086401

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.


Kanti Rahayu, S.H., M.H.

NIDN 0615067604

NIDN 0620108203



Mengetahui

Dekan,


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiffany Vika Noviadheliyani
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 3 November 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP ANAK
PENGGGUNA NARKOTIKA DI
INDONESIA DAN THAILAND**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 27 Januari 2020

Yang menyatakan,


(Tiffany Vika N)

Abstrak

Pengguna narkoba paling banyak di dunia merupakan anak-anak. Sebagai dasar pemidanaan Indonesia mengaturnya di Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Thailand mengaturnya di Narcotic Act B.E 2522 dan Juvenile Court B.E 2494.

Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkoba di Indonesia dan Thailand. (2) mengkaji perbedaan dan persamaan penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkoba di Indonesia dan di Thailand.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka dan di analisis dengan metode kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukan Indonesia dan Thailand hanya menjatuhkan pidana rehabilitasi baik secara non-institusional atau perlakuan kelembagaan terhadap anak demi menjaga hak yang dimiliki oleh anak. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
Kata Kunci : Narkoba, Undang-Undang, Anak.

Abstract

Narcotics is an extension of Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances. The biggest users are children. As a basis for Indonesian penalties set in the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2012 concerning the Children's Criminal Justice System. Then, Thailand regulates in Narcotic Act B.E 2522 and Juvenile Court B.E 2494.

This research aims: (1) to describe the imposition of criminal penalties against narcotics users who are underage in Indonesia and Thailand. (2) to examine the differences and similarities in imposing criminal sentences on minors as narcotics users in Indonesia and in Thailand.

This type of research is library, normative approach, data collection techniques through literature study and analyzed with qualitative methods.

The results indicate that Indonesia and Thailand only imposed rehabilitation penalties on a non-institutional basis or institutional treatment of children in order to protect the rights possessed by children.

Keywords: Narcotics, Law, Children.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis sebagai *the biggest support system*.
2. Diri sendiri. *Thank you and sorry for everything*.
3. Teman-teman penulis baik di Indonesia maupun di Thailand. *Thank you for being a good person to me*.

HALAMAN MOTTO

*“Be a Independent and do not be easly to trust someone, because the
deepest of heart can not be measurred unlike the ocean.”
(daddy’s)*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt, *alkhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Dr. Sanusi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
7. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan membimbing.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya

hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 27 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Rencana Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN KONSEPTUAL	
A. Perbandingan Hukum.....	13
B. Hukum Pidana.....	18
C. Anak.....	24
D. Narkotika.....	33
E. Penjatuhan Pidana Narkotika di Indonesia dan Thailand.....	40
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand.....	55

B. Perbedaan dan Persamaan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna narkoba di Indonesia dan Thailand.....	83
---	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi terkait Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur penjatuhan pidana bagi pengguna narkotika yang terdapat di pasal 127, pengguna narkotika dapat dipidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun¹.

Peraturan tentang pemidanaan anak pengguna narkotika di Indonesia diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut undang-undang tersebut pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak pengguna narkotika paling lama setengah dari maximum ancaman pidana bagi orang dewasa yang biasanya kurang dari satu tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga mengatur tentang Diversi². Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Upaya diversi akan dilakukan sebelum anak melalui proses peradilan pidana.

Keterlibatan anak dengan narkotika tidak hanya menjadi penggunaanya saja, mereka juga dijadikan sebagai kurir. Contoh dalam kasus seorang pemuda berinisial AR yang masih berusia 17 tahun. Tersangka dibekuk Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polrestabes

¹Uyat Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.20, No.2, 2018, Hlm. 169

²*Ibid.*

Bandung pada awal tahun 2018 lalu, karena menjadi kurir narkoba jenis sabu³. Tersangka ditangkap di Gang Anggrek Cipicung, Kelurahan Pasirwangi, Ujung Berung, Kota Bandung. Petugas mendapatkan barang bukti dari tersangka berupa satu bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 14,92 gram.

Petugas juga menggeledah kediaman tersangka dan menemukan barang bukti sabu dengan bruto 50,71 gram dan satu timbangan digital. Atas perbuatannya, tersangka dikenai Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun, karena tersangka masih di bawah umur, maka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, tersangka hanya dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)⁴.

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*)⁵. Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, namun pelaku sebagai korban. Apabila terdakwa merupakan anak, Ia berhak atas asas kepentingan terbaik bagi anak. Terdakwa anak yang selanjutnya disebut anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh dijatuhi dengan

³ Kompas.com, “Dikendalikan dari Lapas di Bandung, Anak di Bawah Umur ini Jadi Kurir Sabu”, <https://regional.kompas.com/read/2018/01/25/23185221/dikendalikan-dari-lapas-di-bandung-anak-di-bawah-umur-ini-jadi-kurir-sabu>.,(diakses pada 17 Oktober 2019).

⁴ Tri Jata Ayu, “Hukuman Bagi Anak di Bawah Umur Pengguna Sabu”,<https://m.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt56964786cc7fc/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu/>, (diakses pada 17 Oktober 2019).

⁵ AR.,Sujono dan Bony, Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 33.

pidana mati, pidana seumur hidup, dan bentuk-bentuk pembedaan lain yang tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Hal berbeda tentang penjatuhan pidana bagi anak pengguna narkoba datang dari negara tetangga kita yaitu Thailand. Thailand telah mengatur tentang narkoba di dalam Undang-Undang Thailand tentang Narkoba B.E 2522 yang ditetapkan secara langsung oleh sang Raja⁶. Undang-undang narkoba Thailand juga memiliki hukuman mati bagi pengguna dan pengedar narkoba. Hukuman ini tidak akan dijatuhkan kepada anak, terkait dengan pernyataan tersebut Thailand telah mengaturnya di Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak B.E 2494⁷. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak yang menggunakan narkoba tidak bisa dijatuhi pidana penjara, namun hanya di lakukan rehabilitasi saja oleh lembaga rehabilitasi yang ada di Thailand.

Kasus yang terjadi di Thailand Selatan, 1 dari 5 remaja di salah satu Desa muslim yang ada di Thailand selatan merupakan pecandu narkoba jenis Kratom, sebut saja namanya ZB yang masih berusia 16 tahun. Kratom juga dikenal dengan nama 4X100, mengandung empat bahan utama yang terdiri dari dedaunan, sirup obat batuk dan Coca-Cola dan es. Narkoba tersebut dijual dengan harga sekitar 100 baht perkotak. Atas bukti tersebut terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penahanan di

⁶ Thailand Law, Narcotics Act B.E 2522.

⁷ Duangporn Ukris, "Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series", *International Journal*, No. 59, Hlm. 234.

Pusat Penahanan Remaja⁸. Setiap tahunnya angka anak sebagai pengguna narkoba di Thailand semakin meningkat, di Tahun 2017 ada sekitar 80.000 sampai 10.000 pengguna narkoba di provinsi Thailand selatan saja⁹.

Upaya lain yang dilakukan oleh Thailand dalam menanggulangi masalah narkoba yaitu mencanangkan program menuju Drug Free ASEAN 2015, serta meningkatkan keamanan dan penjagaan oleh aparat bersenjata di setiap perbatasan, karena mengingat Thailand juga dikenal sebagai kawasan segitiga emas¹⁰. Hal ini dikarenakan di Thailand banyak di temukan narkoba jenis tanaman yaitu opium.

Apabila dilihat dari Undang-undangnya penjatuhan pidana yang diterapkan oleh Thailand lebih ketat dibandingkan Indonesia karena Thailand telah melakukan berbagai cara dalam memerangi narkoba, misalnya saja menjatuhkan penahanan yang cukup lama bagi pengguna narkoba dan harus mendapatkan pengampunan secara langsung dari sang raja, karena mengingat dasar negara Thailand adalah kerajaan serta meningkatkan keamanan seperti adanya pemeriksaan di tempat-tempat umum oleh polisi. Sedangkan di Indonesia dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pidana penjara

⁸ Riau Online, “1 dari 5 Remaja Muslim di Thailand Selatan Kecanduan Narkoba” ,<https://www.riauonline.co.id/internasional/read/2017/06/15/1-dari-5-remaja-muslim-di-thailand-selatan-kecanduan-narkoba>, (diakses pada 15 Oktober 2019).

⁹ Anggia Wulan Sari, “Upaya dan Tantangan Thailand dalam Penanggulangan Narkoba dan Obat Terlarang Menuju Drug-Free ASEAN 2015”, *Paper*, 2013, hlm. 3

¹⁰IDPC, “Thailand Amends Drug Law to Reduce Penalties and Ensure More Proportionate Sentencing”, <https://idpc.net/blog/2017/02/thailand-amends-drug-law-to-reduce-penalties-and-ensure-more-proportionate-sentencing>, (diakses pada 17 Oktober 2019)

yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila dilihat dari usia anak yang dapat dijatuhi pidana penjara di Indonesia dan Thailand yaitu sama sama menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia maximal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkoba di Indonesia dan Thailand?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkoba di Indonesia dan di Thailand?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkoba di Indonesia dan Thailand.
2. Untuk mengkaji perbedaan dan persamaan penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkoba di Indonesia dan di Thailand.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian Ilmu Hukum untuk pemerintah, khususnya tentang Perbandingan Hukum Pidana yang berlaku di Thailand dan juga di Indonesia.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi mahasiswa lain yang akan mengambil studi komparasi hukum internasional.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mengkaji terhadap beberapa penelitian, ada tiga jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

Dina Novitasari, “Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba”¹¹. Penelitian ini berupa studi tentang peredaran narkoba yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan anak-anak. Banyak anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkoba. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Pengguna atau pecandu narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban (*crime without victim*). Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan

¹¹ Dina Novitasari, “Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No.4, Desember, 2017, hlm. 971.

pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba. Terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ruhut Trifosa Sitompul, “Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika”¹². Penelitian ini berupa studi tentang penerapan ketentuan pidana terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika merupakan salah satu bagian dari pemberantasan tindak kejahatan narkotika yang saat ini makin meningkat dan bersifat masif, hal ini merupakan suatu permasalahan serius yang belum bisa di antisipasi oleh pemerintah. Meningkatnya kasus pemakaian narkoba ini tidak terlepas dari para mafia narkoba yang melakukan berbagai cara untuk melancarkan operasi barang berbahaya itu. Cara yang efektif untuk menghindari petugas dalam melakukan operasinya sekarang bahkan dengan memerintahkan seseorang anak dengan dijanjikan imbalan untuk mengedarkan narkoba, atau dapat disebut dengan kurir atau perantara narkotika. Anak yang menjadi kurir atau perantara narkotika dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi anak baik internal yaitu berasal dari dalam diri maupun faktor eksternal yaitu berasal dari luar diri anak.

Uyat Suyatna, “Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia”¹³. Penelitian ini berupa studi tentang masalah utama dalam penelitian ini adalah narkotika sangat berbahaya bagi kehidupan manusia.

¹² Ruhut Trifosa Sitompul, “Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika”, *Jurnal Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 3.

¹³ Uyat Suyatna, “Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No.2, Juli 2018, hlm. 168.

Negara membuat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan Narkotika mengakibatkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode participation observation yang disebut juga dengan observasi aktif, langsung pada 34 provinsi di mana kasus itu terjadi. Evaluasi kebijakan narkotika dengan indikator isi, implementasi, dan dampak kebijakan ditemukan hasil penyalahgunaan narkotika setiap hari 30-40 orang meninggal dunia. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa anak-anak, remaja, dan dewasa, menjadi produsen, pengedar, dan pengguna, narkotika di Indonesia.

Berdasarkan penelitian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa penelitian hukum yang telah dilakukan tersebut membahas mengenai narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan anak-anak serta mengenai penerapan ketentuan pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika yang pembedaannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian yang membedakan antara penulis lakukan dengan penelitian diatas adalah penelitian diatas lebih fokus terhadap pembedaan anak pengguna

narkotika di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lebih fokus terhadap perbandingan hukum pidana bagi anak dibawah umur pengguna narkotika di Indonesia dan Thailand berdasarkan Undang-Undang dari kedua Negara tersebut.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen¹⁴. Adapun penulis menggunakan referensi Kitab Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang-Undang Thailand, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian, karya tulis serta referensi-referensi yang relevan baik melalui internet maupun surat kabar terhadap penelitian yang dilakukan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.118.

hukum yang berlaku)¹⁵. Adapula dokumen yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk penelitian terhadap norma hukum tertulis, yang antara lain meliputi peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Thailand B.E 2522 tentang Narkotika dan Undang-Undang Thailand B.E 2494 tentang Pidana Anak.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum¹⁶. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung jenis penelitian kepustakaan yang penulis lakukan. Adapula sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Tindak Pidana Anak, Undang-Undang Thailand B.E 2522 tentang Narkotika dan Undang-Undang Thailand B.E 2494 tentang Pidana Anak serta jurnal-jurnal, buku dan referensi dari situs internet tentang hukum pidana terhadap anak pengguna narkoba di Indonesia dan Thailand.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid*, hlm. 150.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan diteliti yang informasinya dapat diperoleh dari buku-buku, laporan ilmiah, karangan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik secara ilmiah yang diperoleh dari hasil kunjungan ke perpustakaan¹⁷. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan karena informasi yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan (*offline*) Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Thailand, buku tentang narkoba, buku tentang pidana anak, laporan hasil penelitian, makalah tentang narkoba, dan semua berita dari surat kabar.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum¹⁸. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam membandingkan hukum pidana di Indonesia dengan di Thailand.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 194.

¹⁸Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 242.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan di dalam penulisan yaitu:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk penelitian mengenai Perbandingan Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand.

Bab II Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang perbandingan hukum, hukum pidana, anak, narkotika, penjatuan pidana narkotika di Indonesia dan Thailand.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil rumusan masalah tentang penjatuan pidana terhadap anak pengguna narkotika di Indonesia dan Thailand, perbedaan dan persamaan penjatuan pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika di Indonesia dan di Thailand.

Bab IV Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing, diterjemahkan sebagai berikut¹⁹: *Comparative law* (bahasa Inggris), *Vergleihende rechtlehre* (bahasa Belanda), *Droit compare* (bahasa Perancis). Istilah di tersebut sering diterjemahkan lain yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain²⁰. Pendapat pertama yang dikutip adalah Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.

Pendapat kedua yang dikutip adalah pendapat Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Gutteridge

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990, hlm 3.

²⁰ *Ibid.*, hlm 4.

menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Pendapat Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Sedangkan Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya. Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup “analysis and comparison of the laws”. Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum²¹. Menurut Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan²².

Berdasarkan definisi para ahli mengenai perbandingan hukum dapat ditarik kesimpulan yaitu perbandingan hukum adalah sebagai suatu

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*,5.

disiplin ilmu sekaligus sebagai cabang ilmu hukum, pada awalnya dipahami sebagai salah satu metoda pemahaman sistem hukum, disamping sosiologi hukum.

Menurut Polack, seperti yang dikutip R. Soeroso dalam buku milik Barda Nawawi Arief, tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul perkembangan dari konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Jika ditelaah lebih lanjut, maka tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan daripada hukum yang dibandingkan, namun yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang dari pada perbedaan dan persamaan tersebut. Adapun manfaat mempelajari perbandingan hukum adalah untuk²³ :

1. Unifikasi hukum.
2. Harmonisasi hukum.
3. Mencegah adanya chauvinism hukum nasional (secara negative) dan menempuh kerja sama internasional (Secara positif).
4. Memahami hukum asing .
5. Pembaruan hukum nasional.

Perbandingan hukum di Thailand diartikan sebagai berikut, Hukum komparatif atau perbandingan hukum adalah studi tentang perbedaan dan persamaan antara hukum dari berbagai negara²⁴. Pentingnya perbandingan hukum telah meningkat pesat di era internasionalisme

²³ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁴Definition, *Definition For Comparative Law*, <https://www.definitions.net/definition/Comparative%20law>, (diakses pada 29 November 2019).

saat ini, khususnya dibidang globalisasi ekonomi, dan demokratisasi. Manfaat membandingkan hukum dengan negara lain yaitu salah satunya untuk mengkoreksi dan mengisi kekosongan terhadap hukum yang telah berlaku, selain itu juga adanya unifikasi terhadap hukum.

Perbandingan hukum dapat membantu lembaga-lembaga hukum internasional, seperti sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam menganalisis undang-undang dari berbagai negara mengenai kewajiban perjanjian mereka. Perbandingan hukum dapat memberikan wawasan tentang pertanyaan tentang transplantasi hukum, yaitu transplantasi hukum dan lembaga hukum dari satu sistem ke sistem lainnya²⁵. Dapat disimpulkan bahwa hukum disuatu negara tidak sama pengaturannya dengan negara lain, ada beberapa aspek yang diterapkan disuatu negara namun tidak di negara lain.

Komparatif merupakan pengembangan teori hukum umum. Hukum komparatif berfungsi sebagai disiplin ilmu yang mencoba untuk memahami berbagai sistem hukum dalam totalitas dan dalam hubungan mereka satu sama lain, tanpa harus berusaha menghindari atau meminimalkan perbedaan yang ada di antara mereka²⁶. Cara lainnya yaitu dengan melihat masyarakat tersebut seperti kebiasaan adatnya, hal tersebut bisa menjadi dasar pembuatan hukum yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat disiplin sosial.

Awal abad ke-20 berbagai tujuan dianggap berasal dari Hukum Komparatif yaitu harus menginformasikan pembuatan undang-undang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ralf Christian Michaels, *Comparative Law*, Oxford University, Inggris: Januari 2001, hlm.1

nasional, membantu hakim dalam penyelesaian pertanyaan-pertanyaan sulit, memberikan dasar untuk penyatuan atau harmonisasi hukum, atau sekadar menambah pengetahuan dan memperluas kesadaran, terutama dalam pendidikan hukum²⁷. Tujuan ilmu hukum harus dipenuhi secara umum. Dari sudut pandang ini, Hukum Komparatif hanyalah bentuk khusus dari ilmu hukum umum.

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, pembahasan tentang perbandingan hukum sangatlah berbeda, Indonesia mengambil pengertian pengertian tentang perbandingan hukum dari definisi para ahli karena pada dasarnya pemerintahan yang berbeda pula dengan Indonesia. Pemerintahan Thailand mirip dengan Inggris. Ada seorang perdana menteri yang berfungsi sebagai pemerintah parlementer dan seorang raja turun temurun yang berfungsi sebagai kepala negara²⁸. Pemerintah Thailand saat ini telah ada selama 700 ratus tahun terakhir. Raja saat ini berasal dari garis keluarga yang memerintah sejak kejatuhan kekaisaran Ayuthaya. Raja berfungsi sebagai kepala negara dan pemimpin spiritual, tetapi tidak memiliki otoritas politik²⁹. Tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang sistem hukum yang berlaku untuk menyempurnakan sistem hukum yang berlaku, untuk berkontribusi

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wikiversity, “*Comparative Law/Thai Legal*”, https://en.wikiversity.org/wiki/Comparative_law_and_justice/Thailand, (diakses pada 22 Desember 2019).

²⁹ *Ibid.*

pada penyatuan sistem hukum dari skala yang lebih kecil atau lebih besar³⁰.

B. Hukum Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana³¹. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat³².

Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu³³. Pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian luas yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Sedangkan pengertian sempit yaitu hak

³⁰ W.E Butler and Michael Palmer, 2018, "*The Journal of Comparative Law*", Wildy, Simmonds and Hill Publishing, <https://www.wildy.com/isbn/1477-0814/journal-of-comparative-law-annual-subscription>, (diakses pada 22 Desember 2019).

³¹ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

³² O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, hlm 121.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2.

negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut merupakan kewenangan dari lembaga legislatif untuk merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman pidananya, untuk selanjutnya tugas dan fungsi memeriksa dan menurut suatu perkara pidana ada dalam kewenangan lembaga yudikatif³⁴.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut³⁵.

Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada

³⁴ *Ibid.*

³⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 1-2.

mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut³⁶.

Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam kesatu, adalah mengenai “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam kedua, adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability atau criminal responsibility*). Yang disebut dalam kesatu dan kedua merupakan “hukum pidana materiil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ketiga adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materiil³⁷.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hokum / undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang / pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan

³⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1.

³⁷ *Ibid.*.

ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut³⁸.

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif)³⁹.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus.⁴⁰ Fungsi umum bagi hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper-kosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

³⁸ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3.

³⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 7.

⁴⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 9.

Menurut hukum pidana Thailand seorang terdakwa tidak bersalah sampai terbukti bersalah dan beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum. Terdakwa harus diberi manfaat dari keraguan tersebut⁴¹. Jika seorang terdakwa dihukum karena melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan hukuman sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Ketentuan dasar yang mengatur pelanggaran pidana dapat ditemukan dalam KUHP Thailand dan Hukum Acara Pidana. Peran jaksa penuntut umum adalah untuk menyajikan fakta dan informasi kepada pengadilan untuk menetapkan kesalahan terdakwa dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum.

Keputusan untuk menyatakan "bersalah" atau "tidak bersalah" sepenuhnya merupakan keputusan terdakwa. Dalam hal terdakwa mengaku bersalah, hukum mengizinkan pengadilan untuk mengurangi hukuman tidak lebih dari setengah. Jaksa penuntut umum tidak berwenang untuk merekomendasikan hukuman.

Sistem hukum juga tidak mengatur untuk tawar-menawar pembelaan atau mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih rendah. Secara umum, undang-undang menetapkan bahwa semua proses pengadilan dilakukan di pengadilan terbuka dan di hadapan terdakwa. Hukum pidana Thailand berlaku untuk warga negara Thailand dan orang asing yang melakukan kejahatan di wilayah Thailand, oleh sebab itu Thailand merupakan Negara Interpol⁴². Sistem juri juga tidak ada di Thailand, sedangkan

⁴¹ Travel Government of Canada, "*Overview of the Criminal System in Thailand*", <https://travel.gc.ca/travelling/advisories/overview-of-the-criminal-law-system-in-thailand>, (diakses pada 19 November 2019).

⁴² *Ibid.*

hukuman mati dapat dijatuhkan untuk beberapa pelanggaran, termasuk pelanggaran terkait narkoba⁴³.

Seseorang akan dihukum secara pidana hanya jika tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut diberikan sebagai pelanggaran dan hukumannya ditentukan oleh hukum yang berlaku pada saat melakukan tindakan tersebut, dan hukuman yang akan dijatuhkan pada pelanggar adalah yang disediakan oleh hukum⁴⁴. Apabila menurut hukum sebagaimana diatur setelah itu, tindakan tersebut bukan lagi merupakan pelanggaran, orang yang melakukan tindakan tersebut akan dibebaskan dari menjadi pelaku dan jika ada putusan akhir yang menjatuhkan hukuman, orang tersebut akan dianggap tidak pernah dihukum oleh putusan karena melakukan pelanggaran tersebut. Apabila, jika orang tersebut masih menjalani hukuman, hukuman akan segera berakhir⁴⁵.

Undang-Undang Pidana Thailand juga menjelaskan beberapa jenis hukuman yang bisa dijatuhkan terhadap tersangka antara lain hukuman mati, penjara, kurungan, perampasan properti⁴⁶. Hukuman mati dan penjara seumur hidup tidak akan dijatuhkan kepada pelaku yang berusia kurang dari delapan belas tahun. Pelaku yang berusia kurang dari delapan belas tahun telah melakukan pelanggaran untuk dihukum dengan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup, hukumannya, seperti yang

⁴³ IDPC, “*Thailand Amends Drug Law to Reduce Penalties and Ensure More Proportionate Sentencing*”, <https://idpc.net/blog/2017/02/thailand-amends-drug-law-to-reduce-penalties-and-ensure-more-proportionate-sentencing>, (diakses pada 19 November 2019)

⁴⁴ Thailand Criminal Code B.E 2499, <https://www.samuihorsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#1>, (diakses pada 22 Desember 2019).

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

disebutkan di atas, maka akan diringankan yaitu dipenjara selama lima puluh tahun.

Seseorang yang melakukan pelanggaran dapat penjara dan denda, jika Pengadilan menganggapnya disarankan hanya akan menjatuhkan hukuman penjara. Dalam menghitung periode hukuman penjara, satu hari yang dimulai di penjara harus dimasukkan juga dan akan dihitung untuk satu hari penuh, terlepas dari jumlah jam. Jika periode perhitungan ditentukan dalam bulan, satu bulan akan dihitung selama tiga puluh hari, dan, jika ditentukan dalam tahun, itu akan dihitung sesuai dengan kalender resmi⁴⁷. Pembebasan akan terjadi pada hari berikutnya setelah berakhirnya masa hukuman penjara.

C. Anak

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan⁴⁸. Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Poerwadarminta WJS, *Op.Cit.* hlm.11

perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa⁴⁹. Pengertian kedudukan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak

⁴⁹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm.30.

yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang⁵⁰.

Menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase⁵¹:

Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam: masa bayi yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun, masa kanak-kanak pertama yaitu anak umur 2-5 tahun, masa kanak-kanak terakhir yaitu antara umur 5-12 tahun.

⁵⁰ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm.42-43.

⁵¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 57.

Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.

Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.

Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri⁵². Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa⁵³.

Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.

Usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti misalnya dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.

Pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri⁵⁴. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun⁵⁵.

Definisi anak di Thailand di adopsi dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak 1990 yang mendefinisikan "anak" sebagai "setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali di bawah hukum yang berlaku untuk anak itu, mayoritas dicapai sebelumnya". Anak-anak adalah kelompok warga yang sangat penting di Thailand. Thailand setuju bahwa anak-anak harus tumbuh bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Mereka seharusnya dapat berkembang secara fisik, intelektual, emosional dan sosial dengan kebebasan dan martabat⁵⁶.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.15.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.16.

⁵⁶ Rutchaneekorn Chotchaisathit, "Child Protection in Thailand: Towards an Improved System", *Thesis*, Australia:2014, hlm.19.

Ada beberapa pengertian lain tentang anak yang diadopsi oleh Negara Thailand, antara lain⁵⁷. Pengumuman Partai Revolusioner No. 294 tahun 1972 tentang perilaku anak yang tidak pantas mendefinisikan seorang anak sebagai orang di bawah usia 18 tahun yang belum mencapai mayoritas melalui perkawinan. Kamus resmi Thailand yang diterbitkan oleh Royal Institute pada tahun 1982 mendefinisikan "anak" sebagai orang di bawah usia 14 tahun⁵⁸.

Undang-undang Promosi dan Koordinasi Pemuda Nasional tahun 1978, yang merupakan undang-undang utama negara dalam promosi dan pengembangan pemuda, mendefinisikan "pemuda" sebagai orang yang belum berusia lebih dari 25 tahun. Oleh karena itu, definisi "anak muda" mencakup "anak"⁵⁹.

Undang-undang yang Melembagakan Pengadilan Remaja dan Keluarga dan Prosedur Remaja dan Keluarga tahun 1991 mendefinisikan kata "anak" sebagai orang yang berusia lebih dari 7 tahun tetapi di bawah 14 tahun. Undang-undang ini juga mendefinisikan kata "pemuda" sebagai orang yang berusia lebih dari 14 tahun. usia, tetapi di bawah usia 18 tahun⁶⁰.

Rencana Pengembangan Anak dan Remaja di bawah Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Ketujuh (1992-1996)

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Sebastian H. Brousseau, *Custody of a child in Thailand / Thai Law*, With the help of Mr. Terdpong Fuangfoovongrath and Miss Uraiporn Namprakhai, Thai attorneys, Thailand: January 15th, 2010 (Updated in 2016), <http://www.thailawonline.com/en/family/children/custody-of-a-child-thailand.html>, (diakses pada 22 Desember 2019).

⁵⁹ Rutchaneekorn Chotchaisathit, "Child Protection in Thailand: Towards an Improved System", *Thesis*, Australia:2014, hlm.20.

⁶⁰ *Ibid.*

membagi anak-anak menjadi dua kelompok: mereka yang berusia antara 0 dan 4 dan mereka yang berusia antara 5 dan 14 tahun, terutama untuk kenyamanan dalam menangani setiap kelompok. kebutuhan dan persyaratan khusus. Mereka yang berusia antara 15 dan 25 tahun disebut "pemuda".

Secara eksklusif orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang dilakukan untuk membesarkan anak. Orang tua atau kedua orang tua yang memiliki kekuatan orang tua akan memiliki hak untuk membuat semua keputusan mengenai anak, termasuk, misalnya, pilihan mengenai agama atau pendidikan⁶¹. Hukum Thailand menjelaskan tentang hak asuh dapat berlaku hanya dalam hal-hal di mana orang tua adalah orang tua secara fisik hadir tetapi di bawah Hukum Sipil, orang tua atau orang tua dapat jauh dari anak dan masih memiliki 'kekuatan orang tua' (otoritas orang tua)⁶². Alasan Thailand lebih condong terhadap hukum sipil karena dipengaruhi oleh dasar negara Thailand itu sendiri, dan di dalam hukum sipil penjelasan mengenai anak lebih luas.

Istilah kekuatan orang tua muncul dalam beberapa klausa Komersial dan Kode Sipil Thailand (CCCT), termasuk klausa 1549, 1551, dll. Klausul 1567 menjelaskan beberapa hak orang tua terhadap anak yaitu Untuk menentukan tempat tinggal anak, untuk menghukum anak dengan cara yang masuk akal untuk tujuan disiplin, meminta anak untuk

⁶¹Sebastian H. Brousseau, *Custody of a child in Thailand / Thai Law*, With the help of Mr. Terdpong Fuangfoovongrath and Miss Uraiporn Namprakhai, Thai attorneys, Thailand: January 15th, 2010 (Updated in 2016), <http://www.thailawonline.com/en/family/children/custody-of-a-child-thailand.html>, (diakses pada 22 Desember 2019).

⁶² *Ibid.*

melakukan pekerjaan yang mungkin masuk akal untuk kemampuan dan kondisinya dalam kehidupan, untuk menuntut pengembalian anak dari setiap orang yang secara tidak sah menahannya⁶³.

Klausul 1556 dari CCCT menyebutkan bahwa hanya satu orangtua yang harus melaksanakan kekuatan orangtua dalam kasus-kasus seperti misalnya, Ibu atau Ayah sudah meninggal, tidak pasti apakah ibu atau ayah hidup atau mati, Ibu atau Ayah telah dinilai tidak kompeten atau tidak kompeten, Ibu atau Ayah ditempatkan di rumah sakit karena kelemahan mental, kekuatan orang tua telah diberikan kepada Ibu atau Ayah atas perintah Pengadilan (misalnya, putusan cerai), Ibu dan Ayah telah mencapai persetujuan yang disediakan oleh hukum yang dapat dibuat⁶⁴.

Klausula 1568 (CCCT) menyatakan bahwa "di mana seseorang yang sudah memiliki anak menikahi orang lain, kekuatan orang tua atas anak tersebut dilakukan oleh orang tersebut"⁶⁵. Dengan kata lain, perkawinan tidak memberikan hak apa pun kepada pasangannya atas anak-anak dari Suami atau Istri baru mereka. Kewajiban terikat Anak yaitu menjaga orang tua mereka, hal tersebut ada di Klausul 1563 CCCT dan orang tua terikat untuk menjaga anak-anak mereka dan untuk memberikan pendidikan yang layak selama minoritas mereka ada di Klausul 1564 CCCT. Kewajiban atau tanggung jawab orang tua dapat berlanjut bahkan setelah anak-anak mereka menjadi dewasa, ketika anak-anak adalah sui juris (dewasa), orang tua terikat untuk mempertahankan mereka hanya

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

ketika mereka lemah dan tidak mampu mencari nafkah (Pasal 1564 CCCT baik-baik saja)⁶⁶.

Hukum Thailand juga telah mengatur hak-hak anak termasuk hak untuk kesehatan, pendidikan, kehidupan keluarga, bermain dan rekreasi, standar hidup yang memadai dan dilindungi dari pelecehan dan bahaya. Hak-hak anak mencakup kebutuhan perkembangan dan sesuai usia mereka yang berubah seiring waktu ketika seorang anak tumbuh⁶⁷. Ada empat prinsip umum yang menopang semua hak anak⁶⁸:

Non-diskriminasi berarti bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dalam semua situasi dan setiap saat. Misalnya, setiap anak harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, kebangsaan, agama, kecacatan, orangtua, orientasi seksual atau status lainnya anak tersebut.

Kepentingan terbaik anak harus menjadi "pertimbangan utama" dalam semua tindakan dan keputusan mengenai seorang anak, dan harus digunakan untuk menyelesaikan konflik antara berbagai hak. Misalnya, ketika membuat keputusan anggaran nasional yang memengaruhi anak-anak, Pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana pemotongan akan berdampak pada kepentingan terbaik anak.

Hak untuk bertahan hidup dan berkembang menggarisbawahi pentingnya untuk memastikan akses ke layanan dasar dan kesetaraan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Children's Rights Alliance, "*What are Children's Rights*", <https://childrensrights.ie/childrens-rights-ireland/childrens-rights-ireland>, (diakses pada 22 Desember 2019).

⁶⁸ *Ibid.*

kesempatan bagi anak-anak untuk mencapai perkembangan penuh mereka. Sebagai contoh, seorang anak penyandang cacat harus memiliki akses yang efektif ke pendidikan dan perawatan kesehatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Pandangan anak berarti bahwa suara anak harus didengar dan dihormati dalam semua hal yang menyangkut haknya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak di Thailand memiliki hak dan kewajiban yang hal tersebut menimbulkan keterikatan dengan orang tua, dan seorang anak di Thailand dipandang sudah dewasa apabila ia sudah berumur 21 tahun. Hukum Thailand menjelaskan bahwa anak merupakan generasi penerus yang hak dimilikinya harus tetap di jaga, dan jangan sampai apa yang diperbuatnya dapat menimbulkan pencabutan hak.

D. Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris indonesia narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang⁶⁹.

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang⁷⁰. Terminologi narkotika familiar digunakan oleh aparat

⁶⁹ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 390.

⁷⁰ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 609.

penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan.

Sebutan lain Narkotika yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Berikut merupakan definisi dari para ahli mengenai narkotika:

William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit⁷¹. Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran⁷². Smith Kline dan French Clinical memberi definisi narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morfin, kokain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meperidin dan methadon)⁷³.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau

⁷¹ William Banton, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, volume 16, h. 23*. Lihat juga: Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona* (Jakarta: Rajawali press, 2008), hlm. 78.

⁷² Soedjono, *ptologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung 1997), hlm. 78.

⁷³ Smith kline dan French Clinical , *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse* (Pensilvania: Philladelphia, 1969), hlm. 91.

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Lebih lanjut dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dijelaskan ada tiga jenis golongan narkoba, yaitu⁷⁴:

- a. Narkoba Golongan I adalah narkoba hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkoba Golongan II adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkoba golongan III adalah narkoba yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkoba ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein,

⁷⁴Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35.

Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan terdapat empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu⁷⁵:

Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)).

Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)).

Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)).

⁷⁵ Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 256.

Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan. kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur)⁷⁶.

Undang-Undang Narkoba Thailand (B.E 2522) mendefinisikan istilah narkoba sebagai segala bentuk bahan kimia atau zat yang, setelah dikonsumsi baik dengan mengambil secara lisan, menghirup, merokok, menyuntikkan atau dengan cara apa pun, menyebabkan efek fisiologis atau mental secara signifikan seperti kebutuhan peningkatan dosis yang terus-menerus, memiliki gejala penarikan ketika kehilangan narkoba,

⁷⁶Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

kebutuhan fisik dan mental yang kuat dosis dan kesehatan secara umum semakin memburuk.

Zat yang didefinisikan sebagai narkotika diklasifikasikan ke dalam 5 kategori Zat-zat yang dikenal umum berada di dalam lingkup Undang-Undang Narkotika Thailand meliputi⁷⁷:

1. Kategori 1 - Heroin; Amfetamin; Metamfetamin; MDMA (Ekstasi); LSD.
2. Kategori 2 - Kokain; Kodein; Metadon; Morfin.
3. Kategori 5 - Ganja; jamur psikoaktif; Pabrik Kratom.

Penggunaan terapi narkotika utama adalah untuk menghilangkan rasa sakit, dan karenanya mereka sering disebut analgesik narkotika. Narkotika yang paling terkenal adalah opiate, yaitu senyawa yang ditemukan atau berasal dari opium⁷⁸. Opium diperoleh sebagai jus susu kering dari polong opium poppy (*Papaver somniferum*). Sekitar 20 atau lebih alkaloid yang ditemukan dalam opium, yang paling penting adalah morfin, yang terutama bertanggung jawab atas sifat narkotika opium. Obat-obatan dengan aksi yang mirip dengan morfin yang diproduksi secara sintetis dikenal sebagai opioid. Istilah opiat, opioid, dan narkotika digunakan secara bergantian⁷⁹. Sebagian besar negara produksi, perdagangan, dan penggunaan narkotika terbatas karena sifat adiktifnya, efek yang merugikan, dan timbulnya penyalahgunaan narkoba.

⁷⁷Siam Legal, “*Criminal Drug Offence in Thailand*”, <https://www.siam-legal.com/litigation/criminal-defence-drug-offences-in-thailand.php>, (diakses pada 20 November 2019).

⁷⁸Vincent Paul Dole, “*Drug*”, *Encyclopedia Britannica*, 2019, <https://www.britannica.com/biography/Vincent-Paul-Dole>, (diakses pada 22 Desember 2019).

⁷⁹ *Ibid.*

Pandangan secara medis, narkotika adalah beberapa obat penghilang rasa sakit yang paling kuat yang tersedia, tetapi mereka digunakan dengan sangat hati-hati karena sifatnya adiktif⁸⁰. Narkotika sering diberikan kepada pasien yang sekarat karena kanker dan sangat kesakitan. Narkotika tidak hanya menghilangkan rasa sakit tetapi juga mengurangi penderitaan, kekhawatiran, ketakutan, dan kepanikan yang berhubungan dengan rasa sakit yang hebat, karena pasien kanker stadium akhir seringkali tidak memiliki hidup yang lama dan penyediaan kualitas hidup yang dapat diterima mungkin merupakan masalah terpenting, masalah kecanduan sebagian besar tidak relevan.

Terapi yang paling efektif untuk pecandu narkotika melibatkan metadon opiat sintetis yang bersifat adiktif, menghambat keinginan pecandu akan heroin dan tidak memberikan efek euforia sendiri yang mengganggu. Overdosis adalah risiko utama jika mengonsumsi narkotika dalam jangka waktu lama. Selain itu bahaya yang biasa terkait dengan konsumsi Narkotika ancaman paling signifikan terhadap kesehatan nasional adalah penyebaran HIV oleh orang yang menyuntikkan narkoba. Peningkatan penggunaan metamfetamina kristal sering dipandang sebagai alternatif yang lebih berbahaya daripada yaa baa. Thailand telah diidentifikasi sebagai "negara prioritas tinggi" oleh Kantor PBB tentang Narkoba dan Kejahatan (UNODC) Program HIV.

Tahun 2013, diperkirakan ada 440.000 orang yang hidup dengan HIV di Thailand, atau sekitar 1,1 persen dari total populasi. Kasus HIV

⁸⁰ *Ibid.*

telah menurun dari puncak tahun 1990-an, tingkat penurunan mulai lambat dari tahun 2010 dan seterusnya, dan sekarang tingkat HIV meningkat di antara orang muda dan kelompok berisiko⁸¹. Penurunan penularan HIV telah dikaitkan dengan kampanye pencegahan dan pengobatan yang luas. Namun, orang yang menyuntikkan narkoba, secara historis, telah dikeluarkan dari kampanye, meskipun berbagi jarum adalah mode penularan utama. Pada tahun 2009, diperkirakan 40.300 orang menyuntikkan narkoba. Pada 2012, 25,2 persen dari mereka yang menyuntikkan narkoba hidup dengan HIV⁸². Setengah dari apa yang terjadi pada pertengahan 1990-an, 15 tingkat prevalensi tetap di antara yang tertinggi di Tenggara Asia. Jumlah orang yang menyuntikkan narkoba semakin meningkat, terutama di provinsi Thailand Selatan.

E. Penjatuhan Pidana Narkotika di Indonesia dan Thailand

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang tentang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

⁸¹ James Windley, *"Drug and Drug Policy in Thailand"*, University of East London, American:2016, page 24.

⁸² Government of Thailand, 2014 Thailand AIDS Response Progress Report, UNODC, Regional Program for Southeast Asia 2014-2017, https://www.researchgate.net/publication/281271815_Drugs_and_Drug_Policy_in_Thailand, (diakses pada 22 Desember 2019).

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸³ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Pasal 111 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115⁸⁴.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118⁸⁵.

⁸³ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009,. hlm.90.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121⁸⁶.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124⁸⁷.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 92.

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128⁸⁸.

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130⁸⁹.

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134⁹⁰.

Alasan utamanya adalah jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.95.

⁹⁰ *Ibid.*

kepentingankepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia⁹¹.

Pelaku Tindak Pidana Narkoba dapat dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁹²:

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Narkoba di atas diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba termasuk dalam jenis tindak pidana

⁹¹ *Ibid.*, hlm 110.

⁹² *Ibid.*

husus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Pengaturan mengenai sanksi pidana narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ⁹³:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

⁹³ *Ibid.*, hlm.120.

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap Penyalahguna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dilembaga yang khusus menangani rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Undang-undang tentang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya, Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-Undang tentang Narkotika dibandingkan dengan KUHP⁹⁴. Dalam Undang-Undang tentang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.97.

diatur dalam pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa⁹⁵:

1. Pencabutan izin usaha; dan/atau
2. Pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukumannya berupa⁹⁶:

1. Hukuman Pokok: Hukuman mati, Hukuman penjara, Hukuman kurungan, Hukuman denda, Hukuman Pidana Tutupan.
2. Hukuman Tambahan: Pencabutan beberapa hak yang tertentu, Perampasan barang yang tertentu, Pengumuman keputusan hakim.

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja⁹⁷. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.

Tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Soedjono Dirjosisworo.1990. hukum narkotika di Indonesia. Bandung .PT. citra Aditya bakti.

tersebut. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit⁹⁸.

Penjelasan mengenai pengertian dan jenis-jenis narkoba yang ada didalam Undang-Undang Thailand, diatur dalam Undang-Undang Thailand B.E 2522 tentang Narkoba. Undang-undang Thailand mengklasifikasikan zat-zat yang dikenal umum berada di dalam lingkup Undang-Undang Narkoba meliputi⁹⁹:

1. Kategori 1 - Heroin; Amfetamin; Metamfetamin; MDMA (Ekstasi); LSD.
2. Kategori 2 - Kokain; Kodein; Metadon; Morfin.
3. Kategori 5 - Ganja; jamur psikoaktif; Pabrik Kratom.

Undang-undang Thailand B.E 2522 tentang Narkoba di dalamnya mengatur pidana bagi penggunaanya sebagai berikut¹⁰⁰:

Narkoba golongan 1 dan 2: Penjara 5-20 tahun dan denda 100.000-400.000 Baht untuk produksi, impor atau penjualan ekspor, Penjara tidak lebih dari 5 tahun dan denda tidak melebihi 100.000 Baht karena membawa lintas batas penjara 1-5 tahun dan denda 20.000-100.000 Baht untuk kepemilikan, penggunaan atau konsumsi.

⁹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.hlm. 98-99.

⁹⁹ Siam Legal, "*Criminal Drug Offence in Thailand*", <https://www.siam-legal.com/litigation/criminal-defence-drug-offences-in-thailand.php>, (diakses pada 20 November 2019).

¹⁰⁰ *Ibid.*

Narkotika golongan 3 dan 4: Penjara tidak lebih dari 5 tahun dan denda tidak melebihi 100.000 Baht untuk produksi, impor atau penjualan ekspor. Penjara tidak lebih dari 5 tahun dan denda tidak melebihi 100.000 Baht karena membawa lintas batas penjara tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak melebihi 20.000 Baht atau keduanya untuk kepemilikan, penggunaan atau konsumsi. Di bawah ketentuan Undang-Undang Narkotika Thailand, hukumannya adalah sebagai berikut¹⁰¹:

Zat Kategori 1 penjara seumur hidup dan denda 1.000.000-5.000.000 Baht untuk produksi, impor atau ekspor, kecuali untuk tujuan pembuangan, dalam hal ini hukumannya adalah mati. Niat untuk 'membuang' disimpulkan melalui jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang, penjara seumur hidup dan denda 100.000 - 5.000.000 Baht, atau hukuman mati, (tergantung pada jumlah bahan atau zat yang ditemukan) untuk dibuang atau dimiliki untuk tujuan pembuangan hingga 10 tahun penjara atau denda 20.000 - 200.000 Baht untuk kepemilikan. Perhatikan lagi bahwa jika jumlah zat atau zat yang ditemukan melebihi tingkat yang ditentukan dalam tindakan, maka kepemilikan untuk tujuan pembuangan akan disimpulkan. Juga harus dicatat bahwa 'pembuangan' didefinisikan dalam tindakan sebagai makna untuk 'menjual, mendistribusikan, memberikan tanpa pandang bulu, menukar atau member hingga 3 tahun penjara atau denda 10.000 - 60.000 Baht untuk konsumsi.

Zat Kategori 2 penjara 10 tahun dan denda 100.000 - 1.000.000 Baht untuk produksi, impor atau ekspor. Jika zat atau zat yang ditemukan

¹⁰¹ *Ibid.*

termasuk morfin, opium atau kokain, hukumannya ditingkatkan menjadi penjara 20 tahun seumur hidup dan denda 2.000.000 - 5.000.000 Baht hingga 10 tahun penjara dan denda 20.000 - 200.000 Baht atau keduanya untuk pembuangan atau kepemilikan untuk tujuan pembuangan. Dalam hal morfin, opium atau kokain, 3-20 tahun atau denda 60.000 - 400.000 Baht jika jumlahnya di bawah 100 gram, atau 3-20 tahun atau denda 500.000 - 5.000.000 Baht jika lebih hingga 5 tahun atau denda tidak melebihi 100.000 Baht atau keduanya untuk kepemilikan. Jika kuantitasnya 100 gram bahan murni atau lebih, ini akan dianggap sebagai kepemilikan untuk tujuan pembuangan, enam bulan hingga tiga tahun atau denda 10.000 - 60.000 Baht atau keduanya untuk konsumsi.

Cannabis di bawah kategori 5 penjara 2-15 tahun dan denda 200.000 - 1.500.000 Baht untuk produksi, impor atau ekspor dari 2-10 tahun penjara atau denda 40.000 - 200.000 Baht atau keduanya untuk pembuangan atau kepemilikan untuk tujuan pembuangan. Jika kuantitasnya lebih dari 10 kilogram, hukumannya dinaikkan menjadi maksimum 15 tahun dan denda 200.000 - 1.500.000 Baht penjara tidak lebih dari 5 tahun dan atau denda tidak melebihi 100.000 Baht atau keduanya karena kepemilikan penjara tidak lebih dari 1 tahun dan denda 100.000 - 1.000.000 untuk konsumsi.

Tanaman Kratom di bawah kategori 5¹⁰². Penjara tidak lebih dari 2 tahun dan denda tidak melebihi 200.000 Baht untuk produksi, impor atau ekspor penjara tidak lebih dari 2 tahun atau denda tidak melebihi

¹⁰² *Ibid.*

40.000 Baht atau keduanya untuk pembuangan atau kepemilikan untuk tujuan pembuangan. Jika kuantitasnya lebih dari 10 kilogram, hukumannya adalah penjara tidak lebih dari 2 tahun dan denda tidak melebihi 200.000 Baht penjara tidak lebih dari 1 tahun atau denda tidak melebihi 20.000 Baht atau keduanya karena kepemilikan penjara tidak lebih dari 1 bulan atau denda tidak melebihi 2.000 Baht untuk konsumsi.

Undang-undang narkoba Thailand juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pengguna narkoba berupa rehabilitasi, sama dengan di Indonesia. Undang-Undang Kontrol Narkotika Thailand B.E 2519 (1976) menunjuk Badan Kontrol Narkotika (NCB) dengan tanggung jawab keseluruhan untuk pencegahan dan penindasan penggunaan narkoba di Thailand¹⁰³. Kantor Dewan Kontrol Narkotika (ONCB) adalah badan yang mengimplementasikan resolusi NCB dan berperan penting dalam membrantas serta menyediakan pemberian rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba.

Di bawah ketentuan undang-undang Thailand, pejabat yang berwenang (polisi), harus mengikuti wewenang untuk menghentikan, mencari dan menangkap, berikut tugas dan kewenangannya¹⁰⁴:

Pejabat memasuki dan mencari di suatu tempat atau tempat tinggal, asalkan mereka memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa ada seseorang atau orang-orang yang secara wajar mereka curigai terlibat dalam komisi pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba di tempat itu atau ada obat-obatan terlarang di tempat itu. , atau

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

tempat yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam komisi pelanggaran yang melibatkan obat-obatan terlarang.

Pejabat harus memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa menunda pencarian apa pun untuk mendapatkan surat perintah akan mengakibatkan pelarian tersangka, atau zat yang dipertanyakan disembunyikan, dihancurkan atau dengan cara lain diubah. Apabila dalam melakukan pencarian orang atau kendaraan apapun jika ada alasan yang masuk akal untuk mencurigai mereka membawa atau menyembunyikan obat-obatan terlarang.

Pejabat memasuki dan mencari tempat tanpa surat perintah (memiliki dasar kecurigaan yang masuk akal) dan memerintahkan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalani tes narkoba saat itu juga (di bawah ketentuan amandemen kelima Undang-Undang Narkotika di Thailand) yang kemudian menangkap setiap orang yang terlibat dalam komisi pelanggaran yang terkait dengan obat-obatan terlarang.

Menyita obat-obatan terlarang atau properti apa pun yang digunakan atau berniat untuk digunakan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba atau yang dapat digunakan sebagai bukti dan mencari di bawah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Thailand untuk membuat penyelidikan tentang tersangka yang diduga terlibat dalam pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba dan menerbitkan surat penyelidikan atau surat panggilan kepada orang atau pejabat lembaga Pemerintah mana pun untuk memberikan pernyataan atau menyerahkan akun, dokumen, atau bahan untuk diperiksa.

Undang-undang Narkotika Thailand juga mengatur tentang pidana bagi orang yang ikut serta dalam membantu tindak pidana narkotika, namun hal itu diatur dalam Undang-Undang berbeda, hal tersebut diatur dalam Undang-undang tentang Tindakan Penindasan Pelanggar dalam Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika 2534 (1991)¹⁰⁵. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dua orang atau lebih yang berkonspirasi untuk melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika akan bersalah atas persekongkolan dan jika pelanggaran selanjutnya dilakukan, semua akan sama-sama bertanggung jawab atas hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran tersebut¹⁰⁶.

Pihak berwenang juga dapat menyita, menahan atau menyita hasil perdagangan narkoba dalam hal apa pun, dan juga menuntut pelanggaran yang terjadi di luar Kerajaan, dengan ketentuan bahwa¹⁰⁷:

1. Pelanggar atau kaki tangan adalah warga negara Thailand atau memiliki tempat tinggal di Thailand.
2. Pelaku adalah orang asing dan bermaksud konsekuensinya untuk terjadi di dalam Kerajaan atau Pemerintah Thailand adalah orang yang terluka.
3. Pelaku adalah orang asing dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran di bawah hukum Negara di yurisdiksi di mana pelanggaran dilakukan, jika pelaku tersebut telah muncul di Kerajaan dan belum diekstradisi di bawah hukum ekstradisi.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Chaninat & Leads, *Drug Offenses in Thailand*, Thailand, <http://www.chaninatandleeds.com/thailand-drug-offenses.html>, (diakses pada 23 Desember 2019).

¹⁰⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya bahwa tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda¹⁰⁸.

Ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika bagi orang dewasa terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi¹⁰⁹:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dasar pemidaan bagi anak sebagai pengguna narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak mengikuti ketentuan

¹⁰⁸ Indira Hapsari dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak", *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol.5, No.3, 2016, hlm. 5.

¹⁰⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35.

pidana yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membuat sanksinya secara tersendiri, sebab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah landasan bagi hakim dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*¹¹⁰.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang perumusannya terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai beberapa karakteristik¹¹¹. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana di maksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan, b. Pekerja Sosial Profesional, c Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.7.

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial¹¹². Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan bagi anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut¹¹³:

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

¹¹² M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62.

¹¹³ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 94.

2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
7. Adanya pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Adanya pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Adapun Pasal 5 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menentukan¹¹⁴:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum. Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain¹¹⁵:

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori¹¹⁶. Anak menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

¹¹⁵ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta: 2005, hlm 17.

¹¹⁶ *Ibid.*

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penjatuhan Sanksi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun menurut pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak¹¹⁷: Pengembalian kepada orang tua/wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPSK, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan Surat Izin Mengemudi dan atau Perbaikan akibat tindak pidana.

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah pidana pokok dan pidana

¹¹⁷ *Ibid. hlm.20*

tambahan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana Pokok dan Pidana Tambahan ditentukan sebagai berikut¹¹⁸:

- a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: Pidana peringatan, Pidana dengan syarat (Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat, Pengawasan), Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga, Penjara.
- b. Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau, mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPSK di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan¹¹⁹.

Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm.6.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm.15.

penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹²⁰.

Pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas remisi atas pengurangan masa pidana, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹²¹.

Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika

¹²⁰ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 20.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 22.

masa penahanan sebagaimana disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum¹²².

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum disetiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)¹²³.

Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 Tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dan disediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun.

Berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak perlu diketahui, ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹²⁴:

¹²² *Ibid.*, hlm.25.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dikenal istilah Diversi. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana¹²⁵.

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif¹²⁶. Diversi juga bertujuan agar anak terhindar dampak negatif penerapan pidana, diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental¹²⁷.

Hakim dalam memutuskan perkara anak yang melakukan tindak pidana narkoba juga berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan sanksi pidana bagi anak seringkali

¹²⁵ Tri Jata Ayu, “Hukuman Bagi Anak di Bawah Umur Pengguna Sabu”, <https://m.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt56964786cc7fc/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu/>, (diakses pada 2 Desember 2019).

¹²⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 2.

¹²⁷ *Ibid.*

menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Hal ini tentu berbeda jauh dari tujuan pidana. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi secara konseptual.

Penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai crime without victim yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku¹²⁸. Secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia adalah juga korban¹²⁹.

Anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika dimana anak tersebut dijatuhkan sanksi oleh hakim berupa mengembalikan terdakwa kepada orang tua terdakwa dengan dasar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 24 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan¹³⁰.

Pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi. Rehabilitasi menjadi salah satu upaya terbaik yang diberikan pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Terdapat dua bentuk rehabilitasi yaitu rehabilitasi medik dan

¹²⁸ Indira Hapsari dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak", *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol.5, No.3, 2016, hlm. 5.

¹²⁹ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No.1, 2008, hlm. 98.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm.7.

rehabilitasi sosial¹³¹. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisifisik anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak, anak korban, dan/atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan kedua model rehabilitasi diatas, maka anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika perlu mengikuti program terapi dan rehabilitasi melalui berbagai bentuk¹³².

Rawat Inap adalah perawatan inap di rumah sakit khusus (Rumah Sakit Ketergantungan Obat), Rumah Sakit Jiwa atau di satu bagian (unit) Rumah Sakit Umum. Terapi ini sering disebut terapi primer (primary treatment). Terapi dapat berlangsung hingga 4-6 minggu atau mungkin lebih, bergantung jenis pelayanan yang tersedia, bahkan mungkin program rehabilitasi hingga 2 tahun.

Rawat jalan dilakukan di Rumah Sakit (khusus dan umum) bagian rawat jalan, klinik, dan puskesmas, biasanya berlangsung 10 minggu selama 2-3 jam, 2-4 kali seminggu. Program rawat jalan memiliki lebih sedikit komponen program dibandingkan rawat inap. Karena pasien lebih mudah terases pada narkoba, pemeriksaan urin secara acak merupakan bagian tidak terpisahkan.

¹³¹ Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.60.

¹³² Marton, Lydia Harlina dan Joewana, Satya, 2008, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.89.

Beberapa jenis sarana rehabilitasi yaitu rehabilitasi sosial, rehabilitasi spiritual dan rehabilitasi psikososial. Ada yang dikelola oleh Pemerintah ataupun swasta. Beberapa diantaranya menerapkan konsep Therapeutic Community (TC).

Half Way House yaitu rumah Pendampingan sebagai tempat transisi antara rumah sakit dan pulang ke rumah. Sarana ini belum dikembangkan di Indonesia. Di sini 10-20 klien tinggal bersama dengan pengawasan dan tanggung jawab memelihara rumah: belanja, masak, membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Mereka sekolah atau bekerja paruh waktu, tetapi tetap ada program pemulihan. Jenis perawatan ini cocok bagi pecandu yang tidak beroleh banyak kemajuan pada terapi primer, mereka yang tidak mendapat akses ke rumah sakit/pusat terapi rehabilitasi, dan mereka yang belum dapat dipulangkan ke rumah karena persoalan keluarga yang belum diatasi atau buruknya lingkungan.

Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat merupakan program rawat jalan (meskipun dapat memiliki tempat inap) sebagai suatu model, yang dikembangkan untuk menjangkau dan menolong pecandu di tengah masyarakat. Prinsip program ini adalah “*self help group*”, yaitu kelompok saling bantu dengan menggunakan warga masyarakat setempat yang terlatih.

Tidak semua kasus penyalahgunaan Narkotika dapat mendapatkan rehabilitasi. Adapun pidana penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pembedaan masih diperdebatkan efektifitasnya. Hal tersebut berarti

tidak ada jaminan apabila pelaku tindak pidana pada akhirnya dijatuhi pidana penjara maka dengan sendirinya akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Pidana penjara membawa dampak negatif yang sangat merugikan bagi terpidana, khususnya terpidana anak¹³³.

Adanya dampak-dampak negatif dengan penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dalam kasus anak pelaku penyalahguna narkotika tidak tepat. Seharusnya hakim dalam putusannya menerapkan sanksi pidana yang tepat agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari penerapan sanksi pidana penjara tersebut yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan hak dan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani ancaman pidananya.

Alasan lainnya adalah penjatuhan pidana penjara akan menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak. Adapun dampak dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan pada anak diantaranya adalah anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan terhadap gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari orang tua terhadap terpidana anak, anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang didapat dari terpidana lainnya dimana hal ini membuka

¹³³ Kusno Adi, "Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak", Malang: UMM Press, 2009, hlm. 89.

kemungkinan bagi terpidana untuk mempelajari perilaku kriminal terpidana yang lainnya sehingga anak akan menjadi lebih ahli tentang kejahatan, anak tersebut diberi cap oleh masyarakat, hal ini dapat kita kaitkan dengan teori labeling yang dikemukakan oleh Matza dimana memandang para kriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas.¹³⁴

Sesuai dengan konsep keadilan restoratif, hukuman terhadap pelaku tetap ada, tetapi hukuman itu diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan, bukan sebagai balas dendam dan pemidanaan. Hukuman dalam kerangka proses pendidikan bukanlah hukuman yang melemahkan semangat hidup apalagi mematikan masa depan anak, tetapi justru harus berfungsi mencerahkan secara moral dan mendewasakan sebagai pribadi yang utuh¹³⁵.

Contoh kasus anak sebagai pengguna narkoba misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 435/Pid.B/2014/PN Rap. Berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan, terdakwa adalah anak berusia 17 tahun yang kedapatan menghisap sabu-sabu dari sebuah bong Sabu yang diletakkan di atas meja di dekat TV¹³⁶. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu

¹³⁴ Santoso, Topo, dan Achjani, Eva, 2003, *Kriminologi*, Jakarta:PT. Radja Grafindo Persada, hlm. 90.

¹³⁵ Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.40.

¹³⁶ Tri Jata Ayu, "Hukuman Bagi Anak di Bawah Umur Pengguna Sabu", <https://m.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt56964786cc7fc/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu/>, (diakses pada 2 Desember 2019).

tersebut. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dan tanpa hak menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu¹³⁷:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih berusia remaja dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri dan prilakunya di masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap anak pengguna narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Thailand juga memiliki kebijakan pidana bagi pengguna narkotika di Thailand yang diatur dalam Undang-Undang B.E 2522 tentang Narkotika, Undang-Undang ini biasanya digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap orang dewasa yang menyalahgunakan narkoba, penyalahguna

¹³⁷ *Ibid.*

narkotika biasanya akan di hukum penjara sekitar 1-20 tahun serta denda yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana narkotika, penjatuan lamanya penjara dilihat berdasarkan denda yang dikenakan terhadap pelaku. Misalnya, untuk penyalahgunaan narkotika yang termsuk dalam golongan zat 1, pelaku dapat di penjara seumur hidup dan denda 1.000.000-5.000.000 Baht untuk produksi, impor atau ekspor, kecuali untuk tujuan pembuangan, dalam hal ini hukumannya adalah mati¹³⁸.

Penjatuan pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba maka digunakanlah peraturan khusus oleh pemerintah Thailand mengenai kenakalan remaja yaitu Undang-Undang B.E 2494 tentang pengadilan anak (*Juvenile Court*). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua anak berusia di bawah 7 tahun tidak dapat dihukum secara hukum. Mereka yang berusia antara 7 dan 14 tahun masih belum dapat dihukum, tetapi pengadilan dapat memaksakan kontrol perilaku melalui masa percobaan. Untuk anak-anak yang lebih tua dari 14 tetapi lebih muda dari 17, pengadilan dapat memilih untuk membiarkan mereka dalam masa percobaan atau mengurangi hukuman hingga setengahnya. Mereka yang berusia di atas 17 tetapi belum berusia 20 tahun akan menghadapi hukuman dikurangi setengah atau sepertiga¹³⁹.

Age and imprisonment

109. Thai law has clearly stated that all children aged below the age of 7 years cannot be legally punished. Those between 7 and 14 still cannot be punished, but the court may impose behavioural control through probation. For

¹³⁸ Siam Legal, "Criminal Drug Offence in Thailand", <https://www.siam-legal.com/litigation/criminal-defence-drug-offences-in-thailand.php>, (diakses pada 2 Desember 2019).

¹³⁹ Initial reports of States parties due in 1994: Thailand, UN Doc. CRC/C/11/Add.13, paras.

children older than 14 but younger than 17, the court may choose either to put them on probation or reduce the punishment by one half. Those over 17 but not yet 20 years old will face a sentence reduced either by one half or one third.

110. Therefore, the imprisonment of children under Thai law is different from that of an adult. Their trial will be conducted in special Juvenile and Family Courts, although these courts do not exist in every province.

111. When a child is sentenced to imprisonment, the child will be detained in an Observation and Protection Centre instead of a regular prison.

112. The imprisonment of children (1,102 in 1993) according to the above provisions is clearly different from that of adults, while many factors are taken into consideration.

Terjemahan Bebas:

109. Undang-undang Thailand dengan jelas menyatakan bahwa semua anak berusia di bawah 7 tahun tidak dapat dihukum secara hukum. Mereka yang berusia antara 7 dan 14 tahun masih belum dapat dihukum, tetapi pengadilan dapat memaksakan kontrol perilaku melalui masa percobaan. Untuk anak-anak yang lebih tua dari 14 tetapi lebih muda dari 17, pengadilan dapat memilih untuk membiarkan mereka dalam masa percobaan atau mengurangi hukuman hingga setengahnya. Mereka yang berusia di atas 17 tetapi belum berusia 20 tahun akan menghadapi hukuman dikurangi setengah atau sepertiga.

110. Oleh karena itu, pemenjaraan anak-anak di bawah hukum Thailand berbeda dari orang dewasa. Pengadilan mereka akan dilakukan di Pengadilan Khusus Remaja dan Keluarga, meskipun pengadilan ini tidak ada di setiap provinsi.

111. Ketika seorang anak dijatuhi hukuman penjara, anak tersebut akan ditahan di Pusat Pengamatan dan Perlindungan alih-alih penjara biasa.

112. Penahanan anak-anak (1.102 pada tahun 1993) menurut ketentuan di atas jelas berbeda dengan orang dewasa, sementara banyak faktor dipertimbangkan.

Undang-Undang B.E 2494 tentang pengadilan anak (*Juvenile Court*)

mengatur bagaimana pemidanaan anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan

ketika seorang anak atau orang muda dituduh telah melakukan suatu tindakan melawan hukum, kasusnya akan dimulai dan diselidiki oleh petugas polisi penyelidikan seperti yang dipersyaratkan oleh kasus pidana biasa tapi penyerahan pelaku remaja adalah lebih informal dan ringan¹⁴⁰. Proses penangkapan yang informal maksudnya, dalam proses penahanan orang tua anak diperbolehkan masuk ke dalam bersama anak dengan tujuan untuk meminimalisir rasa takut anak terhadap penjara, dalam proses investigasi aparat kepolisian menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan pemilihan kata yang santai karena sidang yang diadakan secara informal. Berikut proses pidana terhadap anak pengguna narkoba menurut Undang-Undang Thailand tentang Anak (B.E 2494)¹⁴¹:

Penangkapan. Penangkapan anak yang dituduh dilarang kecuali dia melakukan pelanggaran yang mencolok, yang terluka orang mengidentifikasikannya dan bersikeras untuk menangkap, atau surat perintah untuk penangkapan dibuat berdasarkan pidana kode prosedur. Setelah ditangkap, petugas polisi diharuskan oleh hukum untuk memberi tahu direktur Pusat Pengamatan dan Perlindungan (OPC) dan orang tua remaja, wali atau orang yang dengannya dia atau dia tinggal.

Pertanyaan dan Investigasi. Selama proses ini, diperlukan bahwa penasihat atau penasihat hukum disediakan untuk anak. Selain itu, kehadiran jaksa penuntut umum, psikolog atau pekerja sosial dan orang

¹⁴⁰ Duangporn Ukris, "Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series", *International Journal*, No. 59, hlm. 237.

¹⁴¹ Korakod Narkvichetr, "Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent Juvenile Delinquence In Thailand", *Thai Journal*, hlm. 132.

tua anak adalah wajib selama interogasi dan merupakan elemen penting untuk melindungi anak. Pertanyaan harus diselesaikan dalam waktu 24 jam sejak kedatangan di kantor pejabat penyelidikan. Setelah penyelidikan, anak akan dikirim ke OPC dan file pertanyaan akan dikirim ke jaksa penuntut umum.

Penahanan dan Pelepasan Sementara atas Jaminan. Secara umum, anak dapat ditahan selama investigasi di rumah penahanan OPC. Direktur OPC dapat menahan anak tersebut. Permintaan untuk rilis sementara dengan jaminan orang yang ditangkap harus dilakukan kepada pihak berwenang penahanan.

Penuntutan Pidana dan Penuntutan yang Ditangguhkan. Pemerintah diwakili dalam masalah pidana dan perdata oleh jaksa penuntut umum yang ditempatkan di seluruh negara. Jaksa penuntut umum harus memasukkan biaya dalam JFC dalam waktu 13 hari dari waktu anak itu ditangkap. Kasus di mana pelaku anak diduga melarikan diri dari tahanan sementara kasus sedang dilakukan, waktu selama pelarian tidak akan termasuk dalam periode pengisian. Hal ini karena keperluan, ketika tuduhan terhadap pelaku tidak dapat diajukan dalam periode yang disebutkan, polisi petugas atau jaksa penuntut umum akan mengajukan permohonan dengan gerak ke pengadilan untuk penundaan (perpanjangan). Suatu pelanggaran di mana hukuman minimum adalah lima tahun atau lebih, pengadilan dapat memberikan penundaan lebih lama.

Pengadilan adalah proses pencarian fakta di mana kebenaran kesalahan yang dinyatakan dalam klaim apa pun dipastikan dan digunakan sebagai alat dalam memutuskan kasus. JFC memiliki wewenang untuk mentransfer seorang remaja yang dituduh ke Pengadilan Pidana untuk diadili dan diadili setelah JFC mempertimbangkan fisik, kecerdasan, kesehatan anak, dan kebiasaan. JFC memiliki keleluasaan untuk menentukan bahwa remaja yang dituduh memiliki status yang sama dengan orang yang berusia 18 tahun atau lebih. Sejalan dengan itu, Pengadilan Kriminal dapat memindahkan orang yang dituduh ketika pelanggaran dilakukan, tidak lebih dari 20 tahun ke JFC ketika Pengadilan Kriminal menggunakan kebijaksanaannya bahwa orang tersebut harus diperlakukan sebagai anak.

Prosedur JFC bersifat informal dan disederhanakan untuk kepentingan remaja. Sidang diadakan secara pribadi. Orang-orang yang hadir di persidangan adalah terdakwa, orang tua, wali, pengacara, saksi, jaksa, anggota pengadilan dan orang lain diizinkan oleh pengadilan. Foto-foto dan laporan tentang fakta-fakta yang disajikan pada persidangan tidak akan dirilis kepada publik (*Juvenile Court and Family, 1996*).

Proses penghakiman didasarkan pada dua tahap: Ajudikasi bersalah (Pra-Ajudikasi) dan hukuman. Ajudikasi bersalah berarti bahwa pengadilan memberikan keputusan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika hakim mempertimbangkan semua bukti dan tidak yakin bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran, terlepas dari apakah terdakwa mengaku bersalah atau tidak, dia akan menolak tuduhan itu. Jika hakim

yakin bahwa terdakwa melakukan pelanggaran dia akan menghukum terdakwa dan kemudian putuskan hukuman. Setelah persidangan selesai, sebelum putusan atau perintah diberikan, putusan tersebut pengadilan akan meninjau laporan investigasi sosial yang diajukan oleh OPC.

Bagian 75 dari KUHP Thailand menyatakan bahwa setiap kali seseorang di atas 14 tahun tetapi belum berusia di atas 17 tahun melakukan apa pun tindakan yang diberikan oleh hukum sebagai pelanggaran, pengadilan harus mempertimbangkan rasa tanggung jawab dan semua hal lain yang menyangkut dirinya untuk mengambil keputusan apakah itu pantas atau tidak untuk menjatuhkan hukuman dengan menjatuhkan hukuman padanya. Jika pengadilan tidak menganggap perlu untuk lulus putusan yang menjatuhkan hukuman, itu harus mengadopsi tindakan pemasyarakatan lain singkat dari hukuman. Jika pengadilan dianggap pantas untuk menjatuhkan hukuman yang menjatuhkan hukuman, itu akan mengurangi skala hukuman yang diberikan untuk pelanggaran seperti itu setengahnya.

Tahun 1952 Pengadilan Remaja Pusat dan Pusat Pengamatan dan Perlindungan didirikan di bawah Pengadilan Remaja dan Pengadilan Remaja Undang-Undang Prosedur tahun 1951, yang kemudian direvisi sebagai Undang-Undang Pengadilan Anak dan Remaja tahun 1991 (B.E 2494). Undang-undang ini menganut prinsip "kepentingan terbaik anak" sehubungan dengan perlindungan anak dan keluarga mereka. Seorang anak yang telah melakukan pelanggaran hukum tidak akan dianggap sebagai pelaku, dengan pertimbangan bahwa dia di bawah umur dan

menjadi korban oleh lingkungan yang rusak dan bahwa kesalahannya tidak berkomitmen karena kedengkian. Anak dapat bertobat dan menyatakan kesediaannya untuk menjalani koreksi dan rehabilitasi di bawah perawatan dan pengawasan orang dewasa¹⁴².

Thailand belum pernah menjatuhkan penjara bagi pelaku anak pengguna narkoba, mereka hanya di berikan perawatan dan di kembalikan saja ke orang tua atau wali mereka dengan pengawasan serta mendapatkan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi remaja¹⁴³. Perawatan dan rehabilitasi untuk kenakalan remaja di Thailand dikelola oleh OPC (*Observation and Protection Center*) ada 2 program pengobatan untuk sebagai berikut¹⁴⁴:

Perawatan non-institusional, yaitu berupa layanan masa percobaan untuk menempatkan pelaku dengan bebas di bawah pengawasan masa percobaan petugas untuk jangka waktu yang ditentukan pengadilan. Masa percobaan biasanya digunakan pada hari pertama pelaku melakukan pelanggaran sifatnya yang relatif kecil. Kondisi berikut ditentukan oleh pengadilan di bawah pengawasan petugas masa percobaan.¹⁴⁵ Melarang anak atau remaja untuk memasuki tempat atau daerah mana pun yang mungkin merusaknya, melarang anak atau remaja meninggalkan kediamannya di malam hari kecuali jika perlu, melarang anak atau remaja untuk bergaul dengan siapa pun yang

¹⁴² *Ibid.*, hlm.131.

¹⁴³ Korakod Narkvichetr, "Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent Juvenile Delinquence In Thailand", *Thai Journal*, hlm. 131.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Duangporn Ukris, "Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series", *International Journal*, No. 59, Hlm. 242.

dianggap tidak diinginkan oleh pengadilan, melarang anak atau remaja untuk melakukan tindakan apa pun yang dapat merusak dia, pesan anak atau remaja itu hadir sendiri dari waktu ke waktu kepetugas pengadilan atau masa percobaan atau social pekerja yang ditugaskan oleh Direktur OPC, pesan anak atau remaja itu mengambil pendidikan atau melanjutkan apa pun pekerjaan besar.

Perlakuan kelembagaan, yaitu berupa tindakan sebagai pengganti sanksi pidana. Lembaga remaja didirikan di OPC dibagi menjadi 3 jenis¹⁴⁶. Sekolah Pelatihan, Sekolah Pelatihan Kejuruan, Pusat Komunitas Terapi.

Tujuan dari sekolah pelatihan remaja adalah untuk memfasilitasi penyesuaian kembali kepada masyarakat dan untuk mempromosikan pertumbuhan yang sehat melalui kehidupan masyarakat yang disiplin, akademik dan pelatihan kejuruan, serta konseling¹⁴⁷. Tiga organisasi utama di Thailand yang berurusan dengan kenakalan remaja yaitu Pengadilan Anak dan Keluarga (*The Juvenile and family court*), Departemen Pengamatan dan Perlindungan Remaja (*The Juvenile Observation and Protection Department*), dan Departemen Masa Percobaan (*The Department of Probation*).

Pengadilan Remaja dan Keluarga (JFC). JFC memiliki yurisdiksi dalam setiap kasus kriminal yang melibatkan anak-anak berusia 10 hingga 14 tahun dan remaja berusia 15 hingga 18 tahun, dan juga menangani tindakan sipil yang melibatkan anak di bawah umur (di

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid., hlm. 260*

bawah 20 tahun) di bawah Sipil dan Kode Komersial. Persidangan di JFC diputuskan oleh dua hakim profesional dan dua hakim awam, di mana setidaknya satu dari empat harus seorang wanita. Banding terhadap putusan atau perintah JFC didengar oleh Pengadilan Banding.

JFC terdiri dari Pengadilan Remaja dan Keluarga Pusat, 10 Remaja Provinsi dan Pengadilan Keluarga, dan 31 Divisi Remaja dan Pengadilan Keluarga di Pengadilan Provinsi. Thailand terbagi dalam ke 76 provinsi oleh karena itu, di provinsi-provinsi di mana JFC atau bagian remaja dan keluarga tidak ada, remaja yang dituduh harus ditangani di pengadilan orang dewasa. JFC berwenang untuk mentransfer serius dan kenakalan remaja dengan kekerasan ke pengadilan pidana atau menempatkan mereka di penjara dewasa tetapi ini hanya terjadi di Indonesia beberapa kasus.

Alasan utama karena pengadilan harus mendengar resolusi Komite Perlindungan Remaja sebelum mereka menggunakan otoritas ini. Selain itu, semua atau sebagian besar otoritas, termasuk pengadilan, mempertimbangkan hal itu mengobati kenakalan di pembuluh darah penjahat dewasa sebenarnya lebih cenderung menyebabkan residivisme dan retensi dalam sistem peradilan anak. Selain itu, tingkat residivisme mereka serta tingkat keparahan mereka pelanggaran tampaknya meningkat setelah mereka dibebaskan dari penjara. Oleh karena itu, sebagian besar atau semua dari anak yang dinyatakan bersalah sebagaimana dituduhkan ditempatkan di bawah tanggung jawab Observasi Remaja dan Departemen Perlindungan, organisasi rehabilitasi

institusional, dan Departemen Masa Percobaan, Organisasi rehabilitasi non-institusional.

Departemen Pengawasan dan Perlindungan Remaja (JOPD). JOPD merupakan lembaga yang menyediakan perawatan, perlindungan, dan pelatihan bagi para pelaku kejahatan remaja di Australia institusi. Mandat dan tanggung jawab departemen termasuk menjaga anak di bawah investigasi dan mereka yang menunggu persidangan di bawah penahanan, menyiapkan laporan penyelidikan sosial, dan mengawasi rumah tahanan dan sekolah pelatihan.

JOPD terdiri dari Divisi Administrasi, yang Pusat Pengamatan dan Perlindungan Bangkok, Pusat Pengamatan dan Perlindungan Provinsi, dan Pusat Pelatihan Remaja. Saat ini ada 76 Pusat Pengamatan dan Perlindungan nasional. Biasanya, baik pelaku yang serius, yang melakukan kekerasan dan yang tidak serius, pelaku yang tidak memiliki kekerasan harus ikut serta program perawatan dasar yang sama.

Pelanggar anak yang melakukan tindakan serius dan kejam akan diklasifikasikan oleh formulir klasifikasi dan akan ditempatkan pada beberapa program yang tepat. Program rehabilitasi dalam OPC dijalankan oleh guru, pekerja sosial, psikiater dan dokter. Program termasuk pendidikan non-formal, instruksi dalam nilai-nilai moral, seni, musik, dan kegiatan olahraga. Perawatan kelembagaan dibagi menjadi

tiga jenis: sekolah pelatihan, sekolah pelatihan kejuruan, dan pusat komunitas terapeutik¹⁴⁸.

Terdapat 17 sekolah pelatihan di seluruh penjuru Thailand. Sejak remaja diterima di sekolah pelatihan untuk "perawatan reformatif" dan masih dalam tahap pembentukan karakter, program pendidikan adalah dilakukan. OPC dan program sekolah bertujuan untuk mengembangkan keterampilan penyesuaian dan keterampilan hidup para tahanan melalui bimbingan rutin, pelatihan kejuruan, pendidikan, pengajaran moral dan agama, dan rekreasi kegiatan. Sementara sebagian besar kegiatan ini membantu menanamkan disiplin khusus, disiplin umum dianjurkan dengan memberikan atau mencabut hadiah dan hak istimewa seperti kunjungan rumah, pra-rilis, partisipasi khusus kegiatan, dll. Perilaku anak yang tinggal di institut dievaluasi dengan cara memastikannya atau penampilannya di sekolah pelatihan dalam hal belajar, pelatihan kejuruan, pekerjaan, penampilan pribadi, bahasa, perilaku, penghormatan terhadap otoritas, perawatan properti, dan kerja sama. Direktur OPC adalah diberdayakan untuk mengirim remaja yang tidak dapat diperbaiki yang merupakan sumber bahaya bagi anak lainnya untuk ditahan di penjara¹⁴⁹.

Thailand tidak menerapkan pidana mati bagi anak pengguna narkoba, mereka hanya dijatuhi pidana berupa rehabilitasi dilembaga khusus dan dikembalikan kepada orang tua/wali yang tinggal bersamanya saat ini. Pemerintah Thailand juga melakukan beberapa

¹⁴⁸ Duangporn Ukris, "Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series", *International Journal*, No. 59, Hlm. 245.

¹⁴⁹ *Ibid.*

upaya khusus bagi anak pengguna narkoba yang telah dipidana, misalnya seperti di awal masa tinggal mereka ditempatkan pada lembaga pengembangan keterampilan sosial, mereka dituntut untuk menjadi pribadi yang baik setelah bebas nantinya¹⁵⁰.

Anak diberi kesempatan untuk kembali ke masyarakat serta menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan masyarakat mereka. Sekolah pelatihan juga menyediakan berbagai program untuk anak, mereka harus memilih kursus yang mereka sukai dan yang mereka miliki keterampilan yang cukup, kecuali anak yang tidak menyelesaikan sekolah wajib yang harus belajar sampai mereka selesai¹⁵¹. Oleh sebab itu, pemenjaraan anak-anak di bawah hukum Thailand berbeda dari orang dewasa. Pengadilan mereka akan dilakukan di Pengadilan Khusus Remaja dan Keluarga, meskipun pengadilan ini tidak ada di setiap provinsi.

Contoh kasus yaitu Seorang anak berusia 17 tahun ditangkap di apartemen yang terletak di Bangkok, saat digeledah apartemennya polisi menemukan pil metamfetamin, kristal met, ekstasi, dan ketamin senilai sekitar 100 juta baht (US \$ 3,12 juta) seluruhnya disita di sebuah gedung apartemen di distrik Lat Phrao Bangkok yang anak itu hanya di masukan ke lembaga rehabilitasi serta mendapatkan pendidikan konseling¹⁵².

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Duangporn Ukris, "Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series", *International Journal*, No. 59, hlm. 237.

¹⁵² Bangkok Post, "Seventeen-year-old caught in Thailand with drugs worth US\$3.12m", <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2149919/seventeen-year-old-caught-thailand-drugs-worth-us312m>, (diakses pada 5 Desember 2019).

B. Perbedaan dan Persamaan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika di Indonesia dan di Thailand

1. Perbedaan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Di Indonesia dan di Thailand

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa dasar hukum pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, dan Thailand mengaturnya didalam Undang Undang Thailand Act B.E 2494 tentang *Juvenile court*. Kedua Undang-Undang tersebut juga memiliki perbedaan dan persamaan.

Perbedaan pertama tentang usia anak yang dapat dipidana menurut Undang-Undang Anak di Indonesia dan Thailand, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (3) berbunyi¹⁵³:

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dipasal tersebut dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, dengan artian anak yang dapat dipidana yaitu anak yang berusia 12 tahun sampai kurang dari 18 tahun. Namun, pidana yang dapat dijatuhkan biasanya hanya berupa peringatan atau rehabilitasi saja, karena mengingat adanya hak-hak yang dimiliki oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang di atur juga dalam Undang-Undang

¹⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Sedangkan untuk pembedaan anak yang usianya diatas 18 tahun tidak lagi digunakannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak namun hanya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena usia tersebut telah dianggap dewasa dan cakap akan hukum dan tidak lagi disebut anak yang berkonflik dengan hukum dan bahkan pidana yang dijatuhkan bisa berupa kurungan penjara bahkan hukuman maksimal pidana mati bagi orang yang menyalahgunakan penggunaan narkotika.

Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak mengatur usia anak yang dapat di pidana yaitu berusia 14 tahun hingga 18 tahun, keduanya memiliki batas minimal usia yang berbeda¹⁵⁴. Pernyataan ini diperkuat atas penjelasan yang ada di pasal 76 dan 77 Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494) berbunyi¹⁵⁵:

76. The United Nations Convention on the Rights of the Child of 1990 defines a "child" as "every human being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier". However, Thailand has a number of rather different definitions of a child as can be seen from the following legislation.

a. Revolutionary Party Announcement No. 294 of 1972 on inappropriate conduct of children defines a child as a

¹⁵⁴ Duangporn Ukris, "Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series", *International Journal*, No. 59, hlm. 237.

¹⁵⁵ Juvenile Court (B.E 2494), https://www.unicef-irc.org/portfolios/documents/446_thailand.htm, (diakses pada 1 Januari 2020).

- person below 18 years of age who has not attained majority through marriage;*
- b. The National Youth Promotion and Coordination Act of 1978, which is the country's key legislation in the promotion and development of youth, defines "youth" as a person who is not over 25 years old. The definition of "youth", therefore, covers that of a "child";*
 - c. The Act Instituting the Juvenile and Family Courts and the Juvenile and Family Procedures of 1991 defines the word "child" as a person over 7 years old but below 14. It also defines the word "youth" as a person who is over 14 years of age, but below the age of 18 years.*
- 77. In addition to these definitions in various laws as stated above, the word "child" has been variously defined as follows:*
- a. The official Thai dictionary as published by the Royal Institute in 1982 defines "child" as a person below the age of 14 years;*
 - b. The Child and Youth Development Plan under the Seventh National Economic and Social Development Plan (1992-1996) divides children into two groups: those aged between 0 and 4 and those between 5 and 14 years of age, primarily for the convenience in addressing each group's particular needs and requirements. Those between 15 and 25 years of age are termed "youth".*

Terjemahan bebas:

76. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak 1990 mendefinisikan "anak" sebagai "setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali di bawah hukum yang berlaku untuk anak, mayoritas dicapai sebelumnya". Namun, Thailand memiliki sejumlah definisi anak yang agak berbeda seperti yang dapat dilihat dari undang-undang berikut.
- Sebuah. Pengumuman Partai Revolusioner No. 294 tahun 1972 tentang perilaku anak yang tidak pantas mendefinisikan seorang anak sebagai orang di bawah 18 tahun yang belum mencapai mayoritas melalui perkawinan;
- b. Undang-Undang Koordinasi dan Promosi Pemuda Nasional tahun 1978, yang merupakan undang-undang utama negara dalam promosi dan pengembangan pemuda, mendefinisikan "pemuda" sebagai orang yang belum berusia lebih dari 25 tahun. Oleh karena itu, definisi "anak muda" mencakup "anak";
 - c. Undang-undang yang Melembagakan Pengadilan Remaja dan Keluarga dan Prosedur Remaja dan

Keluarga tahun 1991 mendefinisikan kata "anak" sebagai orang yang berusia di atas 7 tahun tetapi di bawah 14 tahun. Undang-undang ini juga mendefinisikan kata "pemuda" sebagai orang yang berusia lebih dari 14 tahun. usia, tetapi di bawah usia 18 tahun.

77. Selain definisi-definisi ini dalam berbagai undang-undang seperti yang dinyatakan di atas, kata "anak" telah didefinisikan secara beragam sebagai berikut:

Sebuah. Kamus resmi Thailand yang diterbitkan oleh Royal Institute pada tahun 1982 mendefinisikan "anak" sebagai orang di bawah usia 14 tahun;

b. Rencana Pengembangan Anak dan Remaja di bawah Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Ketujuh (1992-1996) membagi anak-anak menjadi dua kelompok: mereka yang berusia antara 0 dan 4 dan mereka yang berusia antara 5 dan 14 tahun, terutama untuk kenyamanan dalam menangani setiap kelompok. kebutuhan dan persyaratan khusus. Mereka yang berusia antara 15 dan 25 tahun disebut "pemuda".

Penjelasan pasal diatas telah dengan jelas menyatakan bahwa usia minimal anak yang dapat dipidana adalah 14 Tahun sedangkan usia maximal 18 tahun. Hal tersebut yang sangat membedakan dengan batas usia minimum anak yang dapat dipidana di Indonesia, artinya peraturan di Indonesia menetapkan usia anak yang lebih muda 2 tahun dibanding dengan di Thailand, anak pada usia 12 tahun di Indonesia sudah dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatan melawan hukum yang mereka buat sedangkan di Thailand 14 tahun. Kedua negara tersebut menerapkan peraturan mengenai batas usia minimum anak yang dapat di pidana pasti penuh dengan pertimbangan dan latar belakang anak-anak di kedua negara tersebut.

Perbedaan kedua tentang penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pengguna narkoba. Dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak pasal 81 berbunyi¹⁵⁶:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Penjelasan pasal diatas menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa¹⁵⁷. Anak yang dapat di tahan apabila anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan hukuman maksimal adalah 10 tahun. Pidana penjara 10 tahun dapat dijatuhkan terhadap anak yang sebelumnya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Pidana mati dan penjara seumur hidup tidak bisa dijatuhi karena mengingat statusnya yang masih anak dan anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi haknya oleh negara.

¹⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁵⁷ Indira Hapsari dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak", *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol.5, No.3, 2016, hlm. 5.

Berbeda dengan Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak, anak yang berusia antara 7 dan 17 tahun masih belum dapat dihukum dan dalam masa percobaan, Mereka yang berusia di atas 17 tetapi belum berusia 20 tahun (18 tahun) hukumannya di kurangi setengah atau sepertiga dari hukuman yang di dakwakan¹⁵⁸. Hal ini ditertuang dalam pasal 82-88 dan 109 Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494) berbunyi¹⁵⁹:

82. *The lowest age at which a person can be convicted of a criminal charge in Thailand under the country's Penal Code is given in chapter 4 on Criminal Responsibility, section 73: "A child below 7 years of age, who commits a criminal offence, is not liable to punishment". This means that criminal responsibility begins when the child is older than 7 years old. Although this child cannot be punished until he is over 14 years of age, the court is empowered to proceed as follows:*

- a. *The court may admonish the child before releasing him or her. If appropriate, the court may also admonish the child's parents, legal guardian or those with whom he or she is living;*
- b. *If the court considers that the child's parents can take care of him or her, the court may order the child to be consigned to the care of the parents, on condition that the parents ensure that the child does not commit another offence for a certain court-decreed period of time, which must not be more than three years. The court may also impose a monetary fine of not more than 1,000 baht which the child's parents must pay each time the child commits a repeat offence. If the child is not living with his parents or legal guardian and the court considers that the child's parents or legal guardian should not be summoned as in the preceding case, the court will summon the persons with whom the child is living for questioning whether they will accept similar conditions to those in the preceding case. If they accept, the court will issue an order*

¹⁵⁸ Initial reports of States parties due in 1994: Thailand, UN Doc. CRC/C/11/Add.13, paras.

¹⁵⁹ Juvenile Court (B.E 2494), https://www.unicef-irc.org/portfolios/documents/446_thailand.htm, (diakses pada 1 Januari 2020).

- releasing the child into their care under similar conditions;*
- c. In the case that the court consigns the child to the custody of the parents, legal guardian or those with whom the child is staying, the court will impose safeguards to control the child's behaviour. For instance, the court may appoint a probation officer or another official to oversee the child's behaviour;*
 - d. If the child has no parents or legal guardians, or the court judges them incompetent, or the persons with whom the child lives do not accept the stipulated conditions, the court may order the child released into the care of an individual or organization deemed appropriate by the court. They will have the obligation to care for the child for a court-decided period, subject to the agreement of that person or organization. In this instance, the individual or organization will have powers akin to legal guardians only for care and instruction purposes. This also includes obligations to provide accommodation and appropriate employment for the child; or*
 - e. The child may be sent to a school or a training school or any other institution which has been set up for the training and rearing of children for a court-decided period, which must not last beyond the date when the child reaches 18 years of age.*
- 83. Regarding court orders in (b), (c), (d) and (e), if, during the stipulated period, the court learns, whether of its own accord, or from reports submitted by interested parties, prosecutors or the person or organization to whom the court has given custody of the child or an official, that the child's behaviour has changed, the court has the authority under the Penal Code to amend its order or issue another order.*
- 84. Furthermore, when a child who is older than 14 but younger than 17 commits a criminal offence the court may consider the child's sense of responsibility and other attributes before deciding whether he or she deserves punishment. If the court decides against punishment, it may proceed according to the five measures described above. If the court decides to punish the child, it should reduce the punishment by one half.*
- 85. For an offender who is over the age of 17 years but not over 24 years, the court may reduce the punishment by one third or one half.*

86. *From these provisions of the Thai Penal Code concerning a child's criminal liability, it can be seen that Thai legislation gives much importance to the age of the offender. The court considers details of each case in favour of children and youth while passing judgement according to each age group.*
87. *The Penal Code applies sanctions against those who commit an offence, those who employ others to commit an offence and those who abet the offender. Today, more and more children are used as criminal tools partially because of the lenient sentencing of child offenders. The law does call for the court to use its discretion in sentencing the offending child, but a loophole exists in that those who made the child commit the crime will receive only one third of the punishment.*
88. *All things considered, the age criteria in Thai legislation may need to be adjusted to be in line with the age criteria put forward in the Convention on the Rights of the Child. The law should aim for more prevention of problems and assistance of families in need to prevent family disintegration and children in difficulties.*
109. *Thai law has clearly stated that all children aged below the age of 7 years cannot be legally punished. Those between 7 and 14 still cannot be punished, but the court may impose behavioural control through probation. For children older than 14 but younger than 17, the court may choose either to put them on probation or reduce the punishment by one half. Those over 17 but not yet 20 years old will face a sentence reduced either by one half or one third.*

Terjemahan Bebas:

82. Usia terendah di mana seseorang dapat dihukum karena tuntutan pidana di Thailand berdasarkan KUHP negara tersebut diberikan dalam bab 4 tentang Tanggung Jawab Pidana, bagian 73: "Seorang anak di bawah usia 7 tahun, yang melakukan pelanggaran pidana, tidak bertanggung jawab atas hukuman ". Ini berarti bahwa tanggung jawab pidana dimulai ketika anak berusia lebih dari 7 tahun. Meskipun anak ini tidak dapat dihukum sampai ia berusia di atas 14 tahun, pengadilan diberi wewenang untuk melanjutkan sebagai berikut:

Sebuah. Pengadilan dapat menegur anak tersebut sebelum membebaskannya. Jika sesuai, pengadilan juga dapat memperingatkan orang tua anak, wali sah atau orang-orang yang tinggal bersamanya;

- b. Jika pengadilan menganggap bahwa orang tua anak dapat merawatnya, pengadilan dapat memerintahkan anak tersebut untuk diasingkan ke pengasuhan orang tua, dengan syarat bahwa orang tua memastikan bahwa anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lain untuk pengadilan tertentu - Periode waktu yang ditentukan, yang tidak boleh lebih dari tiga tahun. Pengadilan juga dapat mengenakan denda moneter tidak lebih dari 1.000 baht yang harus dibayar oleh orang tua setiap kali anak tersebut melakukan pelanggaran berulang. Jika anak tidak tinggal bersama orang tuanya atau wali sah dan pengadilan menganggap bahwa orang tua atau wali sah anak tersebut tidak boleh dipanggil seperti dalam kasus sebelumnya, pengadilan akan memanggil orang-orang yang tinggal dengan anak itu untuk ditanyai apakah mereka mau menerima kondisi yang serupa dengan yang ada dalam kasus sebelumnya. Jika mereka menerima, pengadilan akan mengeluarkan perintah untuk melepaskan anak ke pengasuhan mereka dalam kondisi yang sama;
- c. Dalam hal pengadilan menyerahkan anak ke tahanan orang tua, wali sah atau mereka yang tinggal dengan anak tersebut, pengadilan akan memberlakukan perlindungan untuk mengendalikan perilaku anak. Misalnya, pengadilan dapat menunjuk petugas percobaan atau pejabat lain untuk mengawasi perilaku anak;
- d. Jika anak tidak memiliki orang tua atau wali yang sah, atau pengadilan menilai mereka tidak kompeten, atau orang yang tinggal dengan anak tersebut tidak menerima ketentuan yang ditentukan, pengadilan dapat memerintahkan anak tersebut dilepaskan ke pengasuhan individu atau organisasi yang dianggap sesuai oleh pengadilan. Mereka akan memiliki kewajiban untuk merawat anak selama periode yang ditentukan pengadilan, tergantung pada persetujuan orang atau organisasi tersebut. Dalam hal ini, individu atau organisasi akan memiliki kekuatan yang serupa dengan wali hukum hanya untuk tujuan perawatan dan instruksi. Ini juga termasuk kewajiban untuk menyediakan akomodasi dan pekerjaan yang sesuai untuk anak; atau
- e. Anak tersebut dapat dikirim ke sekolah atau sekolah pelatihan atau lembaga lain yang telah ditetapkan untuk pelatihan dan membesarkan anak-anak untuk periode

yang ditentukan pengadilan, yang tidak boleh bertahan melebihi tanggal ketika anak mencapai usia 18 tahun.

83. Mengenai perintah pengadilan dalam (b), (c), (d) dan (e), jika, selama periode yang ditentukan, pengadilan belajar, apakah atas kemauannya sendiri, atau dari laporan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, jaksa penuntut atau orang atau organisasi kepada siapa pengadilan telah memberikan hak asuh terhadap anak atau pejabat, bahwa perilaku anak telah berubah, pengadilan memiliki wewenang berdasarkan KUHP untuk mengubah perintahnya atau mengeluarkan perintah lain.
84. Selanjutnya, ketika seorang anak yang lebih tua dari 14 tetapi lebih muda dari 17 melakukan tindak pidana pengadilan dapat mempertimbangkan rasa tanggung jawab anak dan atribut lainnya sebelum memutuskan apakah ia pantas dihukum. Jika pengadilan memutuskan menentang hukuman, pengadilan dapat melanjutkan sesuai dengan lima langkah yang dijelaskan di atas. Jika pengadilan memutuskan untuk menghukum anak itu, hukuman itu harus dikurangi setengahnya.
85. Untuk pelaku yang berusia di atas 17 tahun tetapi tidak lebih dari 24 tahun, pengadilan dapat mengurangi hukuman dengan sepertiga atau satu setengah.
86. Dari ketentuan-ketentuan KUHP Thailand ini mengenai pertanggungjawaban pidana anak, dapat dilihat bahwa undang-undang Thailand memberi arti penting bagi usia pelaku. Pengadilan mempertimbangkan perincian dari setiap kasus yang mendukung anak-anak dan remaja sambil memberikan putusan sesuai dengan masing-masing kelompok umur.
87. KUHP menerapkan sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran, mereka yang mempekerjakan orang lain untuk melakukan pelanggaran dan mereka yang menghasut pelaku. Saat ini, semakin banyak anak digunakan sebagai alat kriminal sebagian karena hukuman yang ringan dari pelanggar anak. Undang-undang memang menyerukan pengadilan untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam menghukum anak yang bersalah, tetapi ada celah di mana mereka yang membuat anak itu melakukan kejahatan hanya akan menerima sepertiga dari hukuman.

88. Semua hal dipertimbangkan, kriteria umur dalam undang-undang Thailand mungkin perlu disesuaikan agar sejalan dengan kriteria umur yang diajukan dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Undang-undang harus bertujuan untuk lebih banyak pencegahan masalah dan bantuan keluarga yang membutuhkan untuk mencegah disintegrasi keluarga dan anak-anak dalam kesulitan.
109. Undang-undang Thailand dengan jelas menyatakan bahwa semua anak berusia di bawah 7 tahun tidak dapat dihukum secara hukum. Mereka yang berusia antara 7 dan 14 tahun masih belum dapat dihukum, tetapi pengadilan dapat memaksakan kontrol perilaku melalui masa percobaan. Untuk anak-anak yang lebih tua dari 14 tetapi lebih muda dari 17, pengadilan dapat memilih untuk membiarkan mereka dalam masa percobaan atau mengurangi hukuman hingga setengahnya. Mereka yang berusia di atas 17 tetapi belum berusia 20 tahun akan menghadapi hukuman dikurangi setengah atau sepertiga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak hanya menyebutkan bahwa anak hanya dapat dipidana setengah dari hukuman orang dewasa sangat berbeda dengan di Thailand, bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana disana hukumannya dikurangi setengah bahkan hanya sepertiga dari hukuman orang dewasa, namun pernyataan mengenai pidana penjara di Thailand hanya di jatuhkan terhadap anak yang usianya 17-18 tahun (belum berusia 20 tahun). Hukuman ini bisa biasanya berupa rehabilitasi dibawah kelembagaan yang ada di Thailand.

Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pengguna narkoba. Indonesia mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak di pasal 71

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak berbunyi¹⁶⁰:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang tersebut mengklasifikasi jenis pidana, yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak pengguna narkoba¹⁶¹. Sedangkan undang Undang Thailand tentang Pengadilan Anak tidak mengatur mengenai pembaguan jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak seperti yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Isi dari Undang-Undang pengadilan anak Thailand tersebut langsung menjelaskan proses pemidannya saja., yang dimulai dari proses penangkapan, investigasi, penahanan dan pelepasan sementara

¹⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

¹⁶¹ Indira Hapsari dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak", *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol.5, No.3, 2016, hlm. 6.

bersyarat, penuntutan pidana, pengadilan, adjudikasi¹⁶². Hal tersebut dikarenakan Hakim yang akan menentukan pidana seperti apa yang dapat dijatuhkan terhadap anak pengguna narkoba, biasanya Hakim di Thailand hanya menjatuhkan dua jenis pidana terhadap anak pengguna narkoba, yaitu bebas bersyarat yang dikembalikan kepada orang tua dan biasanya harus membayarkan sejumlah denda dan penahanan di lembaga rehabilitasi anak.

Perbedaan selanjutnya ada pada proses penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan pidana. Pasal 6 ayat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menjelaskan tentang upaya Diversi sebelum masuk kepada proses persidangan, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari¹⁶³. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak tidak mengatur tentang Diversi namun di dalam Undang-Undang tersebut mengatur proses Pra-Ajudikasi dan Ajudikasi.

¹⁶² Korakod Narkvichetr, "Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent Juvenile Delinquency In Thailand", *Thai Journal*, hlm. 131.

¹⁶³ Fredyan Priambodo, Ida Ayu Sukihana, "Pidana dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Hukum Pidana*, Universitas Udayana, hlm.3.

Pernyataan tersebut diperkuat dalam *Juvenile Court* (B.E 2494)

tentang proses pembedaan, berbunyi¹⁶⁴:

Pre-adjudication process

Under the criminal procedure code any injured person may file a complaint to the police against a child or young person. When a child or young person is alleged to have committed an act against the law, this case shall be commenced and investigated by an inquiry police officer, as required by ordinary criminal cases but the handling of a juvenile offender is more informal and lenient. A competent inquiry police officer, who is assigned to a case, has the power to conduct an investigation within his territorial jurisdiction:

- *where an offence has actually been committed,*
- *is alleged or believed to have been committed; and*
- *the offender is residing or has been arrested within his territorial jurisdiction.*

Adjudication

After the trial is completed, prior to a judgment or an order being given, the court will hear the report and opinion of the Director of the OPC, including his recommendation for measures to be taken.

Terjemahan Bebas:

Proses pra-ajudikasi

Di bawah kode prosedur kriminal, setiap orang yang terluka dapat mengajukan keluhan kepada polisi terhadap seorang anak atau orang muda. Ketika seorang anak atau orang muda dituduh telah melakukan suatu tindakan melawan hukum, kasus ini harus dimulai dan diselidiki oleh petugas polisi penyelidikan, seperti yang disyaratkan oleh kasus-kasus kriminal biasa tetapi menyerahkan seorang pelaku remaja lebih informal dan ringan. Petugas polisi penyelidikan yang kompeten, yang ditugaskan untuk menangani suatu kasus, memiliki kekuatan untuk melakukan penyelidikan di dalam yurisdiksi teritorialnya:

- *di mana pelanggaran sebenarnya telah dilakukan,*
- *diduga atau diyakini telah dilakukan; dan*
- *pelaku sedang berada atau telah berada dalam yurisdiksi teritorialnya.*

Pengadilan

¹⁶⁴ *Juvenile Court* (B.E 2494), https://www.unicef-irc.org/portfolios/documents/446_thailand.htm, (diakses pada 1 Januari 2020).

Setelah persidangan selesai, sebelum putusan atau perintah diberikan, pengadilan akan mendengarkan laporan dan pendapat Direktur OPC, termasuk rekomendasinya untuk langkah-langkah yang harus diambil.

Proses Pra-Ajudikasi dilakukan sebelum proses Ajudikasi.

Proses Pra-Ajudikasi merupakan proses penyelidikan, sama seperti yang dipersyaratkan oleh kasus pidana biasa tapi penyerahan pelaku anak adalah lebih informal dan ringan, kemudian dilanjutkan dengan proses Ajudikasi dimana Prosesnya sama dengan proses Diversi¹⁶⁵. Namun, di Indonesia sendiri tidak ada proses seperti Pra-Ajudikasi dalam kasus tindak pidana yang tergolong ringan¹⁶⁶. Hal tersebut menjadikan perbedaan dalam proses pemidanaan yang ada di Indonesia dengan di Thailand, jika di pahami lebih rinci, proses pemidanaan anak di Thailand lebih kompleks dibandingkan dengan di Indonesia.

Perbedaan selanjutnya yaitu tentang jenis pidana terhadap anak di Indonesia, pidana penjara masih merupakan jenis pidana pokok yang dikenakan juga kepada anak. Permasalahan utama bukan pada jenis ataupun bobot pidana penjara, melainkan tidak adanya aturan yang menjadi pedoman bagi Hakim untuk melaksanakan sanksi pidana bagi anak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak juga tidak diatur mengenai kewenangan Hakim untuk tidak meneruskan

¹⁶⁵ Duangporn Ukris, "Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series", *International Journal*, No. 59, hlm. 235.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 236.

atau menghentikan proses pemeriksaan¹⁶⁷. Hal tersebut dapat menjadikan Hakim dengan seenaknya menjatuhkan pidana terhadap anak pengguna narkoba di Indonesia oleh sebab itu proses pemidanaan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak mengatur tentang proses pemidanaan anak, didalam proses tersebut juga menjelaskan tentang peran hakim yang dapat mengambil keputusan yaitu tentang pembebasan bersyarat dengan jaminan yaitu pengembalian ke orang tua¹⁶⁸. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dianggap sebagai kenakalan remaja di Thailand, dan rata-rata merupakan tindak pidana ringan yang biasanya hanya dipidana berupa pengembalian kepada orang tua yang disertai dengan pembayaran sejumlah denda yang telah diatur dalam Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494).

Perbedaan selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversi hanya dijalani oleh anak yang dijatuhkan hukuman tidak lebih dari tujuh tahun dan masih berusia dibawah 18 tahun serta tindak pidana termasuk kedalam tindak pidana ringan¹⁶⁹. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-

¹⁶⁷ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Indonesia, hlm. 25.

¹⁶⁸ Duangporn Ukris, "Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series", *International Journal*, No. 59, hlm. 235.

¹⁶⁹ Supramono, Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Penerbit Djambatan, hlm. 33.

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak tidak menjelaskan tentang maksimal lamanya hukuman yang di jatuhkan terhadap anak pengguna narkoba, yang artinya setiap anak yang berurusan dengan hukum dan di adili di pengadilan khusus remaja pasti akan menjalani proses adjudikasi¹⁷⁰.

Proses rehabilitasi bagi anak pecandu narkoba di Indonesia hanya terdapat satu lembaga teratas yang menangani masalah khusus narkoba yaitu BNN-KPAI, pada tahun 2015 terjadi penandatanganan antara BNN dengan KPI yang membahas tentang pemidanaan yang tepat bagi anak penyalahguna narkoba, menyatakan bahwa anak pecandu narkoba sebaiknya direhabilitasi saja dan tidak perlu dipenjara karena hal tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang anak di masa depan¹⁷¹. Sedangkan Thailand terdapat tiga lembaga utama untuk merehabilitasi para anak

¹⁷⁰ Korakod Narkvichetr, "Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent Juvenile Delinquency In Thailand", *Thai Journal*, hlm. 131.

¹⁷¹ David Setyawan, "KPAI : 'Anak pengguna narkoba harus direhabilitasi bukan dipenjara'", <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-pengguna-narkoba-harus-direhabilitasi-bukan-dipenjara>, (diakses pada 24 Desember 2019).

penyalahguna narkoba, tiga lembaga tersebut yaitu Anak dan Keluarga (*The Juvenile and family court*), Departemen Pengamatan dan Perlindungan Remaja (*The Juvenile Observation and Protection Department*), dan Departemen Masa Percobaan (*The Department of Probation*)¹⁷². Tiga lembaga tersebut mempunyai perannya masing-masing dalam menangani perehabilitasian anak-anak penyalahguna narkoba misalnya pengajaran yang dilakukan melalui sekolah kejuruan sesuai dengan divisi yang telah dibagi sesuai ketiga lembaga tersebut. Berikut tabel perbedaannya.

Perbedaan	Indonesia	Thailand
Usia Anak	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (3) anak yang dapat dipidana yaitu anak yang berusia 12 tahun sampai kurang dari 18 tahun. Untuk pemidanaan anak yang usianya diatas 18 tahun menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Menurut pasal 76 dan 77 Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494), usia minimal anak yang dapat dipidana adalah 14 Tahun sedangkan usia maximal 18 tahun.
Penjatuan pidana penjara terhadap anak sebagai pengguna narkoba.	Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81, pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.	Dalam pasal 82-88 dan 109 Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494), anak yang berusia antara 7 dan 17 tahun masih belum dapat dihukum dan dalam masa percobaan, Mereka yang berusia di atas 17 tetapi belum berusia 20 tahun (18 tahun) hukumannya di

¹⁷² Korakod Narkvichetr, "Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent Juvenile Delinquence In Thailand", *Thai Journal*, hlm. 133.

		kurangi setengah atau sepertiga dari hukuman yang di dakwakan.
Jenis pidana yang dijatuhkan.	Di pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, jenis pidananya yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak pengguna narkoba jenis pidana.	Undang Undang Thailand tentang Pengadilan Anak tidak mengatur mengenai pembaguan jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak.
Proses penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan pidana.	Pada Pasal 6 menjelaskan tentang upaya Diversi sebelum masuk kepada proses persidangan, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.	Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak tidak mengatur tentang Diversi namun di dalam Undang-Undang tersebut mengatur proses Pra-Ajudikasi dan Ajudikasi.
Lamanya pemidanaan.	Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversi hanya dijalani oleh anak yang dijatuhi hukuman tidak lebih dari tujuh tahun dan masih berusia dibawah 18 tahun serta tindak pidana termasuk kedalam tindak pidana ringan.	Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak tidak menjelaskan tentang maksimal lamanya hukuman yang di jatuhi terhadap anak pengguna narkoba.
Lembaga rehabilitasi untuk Anak pengguna Narkotika.	Hanya terdapat satu lembaga teratas yang menangani masalah khusus narkoba yaitu BNN-KPAI.	Terdapat tiga lembaga utama yaitu Anak dan Keluarga (<i>The Juvenile and family cout</i>), Departemen Pengamatan dan Perlindungan Remaja (<i>The Juvenile Observation and Protection Department</i>), dan Departemen Masa Percobaan (<i>The Department of Probation</i>).

2. Persamaan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Indonesia dan di Thailand

Berdasarkan perbedaan yang telah di uraikan di atas, maka penulis juga menganalisis tentang persamaan penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa undang-undang tersebut berlaku bagi terdakwa anak yang maksimal berusia 18 tahun, terdakwa anak juga dipidana berdasarkan aturan pidana yang berlaku di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak¹⁷³. Pernyataan ini tertuang di Bab 1 Pasal 1 Ayat (3), berbunyi¹⁷⁴:

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Apabila usianya diatas 18 tahun saat melakukan tindak pidana, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan penjatuhan hukumannya disamakan dengan orang dewasa. Tidak hanya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak saja bahwa usia 18 tahun adalah usia maksimal anak yang dapat di pidana menggunakan undang-undang khusus anak, di Thailand pun demikian. Berdasarkan Undang-

¹⁷³ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* . Ghalia Indonesia . Jakarta: 2005, hlm 17.

¹⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak

Undang Peradilan Anak Thailand (*Juvenile Court*) menyatakan bahwa batas maksimal usia anak yang dapat dipidana adalah 18 tahun¹⁷⁵. Pernyataan ini diperkuat atas penjelasan yang ada di pasal 76 dan 77 Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494), berbunyi¹⁷⁶:

76. *The United Nations Convention on the Rights of the Child of 1990 defines a "child" as "every human being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier". However, Thailand has a number of rather different definitions of a child as can be seen from the following legislation.*
 - d. *Revolutionary Party Announcement No. 294 of 1972 on inappropriate conduct of children defines a child as a person below 18 years of age who has not attained majority through marriage;*
 - e. *The National Youth Promotion and Coordination Act of 1978, which is the country's key legislation in the promotion and development of youth, defines "youth" as a person who is not over 25 years old. The definition of "youth", therefore, covers that of a "child";*
 - f. *The Act Instituting the Juvenile and Family Courts and the Juvenile and Family Procedures of 1991 defines the word "child" as a person over 7 years old but below 14. It also defines the word "youth" as a person who is over 14 years of age, but below the age of 18 years.*
77. *In addition to these definitions in various laws as stated above, the word "child" has been variously defined as follows:*
 - c. *The official Thai dictionary as published by the Royal Institute in 1982 defines "child" as a person below the age of 14 years;*
 - d. *The Child and Youth Development Plan under the Seventh National Economic and Social Development Plan (1992-1996) divides children into two groups: those aged between 0 and 4 and those between 5 and*

¹⁷⁵ Duangporn Ukris, "Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series", *International Journal*, No. 59, hlm. 237.

¹⁷⁶ Juvenile Court (B.E 2494), https://www.unicef-irc.org/portfolios/documents/446_thailand.htm, (diakses pada 1 Januari 2020).

14 years of age, primarily for the convenience in addressing each group's particular needs and requirements. Those between 15 and 25 years of age are termed "youth".

Terjemahan bebas:

76. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak 1990 mendefinisikan "anak" sebagai "setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali di bawah hukum yang berlaku untuk anak, mayoritas dicapai sebelumnya". Namun, Thailand memiliki sejumlah definisi anak yang agak berbeda seperti yang dapat dilihat dari undang-undang berikut.
 - a. Sebuah. Pengumuman Partai Revolusioner No. 294 tahun 1972 tentang perilaku anak yang tidak pantas mendefinisikan seorang anak sebagai orang di bawah 18 tahun yang belum mencapai mayoritas melalui perkawinan;
 - b. Undang-Undang Koordinasi dan Promosi Pemuda Nasional tahun 1978, yang merupakan undang-undang utama negara dalam promosi dan pengembangan pemuda, mendefinisikan "pemuda" sebagai orang yang belum berusia lebih dari 25 tahun. Oleh karena itu, definisi "anak muda" mencakup "anak";
 - c. Undang-undang yang Melembagakan Pengadilan Remaja dan Keluarga dan Prosedur Remaja dan Keluarga tahun 1991 mendefinisikan kata "anak" sebagai orang yang berusia di atas 7 tahun tetapi di bawah 14 tahun. Undang-undang ini juga mendefinisikan kata "pemuda" sebagai orang yang berusia lebih dari 14 tahun. usia, tetapi di bawah usia 18 tahun.
77. Selain definisi-definisi ini dalam berbagai undang-undang seperti yang dinyatakan di atas, kata "anak" telah didefinisikan secara beragam sebagai berikut:
 - a. Sebuah. Kamus resmi Thailand yang diterbitkan oleh Royal Institute pada tahun 1982 mendefinisikan "anak" sebagai orang di bawah usia 14 tahun;
 - b. Rencana Pengembangan Anak dan Remaja di bawah Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Ketujuh (1992-1996) membagi anak-anak menjadi dua kelompok: mereka yang berusia antara 0 dan 4 dan mereka yang berusia antara 5 dan 14 tahun, terutama untuk kenyamanan dalam menangani setiap kelompok. kebutuhan dan persyaratan khusus. Mereka yang berusia antara 15 dan 25 tahun disebut "pemuda".

Kedua Negara tersebut sama sama sama menyatakan batas usia maximal anak yang dapat dipidana menurut Undang-Undang anak yaitu berusia 18 tahun, karena usia yang dianggap dewasa yaitu apabila sudah diatas 20 tahun (21 tahun) dan di usia tersebut dianggap orang tersebut sudah cakap hukum, secara psikologis juga dinilai usia tersebut merupakan usia kematangan secara emosional, oleh sebab itu apa yang dilakukan tersebut secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri kecuali orang tersebut memiliki gangguan terhadap jiwanya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494) sama-sama menyatakan khusus untuk perkara anak bahwa sidang yang dilakukan secara tertutup dan petugasnya (Hakim dan Jaksa) tidak memakai toga seperti biasanya, dan pejabat yang bertugas dalam mengadili merupakan khusus dibidang Anak, misalnya seperti Hakim Anak¹⁷⁷. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan. Apabila persidangan anak tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang di khawatirkan akan menimbulkan trauma terhadap anak.

Dasar hukum pernyataan diatas sesuai dengan Bab III tentang Acara Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak pasal 16-62,

¹⁷⁷ Fredyan Priambodo, Ida Ayu Sukihana, "Pidana dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Hukum Pidana*, Universitas Udayana, hlm.3.

karena dalam Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, selain itu Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Dasar hukum di Thailand berdasarkan pernyataan diatas ada di dalam pasal 390-393 Undang-Undang Thailand tentang Pengandilan Anak (B.E 2494), berbunyi¹⁷⁸:

390. *Thailand has special judicial proceedings for children and youth as is evident from the adoption of the Act Instituting the Juvenile and Family Courts and the Juvenile and Family Procedures of 1991. This Act covers children and youths charged with criminal offences who numbered 8,948 in 1992, of whom 1,102 were convicted, with the intention of protecting, encouraging and helping children and youths via rehabilitation and reintegration rather than punishment.*

391. *This law stipulates that when a criminal offence is committed by a child or youth, he or she will be arrested by government officials who have the authority to detain him or her for a maximum of 24 hours for the sole purpose of interrogation. The child or youth must not be confined with adults nor in cells intended for adults, as part of the child rights protection measures. After the statutory time has passed, the officials must send the child to an Observation and Protection Centre where the child or youth will be cleaned, treated for illness and*

¹⁷⁸ Juvenile Court (B.E 2494), https://www.unicef-irc.org/portfolios/documents/446_thailand.htm, (diakses pada 1 Januari 2020).

- compelled to follow the rules of the Centre which today holds an increasing number of children.*
392. *At the Juvenile and Family Court, where the child is formally charged, the court will not strictly follow regular criminal court proceedings. It is forbidden to confine the child at this stage with handcuffs or fetters and chains. This is because it is considered that cases involving children and youths are sensitive and complex. The proceedings must take place in camera and the sentence must be passed by a judge, joined by an associate judge who is especially knowledgeable in child and youth affairs. If the child or youth is considered guilty as charged, the court can issue a temporary order or measure to deal with him or her.*
393. *According to criminal court proceedings, the court cannot condemn a child to life imprisonment. However, the child may be punished physically while being detained in an Observation and Protection Centre. This can happen when the child or youth breaks the rules and regulations of the Centre. Punishment varies from a maximum of 12 strokes of the cane, or being deprived of certain privileges and services.*

Terjemahan bebas:

390. Thailand memiliki proses peradilan khusus untuk anak-anak dan remaja sebagaimana terbukti dari adopsi Undang-Undang yang Melembagakan Pengadilan Remaja dan Keluarga dan Prosedur Remaja dan Keluarga tahun 1991. Undang-undang ini mencakup anak-anak dan remaja yang didakwa dengan pelanggaran pidana yang berjumlah 8.948 pada tahun 1992 , di antaranya 1.102 dihukum, dengan tujuan melindungi, mendorong dan membantu anak-anak dan remaja melalui rehabilitasi dan reintegrasi daripada hukuman.
391. Undang-undang ini menetapkan bahwa ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang anak atau remaja, ia akan ditangkap oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang untuk menahannya selama maksimum 24 jam untuk tujuan interogasi semata-mata. Anak atau remaja tidak boleh dikurung dengan orang dewasa atau dalam sel yang ditujukan untuk orang dewasa, sebagai bagian dari langkah-langkah perlindungan hak anak. Setelah waktu resmi berlalu, para pejabat harus mengirim anak ke Pusat

Pengamatan dan Perlindungan tempat anak atau remaja akan dibersihkan, dirawat karena sakit dan dipaksa untuk mengikuti aturan Pusat yang saat ini menampung semakin banyak anak.

392. Di Pengadilan Remaja dan Keluarga, di mana anak tersebut secara resmi didakwa, pengadilan tidak akan secara ketat mengikuti proses pengadilan pidana biasa. Dilarang membatasi anak pada tahap ini dengan borgol atau belenggu dan rantai. Ini karena dianggap bahwa kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan remaja adalah sensitif dan kompleks. Prosesnya harus dilakukan di depan kamera dan hukumannya harus dijatuhkan oleh hakim, bergabung dengan hakim asosiasi yang sangat berpengetahuan luas dalam urusan anak dan remaja. Jika anak atau remaja tersebut dianggap bersalah sebagaimana didakwa, pengadilan dapat mengeluarkan perintah sementara atau tindakan untuk menanganinya.
393. Menurut proses peradilan pidana, pengadilan tidak dapat menghukum seorang anak seumur hidup. Namun, anak tersebut dapat dihukum secara fisik saat ditahan di Pusat Observasi dan Perlindungan. Ini dapat terjadi ketika anak atau remaja melanggar peraturan dan ketentuan Pusat. Hukuman bervariasi dari maksimal 12 pukulan tebu, atau kehilangan hak istimewa dan layanan tertentu.

Persamaan lainnya yaitu ada di putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak ada di pasal 71 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi¹⁷⁹:

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

¹⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penjatuhan pidana menurut Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak ada di pasal 82, berbunyi¹⁸⁰:

82. *The lowest age at which a person can be convicted of a criminal charge in Thailand under the country's Penal Code is given in chapter 4 on Criminal Responsibility, section 73: "A child below 7 years of age, who commits a criminal offence, is not liable to punishment". This means that criminal responsibility begins when the child is older than 7 years old. Although this child cannot be punished until he is over 14 years of age, the court is empowered to proceed as follows:*
- a. *The court may admonish the child before releasing him or her. If appropriate, the court may also admonish the child's parents, legal guardian or those with whom he or she is living;*
 - b. *If the court considers that the child's parents can take care of him or her, the court may order the child to be consigned to the care of the parents, on condition that the parents ensure that the child does not commit another offence for a certain court-decreed period of time, which must not be more than three years. The court may also impose a monetary fine of not more than 1,000 baht which the child's parents must pay each time the child commits a repeat offence. If the child is not living with his parents or legal guardian and the court considers that the child's parents or legal guardian should not be summoned as in the preceding case, the court will summon the persons with whom the child is living for questioning whether they will accept similar conditions to those in the preceding case. If they accept, the court will issue an order releasing the child into their care under similar conditions;*

¹⁸⁰ Korakod Narkvichetr, "Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent Juvenile Delinquency In Thailand", *Thai Journal*, hlm. 132.

- c. *In the case that the court consigns the child to the custody of the parents, legal guardian or those with whom the child is staying, the court will impose safeguards to control the child's behaviour. For instance, the court may appoint a probation officer or another official to oversee the child's behaviour;*
- d. *If the child has no parents or legal guardians, or the court judges them incompetent, or the persons with whom the child lives do not accept the stipulated conditions, the court may order the child released into the care of an individual or organization deemed appropriate by the court. They will have the obligation to care for the child for a court-decided period, subject to the agreement of that person or organization. In this instance, the individual or organization will have powers akin to legal guardians only for care and instruction purposes. This also includes obligations to provide accommodation and appropriate employment for the child; or*
- e. *The child may be sent to a school or a training school or any other institution which has been set up for the training and rearing of children for a court-decided period, which must not last beyond the date when the child reaches 18 years of age.*

Terjemahan bebas:

82. Usia terendah di mana seseorang dapat dihukum karena tuntutan pidana di Thailand berdasarkan KUHP negara tersebut diberikan dalam bab 4 tentang Tanggung Jawab Pidana, bagian 73: "Seorang anak di bawah usia 7 tahun, yang melakukan pelanggaran pidana, tidak bertanggung jawab atas hukuman ". Ini berarti bahwa tanggung jawab pidana dimulai ketika anak berusia lebih dari 7 tahun. Meskipun anak ini tidak dapat dihukum sampai ia berusia di atas 14 tahun, pengadilan diberi wewenang untuk melanjutkan sebagai berikut:
- a. Sebuah. Pengadilan dapat menegur anak tersebut sebelum membebaskannya. Jika sesuai, pengadilan juga dapat memperingatkan orang tua anak, wali sah atau orang-orang yang tinggal bersamanya;
 - b. Jika pengadilan menganggap bahwa orang tua anak dapat merawatnya, pengadilan dapat memerintahkan anak tersebut untuk diasingkan ke pengasuhan orang tua, dengan syarat bahwa orang tua memastikan bahwa anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lain untuk pengadilan tertentu - Periode waktu yang ditentukan, yang tidak boleh lebih dari tiga tahun.

Pengadilan juga dapat mengenakan denda moneter tidak lebih dari 1.000 baht yang harus dibayar oleh orang tua setiap kali anak tersebut melakukan pelanggaran berulang. Jika anak tidak tinggal bersama orang tuanya atau wali sah dan pengadilan menganggap bahwa orang tua atau wali sah anak tersebut tidak boleh dipanggil seperti dalam kasus sebelumnya, pengadilan akan memanggil orang-orang yang tinggal dengan anak itu untuk ditanyai apakah mereka mau menerima kondisi yang serupa dengan yang ada dalam kasus sebelumnya. Jika mereka menerima, pengadilan akan mengeluarkan perintah untuk melepaskan anak ke pengasuhan mereka dalam kondisi yang sama;

- c. Dalam hal pengadilan menyerahkan anak ke tahanan orang tua, wali sah atau mereka yang tinggal dengan anak tersebut, pengadilan akan memberlakukan perlindungan untuk mengendalikan perilaku anak. Misalnya, pengadilan dapat menunjuk petugas percobaan atau pejabat lain untuk mengawasi perilaku anak;
- d. Jika anak tidak memiliki orang tua atau wali yang sah, atau pengadilan menilai mereka tidak kompeten, atau orang yang tinggal dengan anak tersebut tidak menerima ketentuan yang ditentukan, pengadilan dapat memerintahkan anak tersebut dilepaskan ke pengasuhan individu atau organisasi yang dianggap sesuai oleh pengadilan. Mereka akan memiliki kewajiban untuk merawat anak selama periode yang ditentukan pengadilan, tergantung pada persetujuan orang atau organisasi tersebut. Dalam hal ini, individu atau organisasi akan memiliki kekuatan yang serupa dengan wali hukum hanya untuk tujuan perawatan dan instruksi. Ini juga termasuk kewajiban untuk menyediakan akomodasi dan pekerjaan yang sesuai untuk anak; atau
- e. Anak tersebut dapat dikirim ke sekolah atau sekolah pelatihan atau lembaga lain yang telah ditetapkan untuk pelatihan dan membesarkan anak-anak untuk periode yang ditentukan pengadilan, yang tidak boleh bertahan melebihi tanggal ketika anak mencapai usia 18 tahun .

Kesimpulan isi dari kedua undang-undang tersebut sama-sama membahas tentang pemidanaan yang dapat di jatuhkan terhadap anak, misalnya saja berupa pidana peringatan, denda, pengembalian

ke orang tua/ wali, pelepasan bersyarat, bahkan pelatihan kerja yang ada di dalam lembaga pembinaan anak¹⁸¹. Hal tersebut juga berdasarkan usia anak saat dipidana, usia anak tidak bisa disamaratakan dalam pemidannya, dikhawatirkan hal tersebut dapat merusak mental anak. Berdasarkan undang-undang kedua negara tersebut sangat jelas bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak masih sama-sama tergolong ringan.

Persamaan selanjutnya yaitu tentang adanya upaya Diversi dan Ajudikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak (B.E 2494) membuat anak sebagai pelaku dari kedua negara tersebut tetap terlindungi hak dan kewajibannya. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana¹⁸². Tujuan tentang proses Diversi ada di pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, berbunyi¹⁸³:

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

¹⁸¹ Fredyan Priambodo, Ida Ayu Sukihana, "Pidana dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Hukum Pidana*, Universitas Udayana, hlm.5.

¹⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁸³ *Ibid.*

Proses Ajudikasi ada di dalam pasal 75 dan 76 Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494), berbunyi¹⁸⁴:

75. *Of the Thai Penal Code provides that whenever any person over 14 years but not yet over 17 years of age commits any act provided by the law to be an offence, the court shall take into account the sense of responsibility and all other things concerning him or her in order to come to a decision as to whether or not it is appropriate to pass judgment by inflicting punishment on him or her. If the court does not deem it appropriate to pass judgment inflicting punishment, it shall adopt other correctional measures short of punishment. If the court deems it appropriate to pass judgment inflicting punishment, it shall reduce the scale of punishment provided for such offence by one half.*
76. *Of the same Code also states that whenever any person over 17 years but not yet over 20 years of age commits any act provided by the law to be an offence, the court may, if it thinks fit, reduce the scale of the punishment provided for such offence by one third or one half.*

Terjemahan bebas:

75. Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand menyebutkan bahwa setiap orang yang berusia di atas 14 tahun tetapi belum berusia di atas 17 tahun melakukan tindakan yang diberikan oleh hukum sebagai pelanggaran, pengadilan harus mempertimbangkan rasa tanggung jawab dan semua hal lain yang menyangkut dia untuk mengambil keputusan, apakah pantas atau tidak untuk menghakimi dengan menjatuhkan hukuman padanya. Jika pengadilan tidak menganggap perlu untuk menjatuhkan hukuman yang menjatuhkan hukuman, pengadilan harus mengambil tindakan pemasyarakatan lain selain hukuman. Jika pengadilan menganggap pantas untuk menjatuhkan hukuman yang menjatuhkan hukuman, pengadilan akan mengurangi skala hukuman yang diberikan untuk pelanggaran tersebut sebesar setengahnya.
76. Dari Kode yang sama juga menyatakan bahwa setiap kali seseorang di atas 17 tahun tetapi belum berusia di atas 20 tahun melakukan tindakan yang diberikan oleh hukum sebagai pelanggaran, pengadilan dapat, jika

¹⁸⁴ Korakod Narkvichetr, "Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent Juvenile Delinquence In Thailand", *Thai Journal*, hlm. 132.

dianggap tepat, mengurangi skala hukuman disediakan untuk pelanggaran seperti itu oleh sepertiga atau satu setengah.

Proses Diversi dan Ajudikasi harus dilakukan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan¹⁸⁵. Apabila dalam proses diversi dan ajudikasi tidak menganut azas keadilan restoratif maka Hakim akan semena-mena dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pengguna narkoba, selain itu terjadinya pelanggaran hak yang dimiliki oleh anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dan Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak sama-sama menetapkan sanksi rehabilitasi dalam memidana anak penyalahguna narkoba. Kedua negara tersebut sama-sama membagi program rehabilitasi kedalam dua klasifikasi, yaitu Perawatan non-institusional dan Perlakuan kelembagaan¹⁸⁶. Perawatan non-institusional yaitu pelayanan diluar lembaga, biasanya perawatan jenis ini diberikan terhadap anak yang dibeikan putusan bebas bersyarat dan dikembalikan ke orang tua,

¹⁸⁵ Ilman Hadi, “*Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata di Luar Pengadilan*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bdf69456b7a/restoratif-justice/>, (diakses pada 8 Desember 2019).

¹⁸⁶ Indira Hapsari dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pelaku Anak”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol.5, No.3, 2016, hlm. 5.

namun dalam hal ini anak wajib menuntut ilmu di sekolah sampai masa wajib belajarnya selesai. sedangkan perlakuan lembaga yaitu proses dimana perehabilitasian anak di dalam lembaga rehabilitasi misalnya seperti adanya sekolah pelatihan di dalam lapas khusus anak yang tujuan utamanya adalah melatih kemampuan anak setelah bebas dari masa hukumannya selain itu juga diharapkan anak dapat bermanfaat nantinya dilingkungan masyarakat.

Persamaan yang terakhir, Indonesia dan Thailand merupakan sama-sama anggota dari ASEAN Drug Free 2015 hal ini disebabkan karena penyebaran narkoba sendiri semakin mulus karena adanya teknologi yang semakin canggih digunakan para pengedar dalam bertransaksi¹⁸⁷. Tentunya kondisi akan semakin sulit diselesaikan ketika masalah sudah meluas dalam ranah global dan menjadi kejahatan Transnational Crime, semakin mencemaskan karena sebagian besar pengguna narkoba adalah anak, salah satu tujuan utama adalah membahas penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkoba yang dapat melalui proses rehabilitasi saja tanpa di jatuhi hukuman penjara, karena mengingat anak merupakan generasi emas penerus bangsa.

Pada hakikatnya kedua undang-undang tersebut sama-sama menganut azas rektoratif dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap anak juga harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh anak, oleh sebab itu adanya proses diverdi dan adjudikasi dan jenis

¹⁸⁷ IDPC, 2016, *Sebuah Pendekatan Kesehatan Masyarakat Terhadap Penggunaan Narkoba di Asia: Prinsip-prinsip dan praktik-praktik dekriminalisasi*, Uni Eropa, hlm.50.

pemidanaan yang diberikan terhadap anak lebih ringan dibandingkan dengan pidana orang dewasa, karena untuk menjaga keberlangsungan masa depan anak pengguna narkoba. Berikut tabel persamaan.

Persamaan	Indonesia	Thailand
Batas Usia Maksimal Anak	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa undang-undang tersebut berlaku bagi terdakwa anak yang maksimal berusia 18 tahun.	Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494) menyatakan bahwa batas maksimal usia anak yang dapat dipidana adalah 18 tahun.
Jenis Persidangan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan khusus untuk perkara anak bahwa sidang yang dilakukan secara tertutup dan petugasnya (Hakim dan Jaksa) tidak memakai toga seperti biasanya, dan pejabat yang bertugas dalam mengadili merupakan khusus dibidang Anak, misalnya seperti Hakim Anak	Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494) juga menyatakan perkara anak bahwa sidang yang dilakukan secara tertutup.
Pemidanaan yang dijatuhkan.	Pada pasal 71 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemidanaan masih tergolong ringan berupa pidana peringatan, denda, pengembalian	Undang-Undang Thailand tentang Peradilan Anak ada di pasal 82, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak juga masih tergolong ringan. Seperti, , pelepasan bersyarat, bahkan pelatihan kerja yang

	ke orang tua/ wali, pelepasan bersyarat, bahkan pelatihan kerja yang ada di dalam lembaga pembinaan anak.	ada di dalam lembaga pembinaan anak.
Proses diluar pengadilan.	Adanya proses Diversi pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan tentang proses Diversi ada di pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.	Adanya proses Ajudikasi. Proses Ajudikasi ada di dalam pasal 75 dan 76 Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak (B.E 2494). Kedua proses tersebut Diversi dan Ajudikasi merupakan upaya dari kedua negara tersebut tetap terlindungi hak dan kewajibannya.
Adanya Sanksi Rehabilitasi	Indonesia dan Thailand sama-sama menetapkan sanksi rehabilitasi dalam memidana anak penyalahguna narkotika. Kedua negara tersebut sama-sama membagi program rehabilitasi kedalam dua klasifikasi, yaitu Perawatan non-institusional dan Perlakuan kelembagaan.	Perawatan non-institusional yaitu pelayanan diluar lembaga, biasanya perawatan jenis ini diberikan terhadap anak yang dibeikan putusan bebas bersyarat dan dikembalikan ke orang tua, namun dalam hal ini anak wajib menuntut ilmu di sekolah sampai masa wajib belajarnya selesai. sedangkan perlakuan lembaga yaitu proses dimana perehabilitasian anak di dalam lembaga rehabilitasi misalnya seperti adanya sekolah pelatihan di dalam lapas khusus anak yang tujuan utamanya adalah melatih kemampuan anak setelah bebas dari masa hukumannya selain itu juga

		diharapkan anak dapat bermanfaat nantinya dilingkungan masyarakat.
ASEAN Drug Free 2015	Indonesia dan Thailand merupakan sama-sama anggota dari ASEAN Drug Free 2015 hal ini disebabkan karena penyebaran narkoba sendiri semakin mulus karena adanya teknologi yang semakin canggih digunakan para pengedar dalam bertransaksi.	Salah satu tujuan utamanya adalah membahas penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkoba yang dapat melalui proses rehabilitasi saja tanpa di jatuhi hukuman penjara, karena mengingat anak merupakan generasi emas penerus bangsa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana bagi anak pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ancaman pidana penjara bagi anak sebagai pengguna narkoba adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi Pengembalian kepada orang tua/wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPSK, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Selain itu pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara. Sedangkan Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Ancaman pidana bagi pengguna narkoba anak di Thailand diatur dalam Undang-Undang B.E 2494 tentang pengadilan anak (*Juvenile Court*). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak dilihat dari usia anak dan hukuman dikurangi

setengah atau sepertiga. Namun, Dalam penjatuhan pidana anak di Thailand dianggap sebagai kenakalan remaja dan tindak pidana ringan, oleh sebab itu di Thailand tidak menerapkan hukuman penjara dan hanya rehabilitasi saja terhadap anak pengguna narkoba, jenis pemberian pidana terhadap anak di Thailand di lihat berdasarkan umur anak yang melakukan penyalahguna narkoba. Proses persidangan anak juga dilakukan secara informal dan tertutup.

2. Perbandingan penjatuhan pidana terhadap anak pennguna narkoba di Indonesia dan Thailand meliputi perbedaan dan persamaan. Perbedaan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dan Undang Undang Thailand Act B.E 2494 tentang *Juvenile court* yang pertama yaitu ada di usia minimal anak yang dapat dipidana, di Indonesia anak yang dapat di pidana minimal berusia 12 tahun sedangkan di Thailand tentang mengatur usia anak yang dapat di pidana yaitu minimal berusia 14 Selanjutnya, di Indonesia anak pengguna narkoba dapat dipidana penjara paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sedangkan di Thailand anak pengguna narkoba hukumannya di kurangi setengah atau sepertiga. Kemudian perbedaan mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pengguna narkoba. Di Indonesia mengatur tentang jenis pidana dan mengklasifikasi jenis pidana, yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan di Thailand tidak mengatur tentang pembagian jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak seperti

yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu juga kedua negara memiliki persamaan dalam penjatuhan pidana terhadap anak pengguna narkoba. Kedua undang-undang tersebut sama-sama menyatakan bahwa usia maximal anak yang dapat dipidana adalah 18 tahun. Selain itu juga sama-sama menyatakan khusus untuk perkara anak bahwa sidang yang dilakukan secara tertutup dan secara informal. Kedua isi undang-undang negara tersebut sama-sama membahas mengenai jenis hukuman pidana apa yang dapat di jatuhkan terhadap anak berupa pidana peringatan, pengembalian ke orang tua/ wali, pelepasan bersyarat, bahkan pelatihan kerja yang ada di dalam lembaga pembinaan anak. Dan persamaan yang terakhir yaitu dalam menanggulangi narkoba yang saat ini menjadi *Transnational Crime*, kedua negara tersebut tergabung dalam ASEAN DRUG FREE 2015, didalam organisasi tersebut juga membahas tentang penghapusan pidana penjara yang diganti dengan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba yang dinilai tidak efektif.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terhadap permasalahan penelitian ini yaitu

1. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap permasalahan pertama yaitu tentang pemahaman mengenai bahayanya mengkonsumsi narkoba khususnya di lingkungan anak-anak masih sangat minim, sebaiknya dalam masa pembedaan anak baik di

Indonesia maupun di Thailand harus sering diadakannya sosialisasi belajar tentang edukasi bahayanya narkoba yang merupakan langkah awal dari pencegahan penggunaan narkoba dilingkungan anak, tidak hanya secara eksternal saja, tapi juga dengan cara menanamkan *mindset* bahwa narkoba itu sangat berbahaya, dan apabila dilihat dari jenis pemidanaan yang di jatuhkan terhadap anak pengguna narkoba di Thailand lebih ketat dan tertata dibanding dengan di Indonesia, alangkah baiknya di Indonesia menerapkan apa yang belum ada, misalnya pemisahan di dalam lembaga perehabilitasian maupun lembaga pelatihan antara perempuan dengan laki-laki. Selain itu juga sebaiknya di Thailand adanya pengklasifikasian jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap anak pengguna narkoba seperti halnya di Indonesia.

2. Saran dari penulis terhadap permasalahan yang kedua yaitu setelah perbandingan yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi tolak ukur introspeksi antara hukum di Indonesia dan di Thailand. Misalnya saja dalam perbedaan pemidanaan anak di Indonesia dengan di Thailand, Indonesia bisa mencontoh proses pra-ajudikasi dalam proses pemidanaan anak seperti di Thailand, sedangkan Thailand juga bisa mencontoh pembagian jenis pidana terhadap anak pengguna narkoba seperti yang ada di Indonesia, selain itu juga bisa memberikan kompensasi terhadap anak berupa penghapusan kebijakan pengurangan sepertiga dari hukuman anak pengguna narkoba yang dirasa hal itu akan menjadi berat untuk anak, selain

itu dalam persamaannya bukan berarti hukum pidana terhadap anak pengguna narkoba di Indonesia dan di Thailand sudah sama, hanya ada beberapa persamaan tidak untuk dijadikan sebagai tolak ukur kepuasan terhadap hukum yang berlaku di kedua negara tersebut. Perlunya amandemen minimal 4 tahun sekali terhadap undang-undang anak di Indonesia dan Thailand dan pengkajian ulang khususnya pidana yang dijatuhkan bagi anak pengguna narkoba.

Daftar Pustaka

Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- AR.,Sujono dan Bony, Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- IDPC, *Sebuah Pendekatan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta, 2016.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- M. Ali Zaidan, , *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014,
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Indonesia, 2000.

- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ralf Christian Michaels, *Comparative Law*, Inggris: Oxford University, Januari 2001.
- Santoso, Topo, dan Achjani, Eva, *Kriminologi*, Jakarta:PT. Radja Grafindo Persada,2003.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Smith kline dan French Clinical , *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Pensilvania: Philladelphia, 1969.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1990.
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak: Tawaran gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000.
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

William Banton, *Ensiklopedia Bronitica*, USA 1970, volume 16, h. 23. Lihat juga:

Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional*, Jakarta: Rajawali press, 2008.

Jurnal

Alam, Andi Dipo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak”, Skripsi Fakultas Hukum, Makasar:Unhas, 2017.

B. L. Tobing, Fredy, “Aktivitas Drugs Trafficking Sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara”, *Jurnal Politik Internasional*, Vol. 5, No. 1, 2002.

Dery Ulum, “Perlindungan Anak dalam Kebijakan Narkotika: Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak”, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol.5, No.1, 2016.

Duangporn Ukris, “Juvenile Justice in Thailand, Resource Material Series”, *International Journal*, Vol.1, No. 59, Thailand.

Indira Hapsari dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol.5, No.3, 2016.

James Windley, “Drug and Drug Policy in Thailand”, University of East London, Vol.1, No.1, 2016.

Korakod Narkvichetr, “Juvenile Crime and Treatment of Serious and Violent Juvenile Delinquency In Thailand”, *Thai Journal*, Vol.1, No.1, Thailand.

Marlina, “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No.1, 2008.

Rutchaneekorn Chotchaisathit, Child Protection in Thailand, *Thai Journal*, Vol.2, No.10, 2017.

Suyatna, Uyat, “Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.20, No.2, 2018.

Wulan Sari, Anggia, “Upaya dan Tantangan Thailand dalam Penanggulangan Narkoba dan Obat Terlarang Menuju Drug-Free ASEAN 2015”, *Jurnal*, Vol.5, No.10, 2013.

Internet

Bangkok Post, “Seventeen-year-old caught in Thailand with drugs worth US\$3.12m”, <https://www.scmp.com/news/asia/southeastasia/article/2149919/seventeen-year-old-caught-thailand-drugs-worth-us312m>, (diakses pada 5 Desember 2019).

Chaninat & Leads, “Drug Offenses in Thailand, Thailand”, <http://www.chaninatandleeds.com/thailand-drug-offenses.html>, (diakses pada 23 Desember 2019).

Children’s Rights Alliance, “What are Childern’s Rights”, <https://childrensrights.ie/childrens-rights-ireland/childrens-rights-ireland>, (diakses pada 22 Desember 2019).

David Setyawan, “KPAI : ‘Anak pengguna narkoba harus direhabilitasi bukan dipenjara’”, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-pengguna-narkoba-harus-direhabilitasi-bukan-dipenjara>, (diakses pada 24 Desember 2019).

Definition, “Definition For Comparative Law”, <https://www.definitions.net/definition/Comparative%20law>, (diakses pada 29 November 2019).

IDPC, “Thailand Amends Drug Law to Reduce Penalties and Ensure More Proportionate Sentencing”, <https://idpc.net/blog/2017/02/thailand-amends-drug-law-to-reduce-penalties-and-ensure-more-proportionate-sentencing>, (diakses pada 19 November 2019).

PikiranRakyat.com, “Menyibak Perang Narkoba di Asia Tenggara, Indonesia Pasar Terbesar”, <https://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2018/02/05/menyibak->

perang-narkoba-di-asia-tenggara-indonesia-pasar-terbesar-418887., (diakses pada 15 November 2019).

Riau Online, “*1 dari 5 Remaja Muslim di Thailand Selatan Kecanduan Narkotika*” ,<https://www.riauonline.co.id/internasional/read/2017/06/15/1-dari-5-remaja-muslim-di-thailand-selatan-kecanduan-narkotika>.,(diakses pada 15 November 2019).

Siam Legal, “Criminal Drug Offence in Thailand”, <https://www.siam-legal.com/litigation/criminal-defence-drug-offences-in-thailand.php>., (diakses pada 20 November 2019).

Travel Government of Canada, “Overview of the Criminal System in Thailand” , <https://travel.gc.ca/travelling/advisories/overview-of-the-criminal-law-system-in-thailand>., (diakses pada 19 November 2019).

Tri Jata Ayu, “Hukuman Bagi Anak di Bawah Umur Pengguna Sabu”,<https://m.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt56964786cc7fc/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu/>, (diakses pada 2 Desember 2019).

Vincent Paul Dole, “Drug”, Enchyclopedia Britannica, 2019, <https://www.britannica.com/biography/Vincent-Paul-Dole>, (diakses pada 22 Desember 2019).

W.E Butler and Michael Palmer, 2018, “The Journal of Comparative Law”, Wildy, Simmonds and Hill Publishing, <https://www.wildy.com/isbn/1477-0814/journal-of-comparative-law-annual-subscription>, (diakses pada 22 Desember 2019).

Wikiversity, “Comparative Law/Thai Legal”, https://en.wikiversity.org/wiki/Comparative_law_and_justice/Thailand,(diakses pada 22 Desember 2019).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Thailand Law, Juvenile Law Act. B.E 2494 (1951).

Thailand Law, Juvenile Procedure Act B.E.2494 (1951).

Thailand Law, Narcotics Act B.E 2522 (1979).

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil

dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

d. bahwa . . .

d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat

merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi

atau non- ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor . . .
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.

12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus- menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Permufakatan . . .
18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;

- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

- (2) Dalam . . .

- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV PENGADAAN

Bagian Kesatu Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 9

- (1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Produksi

Pasal 11

- (1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 12

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 13

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.

- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan . . .
 - b. peringatan;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan izin.

BAB V IMPOR DAN EKSPOR

Bagian Kesatu

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Pasal 15

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

Pasal 16

- (1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.
- (2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.
- (3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

Bagian Kedua

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 18

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Pasal 19

- (1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.
- (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 20

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 21

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengangkutan

Pasal 23

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 24

- (1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau

surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 25

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.

- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 27

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut.
- (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat.
- (4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai.
- (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Bagian Keempat Transito

Pasal 29

- (1) Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
- (2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:
 - a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;
 - b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan
 - c. negara tujuan ekspor Narkotika.

Pasal 30

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- a. pemerintah negara pengekspor Narkotika;
- b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika.

Pasal 31

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang mengalami kerusakan dan harus

dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima Pemeriksaan

Pasal 33

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau Transito Narkotika.

Pasal 34

- (1) Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang diimpornya disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor Narkotika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor Narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB VI PEREDARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

- (3) Untuk . . .

- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 37

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 39

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 40

- (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
 - d. rumah sakit.
- (2) Pedagang . . .

- (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
- pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - apotek;
 - sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - rumah sakit; dan
 - lembaga ilmu pengetahuan.
- (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
- rumah sakit pemerintah;
 - pusat kesehatan masyarakat; dan
 - balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 41

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penyerahan

Pasal 43

- (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
- apotek;
 - rumah sakit;

- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

(2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. apotek lainnya;
- d. balai pengobatan;
- e. dokter; dan
- f. pasien.

(3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

(4) Penyerahan . . .

(4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:

- a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 45

- (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika.
- (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 46

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu Tujuan Pengaturan

Pasal 48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
- c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika

Pasal 49

- (1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini.
- (2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 50

- (1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Keempat Pengadaan

Pasal 51

- (1) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor.
- (2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX . . .

BAB IX PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Pengobatan

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

- a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah . . .
- b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
 - d. produksi;
 - e. impor dan ekspor;

- f. peredaran;
- g. pelabelan;
- h. informasi; dan
- i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63 . . .

Pasal 63

Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

BAB XI

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tempat Kedudukan

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 66

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat

- (3) merupakan instansi vertikal.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

- (1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi.
- (2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan:
 - a. bidang pencegahan;
 - b. bidang pemberantasan;
 - c. bidang rehabilitasi;
 - d. bidang hukum dan kerja sama; dan
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 68

- (1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 69

Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;

- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- j. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNN.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 70 BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 72 . . .

Pasal 72

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XII

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 73

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.

Pasal 74

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil . . .
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
 - m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
 - o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
 - q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - s. menghentikan . . .
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 77

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pasal 80 . . .

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 82 . . .

Pasal 82

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:
 - a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 84 . . .

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 86

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 87

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan . . .

- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama
- 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Pasal 89

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 90 . . .

Pasal 90

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 91

- (1) Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (5) Pemusnahan . . .
- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.

- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 92

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.
- (4) Sebagian . . .

- (4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.
- (5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 93

Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91.

Pasal 96

- (1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal

91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

- (2) Besaran . . .

- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 97

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 98

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 99

- (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

- (1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101 . . .

Pasal 101

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- (3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:
 - a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 102

Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan . . .

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh . . .
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 109

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 110

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV . . .

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113 . . .

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 . . .

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117 . . .

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk

digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 . . .

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126 . . .

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pecandu . . .

- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Selain . . .

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133 . . .

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135 . . .

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138 . . .

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana

Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142 . . .

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat

(1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115,

Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal

121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126,

Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146 . . .

Pasal 146

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148 . . .

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika provinsi, dan Badan Narkotika kabupaten/kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN provinsi, dan BNN kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertama kali ditetapkan sebagai Kepala BNN berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 adalah pejabat dan pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang ini;
- d. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
- e. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 150

Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud termasuk dukungan anggarannya.

Pasal 151 . . .

Pasal 151

Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN provinsi, maupun di BNN kabupaten/kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 153

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan

- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 155

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan

Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional

maupun . . .

maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat

digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang- Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan

Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap

Narkotika . . .

Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” hanya untuk industri farmasi.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perubahan penggolongan Narkotika" adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis.

Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan,

pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari

pihak . . .

pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
- b. reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Narkotika dari sumber lain” adalah Narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja

sama dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan atau perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif

dengan . . .

dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “produksi” adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung Narkotika.

Yang dimaksud dengan “jumlah yang sangat terbatas” adalah tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”swasta” adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “balai pengobatan” adalah balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi kewajiban bagi dokter yang melakukan praktek pribadi untuk membuat laporan yang di dalamnya memuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang sudah melekat pada rekam . . .

rekam medis dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Catatan mengenai Narkotika di badan usaha sebagaimana diatur pada ayat ini disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen pelaporan mengenai Narkotika yang berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disimpan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Maksud adanya kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan Narkotika yang ada di dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelanggaran” termasuk juga segala bentuk penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf a

Cukup jelas. huruf b

Cukup jelas. huruf c

Cukup jelas. huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah izin yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola Narkotika.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”dalam keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar farmasi milik negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lain-lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri” adalah kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspor Narkotika agar lalu lintas Narkotika mudah diawasi.

Pelaksanaan impor atau ekspor Narkotika tetap tunduk pada Undang-Undang tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Ketentuan ini berintikan jaminan bahwa masuknya Narkotika baik melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan yang telah ditentukan, demi pengamanan lalu lintas Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab pengangkut” adalah kapten penerbang atau nakhoda.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”kemasan khusus atau di tempat yang aman” dalam ketentuan ini adalah kemasan yang berbeda dengan kemasan lainnya yang ditempatkan pada tempat tersendiri yang disediakan secara khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai batas waktu dalam menyampaikan laporan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memperketat pengawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas. .

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jenis” adalah sediaan bentuk garam atau basa.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bentuk” adalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat

jadi . . .

jadi seperti tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, cairan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jumlah” adalah angka yang menunjukkan banyaknya Narkotika yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam kilogram, isi dalam milliliter.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya dalam transito Narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (force majeure) sehingga harus dilakukan perubahan

negara tujuan, maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan ini.

Selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 31

Ketentuan ini menegaskan bahwa dilibatkannya Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika laporan diserahkan secara langsung. Dengan adanya pembatasan waktu kewajiban menyampaikan laporan, maka importir harus segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot Narkotika yang diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan Impor yang dimiliki.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek.

Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “industri farmasi, dan pedagang besar farmasi” adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Izin khusus penyaluran Narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan

pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu” adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara

Republik . . .

Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “rumah sakit” adalah rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh Narkotika dari industri farmasi tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa rumah sakit yang belum mempunyai instalasi farmasi hanya dapat memperoleh Narkotika dari apotek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian kewenangan penyimpanan dan penyerahan Narkotika

dalam . . .

dalam bentuk suntik dan tablet untuk pemakaian oral (khususnya tablet morphin) salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan dokter memberikan tablet Narkotika tersebut kepada pasien yang mengidap penyakit kanker stadium yang tidak dapat disembuhkan dan hanya morphin satu-satunya obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang tidak terhingga dari penderita kanker tersebut.

Huruf b

Lihat penjelasan huruf a.

Huruf c

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek memerlukan surat izin penyimpanan Narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk Narkotika Golongan II dan Golongan III.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pencantuman label dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “label” adalah label khusus yang diperuntukan bagi Narkotika yang berbeda dari label untuk obat lainnya.

Pasal 46

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dipublikasikan” adalah yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk Narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi.

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang membidangi urusan perindustrian dan menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bukti yang sah" antara lain surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pasal 55 . . .

Pasal 55

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan Pecandu Narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini tidak mengurangi upaya pencegahan melalui kegiatan ekstrakurikuler
pada perguruan tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemampuan lembaga” dalam ketentuan ini misalnya
memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi agar lembaga rehabilitasi
medis terjaga keberlangsungannya.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sama internasional meliputi juga kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkotika transnasional yang terorganisasi.

Pasal 64

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan . . .

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas Huruf c

Yang dimaksud “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam ketentuan ini adalah tidak mengurangi kemandirian dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan tugas dan wewenang BNN.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h . . .

Huruf h

Yang dimaksud dengan "interdiksi" adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.

Huruf i

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyadapan" adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (bird dog);
- c. intersepsi internet;
- d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (Close Circuit Television);
- f. pelacak lokasi tersangka (direction finder).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikatan Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya

Narkotika . . .

Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan ”pemindaian” dalam ketentuan ini adalah scanning baik yang dapat dibawa-bawa (portable) maupun stationere.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “laboratorium tertentu” adalah laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92 . . .

Pasal 92

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanaman Narkotika yang dimaksud pada ayat ini tidak hanya yang ditemukan di ladang juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami Narkotika, termasuk tanaman Narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan ditempat tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sebagian kecil” adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman Narkotika untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari dimaksudkan agar penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di daerah yang letak geografisnya dan transportasinya sulit dicapai dapat melaksanakan tugas pemusnahan Narkotika yang ditemukan dengan sebaik-baiknya karena pelanggaran terhadap jangka waktu ini dapat dikenakan pidana.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pejabat yang menyaksikan pemusnahan” adalah pejabat yang mewakili unsur kejaksaan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam hal kondisi tempat tanaman Narkotika ditemukan tidak memungkinkan untuk menghadirkan unsur pejabat tersebut maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk kepentingan identifikasi jenis, isi dan kadar Narkotika (drugs profiling).

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “seluruh harta kekayaan dan harta benda” adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam penguasaan pihak lain (isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Pasal 98

Berdasarkan ketentuan ini Hakim bebas untuk melaksanakan kewenangannya meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan bukan berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 99

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Dengan demikian

masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103 . . .

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107 . . .

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “cacat permanen” dalam ketentuan ini adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap atau tidak dapat dipulihkan/disembuhkan.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118 . . .

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132 . . .

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”percobaan” adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143 . . .

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 5062

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 Tahun 2009

TANGGAL : 12 Oktober 2009

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfin : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)- 6, 14-endoeteno-oripavina

12. Acetil – alfa – metil fentanil

: N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida

13. Alfa-metilfentanil . . .

13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida

14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil]
priopionanilida

15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]
propionanilida

16. Beta-hidroksi-3-metil- fentanil

: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.

17. Desmorfina : Dihidrideoksimorfina

18. Etorfina : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno-
oripavina

19. Heroina : Diacetilmorfina

20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina

21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida

22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil]
propionanilida

23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)

24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)
propionanilida
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB

: (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro- 6,6,9-trimetil-6H-
dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE

: N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25

: 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β – karboksamida

37. MDMA : (\pm) -N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina
38. meskalina . . .
38. meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks : (\pm) -sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (\pm) -N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : (\pm) -N-[α -metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H- dibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indo1-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indo1-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY
: 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP
: α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina

: 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina

52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina

53. AMFETAMINA : (\pm)- α –metilfenetilamina

54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α –metilfenetilamina

55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina

56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin

57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP

58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina

: 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina

: (-)-(R)- α -metilfenetilamina

59. levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina

60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon

61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina

62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon

63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-
piperazinetano

64. Opium Obat. . .

64. Opium Obat

65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-(para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina

16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat . . .
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)- 4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4- fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]- 4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimedazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)

33. Hidrokodona : Dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : Dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3- heksanona
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7- benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
42. Fenoperidina : asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena . . .
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan

53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon: 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina: Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediat : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N- oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C . . .
72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat

73. Petidina : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiasikloheptana
77. Properidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemeterfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
80. Rasemorfan : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : Asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

1. Asetildihidrokodeina

2. Dekstropoksifen : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina . . .
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan
Rakyat,

Wisnu Setiawan

LAMPIRAN II
- U9N-DANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 Tahun 2009
TANGGAL : 12 Oktober 2009

GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR

TABEL I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.

- 4. Ergometrine.
- 5. Ergotamine.
- 6. Isosafrole.
- 7. Lysergic Acid.
- 8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
- 9. Norephedrine.
- 10. 1-Phenyl-2-Propanone.
- 11. Piperonal.
- 12. Potassium Permanganat.
- 13. Pseudoephedrine.
- 14. Safrole.

TABEL II

- 1. Acetone.
- 2. Anthranilic Acid.
- 3. Ethyl Ether.
- 4. Hydrochloric Acid.
- 5. Methyl Ethyl Ketone.
- 6. Phenylacetic Acid.
- 7. Piperidine.
- 8. Sulphuric Acid.
- 9. Toluene.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan

Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
 - c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Mengingat:
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

21. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - tindak pidana ringan;
 - tindak pidana tanpa korban; atau
 - nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
- pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - rehabilitasi medis dan psikososial;
 - penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- keikutsertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -
Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -
Pasal 17

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -
Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -
Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -
Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -
Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -
Pasal 38

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -
Bagian Keempat
Penuntutan

Pasal 41

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Bagian Kelima . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Kelima Hakim
Pengadilan Anak

Paragraf 1 Hakim
Tingkat Pertama

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Paragraf 2 Hakim
Banding

Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 3
Hakim Kasasi

Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -
Pasal 50

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4 Peninjauan Kembali

Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Proses . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -
Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara Diversi; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -
Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV PETUGAS KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Kedua
Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 64

- (1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
 - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga masyarakat.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -
Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian Ketiga

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. mempunyai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 67

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 68

(1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e. membuat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V PIDANA DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -
Bagian Kedua
Pidana

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -
Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Tindakan

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

BAB VI PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

Pasal 84

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 87

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
- (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

BAB VII
ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

(3) Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. menyampaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB X KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 94

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

- a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan

b. sedang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
- a. orang tua/Wali;
 - b. LPKS/keagamaan; atau
 - c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang- Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
- a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
 - b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
 - c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
 - d. kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
- (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012 PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 30 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang
Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of*

the Child . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan sesuai dengan umurnya" meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

Huruf m . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Pasal 8

Ayat (1)

Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi.

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Huruf b

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “atasan langsung” antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “situasi darurat” antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

Pasal 21

Ayat (1)

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat bertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Huruf a . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang- Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab gagalnya Diversi.

Pasal 30

Ayat (1)

Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 32

Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual Anak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 55

Ayat (1)

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Ketentuan “tanpa kehadiran Anak” dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa percobaan.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat pembina” adalah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.

Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyerahan kepada seseorang" adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

Huruf c

Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang- undangan” antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memerlukan tindakan pertolongan segera” adalah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, sehinggaharus segera diatasi.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100 . . .



Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 103

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menyiapkan” adalah memberikan dan menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5332



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

NARCOTICS ACT
B.E. 2522 (1979)*

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.,

**Given on the 22nd day of April B.E. 2522; Being
the 57th year of the Present Reign.**

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that: Whereas it is expedient to revise the law on narcotics :

Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the National Legislative Assembly acting as the National Assembly as follows :⁽¹⁾

Section 1 This Act is called the "Narcotics Act B.E. 2522".

Section 2 This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette.⁽²⁾

⁽³⁾**Section 3** The following shall be repealed

- (1) Narcotics Act, B.E. 2465.
- (2) Narcotics Act (No. 2), B.E. 2479;
- (3) Narcotics Act (No. 3), B.E. 2502;
- (4) Narcotics Act (No. 4), B.E. 2504;
- (5) Narcotics Act (No. 5), B.E. 2518;
- (6) Marijuana Act, B.E. 2486 ;
- (7) Kratom** Plant Act, B.E. 2486.

Section 4 In this Act :

⁽⁴⁾"narcotics" means any form of chemicals or substances which, upon being consumed whether by taking orally, inhaling, smoking, injecting or by whatever means, causes physiological or mental effect in a significant manner such as need of continual increase of dosage, having withdrawal symptoms when deprived of the narcotics, strong physical and mental need of dosage and the health in general being deteriorated, and also includes plant or parts of plants which are or give product as narcotics or may be



* As amended by the Narcotics Act (No.2) B.E.2528 (1985), (No.3) B.E.2530 (1987), (No.4) B.E.2543 (2000)

⁽¹⁾ As amended by the Narcotics Act (No.4) B.E.2543, published in the Government Gazette Vol. 117, Part 111A, dated 29th November B.E.2543, (No.5) B.E.2545, published in the Government Gazette, Vol. 119 Part 96A, dated 30 September B.E.2545

⁽²⁾ Published in the Government Gazette Vol. 96, Part 63, dated 27 April B.E.2522 (1979)

⁽³⁾ Repealed by section 3 of the narcotics Act (No.2) B.E.2528 (1985), published in the Government Gazette Vol.102, Part 154, dated 24 October B.E.2528 (1985)
Ayat (3)

⁽⁴⁾ Repealed and Replaced by section 4 of the Narcotics Act (No.2) B.E.2528 (1985)



used to produce narcotics and chemicals used for the production of such narcotics as notified by the Minister in the Government Gazette⁽⁵⁾, but excludes certain formula of household medicine under the law on drugs which contain narcotic ingredients;

"produce" means cultivate, plant, manufacture, mix, prepare, denature, transform, synthesize by scientific means and includes repackaging or combine-packaging ;

"dispose" means sell, distribute, give away indiscriminately, exchange, or give; "import" means bring or order into the Kingdom;

"export" means carry or send out of the Kingdom;^{13 -}

⁽⁶⁾"consume" Means take in narcotics by whatever means;

⁽⁷⁾"narcotic addiction" means habitually consuming narcotics and being in the state of narcotic dependence whereby such state is capable of being identified on a technical basis;

⁽⁸⁾"dose" means tablet, sachet, bottle or such other doses which is made as usual for consuming one time.

⁽⁹⁾"treatment" means the treatment of a narcotic addict which also includes a rehabilitation and follow-up thereafter;

⁽¹⁰⁾"medical establishment" means hospital clinic convalescing home or such other places as the Minister notified in the Ministering Gazette to be the place for the treatment of narcotic addicts;

⁽¹¹⁾"pharmacist" means a pharmaceutical practitioner as pharmaceutical law.

"medicinal formula" means a formula of preparation regardless of form or description which contains narcotics, and includes narcotics in the form of finished pharmaceutical products ready for human or animal use :

⁽¹²⁾"information" includes an act to be displaced by alphabet, picture, film, light, sound, symbol or any act which communicates matters to the understanding of many people.

⁽¹³⁾"advertisement" includes any act in any method which people can see or know the information for commercial purpose unless the technical document or textbook.

⁽⁵⁾ see the Notification of the Ministry of Public Health No.135 (B.E.2539) specifying names and categories of narcotics according to Narcotics Act B.E.2522 (1979) amended by Narcotics Act No.150 (B.E.2541), No.154 (B.E.2542), No.158 (B.E.2542) and No.170 (B.E.2544)

⁽⁶⁾ Repealed and Replaced by section 3 of the Narcotics Act (No.3) B.E.2530 (1987), published in the Government Gazette Vol.104, Part 269, dated 28th December B.E.2530 (1987)

⁽⁷⁾ Added by section 4 of the Narcotics Act (No.3) B.E.2530 (1987)

⁽⁸⁾ Added by section 3 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2530 (2002)

⁽⁹⁾ Added by section 4 of the Narcotics Act (No.3) B.E.2530 (1987)

^{(10)- (11)} Repealed and Replaced by section 4 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽¹²⁾⁻⁽¹³⁾ Added by section 5 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



"licensee" means a holder of a license under this Act ;
"licensing authority" means the Secretary-General of the Food and Drug Board or person entrusted by the Secretary-General of the Food and Drug Board ;

"Committee" means the Narcotics Control Committee under this Act ;
"competent official" means a person appointed by the Minister for the execution of this Act ; "Secretary-General" means the Secretary-General of the Food and Drug Board; "Minister" means the Minister having charge and control of the execution of this Act.

Section 5 (1) This Act shall not apply to the Office of the Food and Drug Board, Ministry of Public Health but the Office of the Food and Drug Board shall submit semi-annual report on the receipt, distribution, storage and other operational procedures pertaining to the control of narcotics to the Committee for information, and the Committee shall submit such reports together with its opinions to the Minister for further issue of orders.

Section 6 The Minister of Public Health shall have charge and control of the execution of this Act and the power to appoint competent officials, issue Ministerial Regulations prescribing fees not exceeding the rates provided in the schedules hereto attached, granting exemption from fees, and prescribing other activities, and to issue Notifications for the execution of this Act.

Such Ministerial Regulations and Notifications shall come into force upon their publication in the Government Gazette.

Section 7 Narcotics shall be classified into 5 categories, viz :

(1) category I consists of dangerous narcotics such as heroin;

(2) category II consists of ordinary narcotics such as morphine, cocaine, codeine, medicinal opium;

(14)

⁽¹⁵⁾(3) category III consists of narcotics which are in the form of medicinal formula and contain narcotics of category II as ingredients in accordance with the rules prescribed by the Minister and published in the Government Gazette;

(4) category IV consists of chemicals used for producing narcotics of category I or category II such as acetic anhydride, acetyl chloride ;

(5) category V consists of narcotics which are not included in category I to category IV such as marijuana, kratom plant. ⁽¹⁶⁾

Provided that the names of narcotics shall be specified by the Minister in accordance with section 8 (1).

⁽¹⁴⁾ See Lists under the Notification of the Ministry of Public Health No.135 (B.E.2539), Category II of Narcotics No.100

⁽¹⁵⁾ Repealed and Replaced by section 5 of the Narcotics Act (No.3) B.E.2530 (1987)

⁽¹⁶⁾ See the Notification of the Ministry of Public Health No.135(B.E.2539), Category V of Narcotics No.3 and No.4



For the purpose of this section, medicinal opium means processed opium to be used for medicinal purposes.

Section 8 The Minister, with the approval of the Committee, shall have the power to notify the following in the Government Gazette.

- (1) specifying the names of narcotics in order to indicate the category of narcotics under section 7;⁽¹⁷⁾
- (2) revoking or altering the name or category¹⁵ of narcotics under (1);
- (3) prescribing standards on quantity, ingredients, quality, purity or other descriptions of narcotics as well as packaging and storage of narcotics ;⁽¹⁸⁾
- (4) prescribing the quantity and additional quantity of narcotics to be used annually for medicinal and scientific purposes throughout the Kingdom ;
- ⁽¹⁹⁾(5) prescribing rules and procedure of prescribing quantity of narcotics which a licensing authority may permit to produce, import, dispose or possess;
- ⁽²⁰⁾(6) prescribing rules concerning narcotics of category III under section 7(3); (7) establishing medical establishments;
- (8) prescribing rules and regulations for the control of treatment and disciplinary rules for medical establishment.

CHAPTER 1

Narcotics Control Committee

Section 9 There shall be a Committee called the "Narcotics Control Committee" consisting of the Under-Secretary of State for Public Health as Chairman, Director-General of the Medical Service Department or representative, Director-General of the Medical Science Department or representative, Director-General of the Health Department or representative, Director-General of the Police Department or representative, Director-General of the Department of Public Prosecutions or representative, Director-General of the Customs Department or representative, Secretary-General of the Council of state or representative, Secretary-General of the Narcotics Control Board or representative, a representative from the Ministry of Defense and not more than seven qualified members appointed by the Minister, as

⁽¹⁷⁾ See the Notification of the Ministry of Public Health No.135 (B.E.2539), Specifying names and categories of narcotics according to Narcotics Act B.E.2522 (1979)

⁽¹⁸⁾ See the Notification of the Ministry of Public Health No.66 (B.E.2529),

⁽¹⁹⁾ Repealed and Replaced by section 6 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽²⁰⁾ Added by section 6 of the Narcotics Act (No.3) B.E.2530 (1987)



members, the Secretary-General of the Food and Drug Board shall be member and secretary and the Chief of the Narcotics Control Division, Office of the Food and Drug Board shall be member and assistant secretary.

Section 10 A qualified members shall hold office for a term of two years. An outgoing member may be re-appointed.

Section 11 A qualified member vacates his office upon

(1) death;

(2) resignation;

(3) being removed by the Minister;

(4) being a bankrupt;

(5) being an incompetent or quasi-incompetent person ;

(6) being imprisoned by a final judgment to a term of imprisonment, except for an offence committed through negligence or petty offence; or

(7) having his license to practice the art of healing or license to engage in the medical profession suspended or revoked.

When a qualified member vacates his office before the expiration of his term the Minister may appoint another person to replace him.

In the case where a member is appointed during the term of members already appointed notwithstanding it is a new appointment or replacement, the appointee shall hold office for the remaining term of the members already appointed.

Section 12 At a meeting of the Committee, the presence of not less than one-half of the total number of members is required to constitute a quorum. If the Chairman is not present at the meeting or is unable to perform his duties, the members present shall elect one among themselves to preside over the meeting.

The decision of the meeting shall be made by a majority of votes.

Each member shall have one vote. In case of an equality of votes, the person presiding over the meeting shall have an additional vote as the casting vote.

Section 13 The Committee shall have the duty:

(1) to submit opinions to the Minister in accordance with section 5; (2) to give approval for the Minister to act in accordance with section 8;

(3) to give approval for the licensing authority to suspend or revoke licenses;

(4) to give approval for the Minister to designate the positions and levels of the competent officials for the execution of this Act;

(5) to submit opinions to the Minister in the regulation of government services in cooperation with the office of the Narcotics Control Board and other Ministries, Sub-ministries and Departments;



(6) to give approval for the Minister to issue licenses to produce, dispose of, import, export or possess narcotics of category IV and category V⁽²¹⁾

(21)(7) to perform other duties by this Act or virtue of other laws to be the authorities and responsibilities of the Committee or entrusted by the Minister.

Section 14 The Committee may appoint a sub-committee to carry out any matter as entrusted by the Board.

Section 12 shall be applied mutatis mutandis to the meetings of the sub-committee.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

CHAPTER 2 Ayat (3)

Application for and Issuance of Licenses Concerning Narcotics

(22)**Section 15** No person shall produce, import, export, dispose of or possess narcotics of category I, unless the Minister permits for the necessity of the use for government service.

The application for a license or the permission shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulations.

The production, import, export or possession of narcotics of category I in quantity as the followings shall be regarded as production, import, export or possession for the purpose of disposal

(1) Dextrolyzer or LSD is of the quantity computed to be pure substances of zero point seventy five milligrams or more or is of narcotics substances thereof of fifteen doses or more or is of pure weight of three hundred milligrams or more.

(2) Amphetamine or derivative amphetamine is of the quantity computed to be pure substances of three hundred seventy five milligrams or more or is of narcotics substances thereof of fifty doses or more or is of pure weight of one point five grams or more.

(3) Narcotics of category I unless (1) and (2) is of the quantity computed to be pure substances of three grams or more.

(23)**Section 16** No person shall produce, import, or export narcotics of category II, unless he has obtained the license from licensing authority for the necessity of the use for government service.

The application for and the issuance of a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in Ministerial Regulations.

⁽²¹⁾ Repealed and Replaced by section 7 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽²²⁾ Repealed and Replaced by section 8 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽²³⁾ Repealed and Replaced by section 8 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



In considering a license to a person under paragraph 1, the person who apply for a license shall be responsible for expenses in analysis or accession of technical document in accordance with rules and procedure prescribed by the Committee by publication in the Government Gazette.

Section 17 No person shall dispose of or possess narcotics of category II unless he has obtained a license.

The possession of narcotics of category II in quantity computed to be pure substances of one hundred grams or more shall be regarded as possession for the purpose of disposal.

The application for and the issuance of a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 18 The provision of section 17 shall not apply to:

(1) the possession of narcotics of category II in quantity not exceeding that which is necessary for personal use as certified by a medical practitioner or first-class modern medical practitioner in the branch of dentistry who is in charge of the treatment;

(2) the possession of narcotics of category II in quantity not exceeding that which is necessary for ordinary first-aid treatment or in case of emergency occurring on board a ship, aircraft or any other vehicle which is used in international public transport and is not registered within the Kingdom; but if the said vehicle is registered in the Kingdom, the application for a license shall be filed in accordance with section 17.

Section 19 The licensing authority may issue a license to dispose of or possess narcotics of category II, if it appears that the applicant is:

(1) Ministry, Sub-Ministry, Department, local administrative organization including Bangkok Metropolitan Administration, Thai Red Cross Society or Pharmaceutical Organization;

(2) person engaging in the international public transport; or

⁽²⁴⁾(3) medical profession, pharmaceutical practitioner, dental practitioner, first-class veterinary practitioner and

(a) having place of residence in Thailand.

(b) not having been convicted by a final judgement of the law on narcotics, the law on psychotropic substances, the law on Controlling the Use of Volatile Substances, the law on measures for the suppression of offenders in an offence relating to narcotics and the law on medicine.

(c) not having his license to engage in the medical profession or license to engage in pharmaceutical practitioner, license to engage in dental practitioner or first-class veterinary practitioner or license under this Act suspended or revoked and the period of suspension or revocation has not been elapsed.

(d) not being a person of unsound mind or mental infirmity.

⁽²⁴⁾ Repealed and Replaced by section 9 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



(e) not being an incompetent or quasi-incompetent.

In considering a license to a person under paragraph one, the licensing authority shall consider the necessity of the possession for the purpose of disposal or the possession of narcotics and may provide any condition as it thinks fit

⁽²⁵⁾Section 20 No person shall produce, import, export, dispose of or possess for the purpose of disposal narcotics of category II, unless he has obtained the license from the licensing authority.

The provisions of paragraph one shall not apply to:

- 19 -

(1) The disposal or the possession for the purpose of disposal of narcotics of category III which pharmaceutical practitioner, dental practitioner disposes or possesses only for the patient under his treatment,

(2) The disposal or the possession for the purpose of disposal of narcotics of category III which first-class veterinary practitioner dispose or possess for the purpose of disposal only for the animal under his cure.

Provide that the medical profession, dental practitioner, first-class veterinary practitioner shall possess the qualifications as prescribed in section 19 (3).

The application for and issuance of a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulations.

The possession of narcotics of category III which is higher than the quantity of the Minister prescribed by the approval of the Committee shall be presumed as possessing for disposal.

Section 21 The licensing authority may issue a license to produce, dispose of, import or export narcotics of category III when it appears that the applicant;

(1) has obtained a license to produce or sell modern drugs or to import or order modern drugs into the Kingdom under the law on drugs; and

(2) has a pharmacist on regular duty at all time during the hours of operation.

The licensee to produce or import narcotics of category III shall dispose of the said narcotics without being obliged to obtain a license to dispose of narcotics.

Section 22 Each time a licensee under section 20 imports or exports narcotics of category III, the licensee shall obtain an export or import license from the licensing authority.

The application for and the issuance of a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 23 The license issued under section 17 and section 20 shall be valid until 31st December of the year the license was issued. If the licensee wishes to apply for a renewal of his license, he shall file an application before the expiration thereof. Having filed the application, he may carry on his business until such time when the licensing authority makes an order refusing the application.

⁽²⁵⁾ Repealed and Replaced by section 10 of the Narcotics Act (No.5) B.E.(2002)



If the licensee does not apply for a renewal of license, the licensing authority makes an order refusing the application under paragraph one, all narcotics which the licensee of the applicant for a renewal of license has in his possession shall become the property of the Ministry of Public Health, and the Ministry of Public Health shall pay the compensation as it thinks fit.

The application for a renewal of license and the permission thereof shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 24 The license issued under section 20 and section 22 shall extend to employees or agents of the licensee.

It shall be presumed that an act of the employee or agent of the licensee done in accordance with the duties so entrusted is also the act of the licensee.

Section 25 The licensee under this Act shall be exempted from compliance with the law on drugs and the law on psychotropic substances.

Section 26 No person shall produce, dispose of, import, export or possess narcotics of category IV or category V unless the Minister has issued the license with the approval of the Board for each case.

The possession of narcotics of category IV or category V in quantity of ten kilograms upwards shall be regarded as possessing for disposal.

The application for a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

⁽²⁶⁾**Section 26/1** The quantity of narcotics which is permitted by this chapter shall be in accordance with Section 8(5).

CHAPTER 3

Duties of Licensees

Section 27 No licensee under section 17 shall dispose of narcotics of category II outside the place specified in the license.

Section 28 The licensee under section 17 shall:

- (1) keep narcotics of category II in separate storage at a secure and safe place under lock or protected by other devices of the same nature;
- (2) promptly notify the licensing authority in writing in the case where narcotics of category II are stolen or lost or destroyed.

⁽²⁶⁾ Added by section 11 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



Section 29 The licensee to produce narcotics of category III shall:

(1) provide a signboard in conspicuous place at his place of production showing that it is a place for producing narcotics. The description and size of and the statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;

(2) provide an analysis of the narcotics of category III produced each time before bringing them out of the place of production and such analysis shall be evidenced by a report showing the detailed analysis which must be kept for not less than three years from the date of making such analysis;

(3) provide a label and leaflet for the narcotics of category III or a statement of warning or caution for the use of narcotics attached to the container or package containing narcotics of category III so produced, in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation;

(4) keep narcotics of category II to be used for producing narcotics of category III in separate storage at a secure and safe place under lock or protected by other devices of the same nature;

(5) promptly notify the licensing authority in writing in the case where the narcotics of category II under (4) are stolen or lost or destroyed.

Section 30 The licensee to import or export narcotics of category III shall:

(1) provide a signboard in a conspicuous place at his place of business of the licensee showing that it is a place for importing or exporting the narcotics of category III. The description and size of and the statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;

(2) provide a certificate to be issued by the original producer showing the detailed result of analysis of the quality of the narcotics of category III so imported or exported;

(3) provide a label on the container or package containing the narcotics of category III;

(4) provide a label and leaflet for the narcotics of category III or a statement of warning or caution for the use of narcotics on the container or package containing the narcotics of category III so imported or exported, in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 31 The licensee to dispose of the narcotics of category III shall:

(1) provide a signboard in a conspicuous place at his place of disposal showing that it is a place for disposing of the narcotics of category III. The description and size of and the statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;

(2) provide a separate storage for the narcotics of category III from other drugs or substances; (3) ensure that there shall be perfect label, leaflet, statement of warning or caution for the use of narcotics of category III on the container or package containing the narcotics of category III.

Section 32 The licensee to produce narcotics of category IV shall:



(1) provide a signboard in a conspicuous place at his place of production showing that it is a place for producing narcotics of category IV. The description and size of and the statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;

(2) provide an analysis of the narcotics of category IV produced each time before bringing them out of the place of production such analysis shall be evidenced by a report showing the detailed analysis which must be kept for not less than three years from the date of making such analysis;

(3) provide a label and leaflet for the narcotics of category IV or a statement of warning or caution on the container or package containing the narcotics of category IV so produced, in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation;

(4) keep the narcotics of category IV so produced in separate storage at a secure and safe place under lock or protected by other devices of the same nature;

(5) promptly notify the licensing authority in writing in the case where the narcotics of category IV are stolen or lost or destroyed.

Section 33 The licensee to import or export the narcotics of category IV shall:

(1) provide a signboard in a conspicuous place at his place of business showing that it is a place for importing or exporting the narcotics of category IV. The description and size of and the statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;

(2) provide a certificate to be issued by the original producer showing the detailed result of analysis of the quality of the narcotics of category IV so imported or exported;

(3) provide a label on the container or package containing the narcotics of category IV or a statement of warning or caution on the container or package containing the narcotics of category IV so imported or exported in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation;

(4) keep the narcotics of category IV so imported or exported in separate storage at a secure and safe place under lock or protected by other devices of the same nature;

(5) promptly notify the licensing authority in writing in the case where the narcotics of category IV are stolen or lost or destroyed.

Section 34 The licensee to dispose of narcotics of category IV shall:

(1) provide a signboard in a conspicuous place at his place of disposal showing that it is a place for disposing of the narcotics of category IV. The description and size of and statement on the signboard shall be prescribed in the Ministerial Regulation;

(2) provide a separate storage for the narcotics of category IV from other drugs or substance;

(3) ensure that there shall be perfect label, leaflet, statement of warning or caution for the use of narcotics of category IV on a container or package containing the narcotics of category IV:



(4) promptly notify the licensing authority in writing in the case where the narcotics of category IV are stolen or lost or destroyed.

Section 35 In the case where the license is lost, destroyed or materially defaced, the licensee shall notify the licensing authority and file an application for a license substitute within fifteen days from the day he is aware of the loss, destruction or defacement.

The application for and the issuance of a license substitute shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

- 21 -

Ayat (3)

CHAPTER 4

Duties of Pharmacists

Section 36 The pharmacist who is under a duty to exercise control over the production of the narcotics of category III shall:

- (1) exercise control over the production so as to be in accordance with this Act;
- (2) exercise control in order that there shall be labels and leaflets for the narcotics of category III in accordance with section 29 (3);
- (3) exercise control over the packing and labeling of the container or package so as to be in accordance with this Act;
- (4) exercise control over the disposal of narcotics of category III so as to be in accordance with section 31;
- (5) be continuously on duty in exercising control over the business throughout the time of operation.

Section 37 The pharmacist who is under a duty to exercise control over the disposal of the narcotics of category III shall:

- (1) exercise control over the separate storage of the narcotics of category III in accordance with section 31 (2);
- (2) exercise control over the acts done in accordance with section 31 (3);
- (3) exercise control over the disposal so as to be in accordance with this Act;
- (4) be continuously on duty in exercising control over the business throughout the time of operation.

Section 38 The pharmacist who is under a duty to exercise control over the import or export of narcotics of category III shall:

- (1) exercise control over the imported or exported narcotics of category III, in order that they conform to the registration of medicinal formula;
- (2) exercise control over the acts done in accordance with section 30 (3) and (4);

(3) exercise control over the disposal of the narcotics of category III so as to be in accordance with section 31;

(4) be continuously on duty in exercising control over the business throughout the time of operation.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

CHAPTER 5 Ayat (3)

Narcotics of category III

Fake Narcotics, Narcotics differing from Standards or Deteriorated Narcotics

Section 39 No person shall produce, dispose of, import or export the following narcotics of category III:

- (1) fake narcotics under section 40;
- (2) narcotics differing from the standards under section 41;
- (3) deteriorated narcotics under section 42;
- (4) narcotics, the medicinal formula of which are required to be registered but have not been registered under section 43;
- (5) narcotics, the medicinal formula of which have been removed from the register by order of the Minister under section 46

Section 40 The following narcotics of category III or substances shall be regarded as fake narcotics:

- (1) drugs or substances which show, by whatever manner, that they are narcotics of category III but in fact do not contain the narcotics of category III;
- (2) narcotics of category III bearing the names of another narcotics or showing the expiry month and year, which is false;
- (3) narcotics of category III bearing the name or mark of a producer, or the location of the place of production, which is false;
- (4) narcotics of category III or narcotics specified in the Notification of the Minister under section 8
(1) or those complying with the registered medicinal formula of the narcotics of category III, which is false;
- (5) narcotics of category III produced differently from the standards to the extent that the active ingredients are more than ten percent lower or higher than the quantity prescribed to be the minimum or maximum limit prescribed in the Notification of the Minister under section 8 (3) or prescribed in the registered medicinal formula of the narcotics of category III.

Section 41 The following narcotics of category III shall be regarded as narcotics differing from the standards:



(1) narcotics of category III produced differing from the standards to the extent that the active ingredients are more than ten percent lower or higher than the quantity prescribed to be the minimum or maximum limit prescribed in the Notification of the Minister under section 8 (3) or prescribed in the registered medicinal formula of the narcotics of category III.

(2) narcotics of category III produced with the purity or other characteristics essential to the quality of the active ingredients different from the limits prescribed in the Notification of the Minister under section 8(3) or prescribed in the registered medicinal formula of the narcotics of category III.

Section 42 The following narcotics of category III shall be regarded as deteriorated narcotics: (1) narcotics of category III which have expired as shown on the label registered in the medicinal formula;

(2) narcotics of category III which have denatured to the extent that it has the same characteristics as fake narcotics under section 40 or narcotics differing from the standards under Section 41.

CHAPTER 6

Registration of a Medicinal Formula of the Narcotics of Category III

⁽²⁷⁾**Section 43** The licensee to produce or import narcotics of category III, who wishes to produce or import the said narcotics, shall apply to the competent official for the registration of the medicinal formula of the said narcotics; and upon receipt of a certificate of registration of the medicinal formula of narcotics, he may then produce or import the said narcotics into the Kingdom.

The application for the registration of the medicinal formula of the narcotics of category III and the issuance of the certificate of registration of the medicinal formula of the said narcotics shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

⁽²⁸⁾In considering the issuance under paragraph one, the person who apply to register for a medical formula shall be responsible for expenses in analysis or accession of technical document in accordance with rules and procedure prescribed by the committee by publication in the Government Gazette.

⁽²⁹⁾**Section 44** The licensee to produce or import narcotics of category III under section 43 may amend the particulars in the registration of the medicinal formula of the narcotics of Category III when he has obtained a written permission from the licensing authority.

⁽²⁷⁾ Repealed and Replaced by Section 8 of the Narcotics Act (No.3) B.E.2530 (1987)

⁽²⁸⁾ Added by section 12 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽²⁹⁾ Repealed and Replaced by section 8 of the Narcotics Act (No.3) B.E.2530 (1987)



The application for amending the particulars and the issuance of the written permission to amend the particulars in the registration of the medicinal formula of the narcotics of category III shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 45 A certificate of registration of the medicinal formula of the narcotics of category III shall be valid for five years from the date of issuance. If the person holding the certificate wishes to apply for its renewal, he shall file an application before the expiration of the term of the certificate; and after having filed the application, he may carry on his business until the licensing authority makes an order refusing to renew the certificate. - 24 -

Ayat (3) The application for the renewal of a certificate of registration of the medicinal formula of the narcotics of category III, and the permission of the renewal thereof shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 46 When the Committee is of the opinion that any narcotics of category III, the medicinal formula of which has been registered and the certificate of which has already been issued, do not possess the quality as declared in the registration of the medicinal formula or may be unsafe to the consumers or there is a reasonable cause to withdraw the permission, the Committee shall submit the matter to the Minister who shall have the power to revoke the registration of the medicinal formula of the narcotics of category III by publishing the order of revocation in the Government Gazette.

The order of the Minister shall be final.

Section 47 In the case where the certificate of registration of the medicinal formula of the narcotics of category III is lost, destroyed or materially defaced, the licensee shall notify the licensing authority and file an application for a substitute for the certificate within fifteen days from the date he is aware of the loss, destruction or defacement.

The application for a substitute for the certificate of registration of the medicinal formula of the narcotics of category III and the issuance thereof shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.

CHAPTER 7

Advertisement

⁽³⁰⁾ **Section 48** No person shall advertise narcotics for commercial purpose unless:

- (1) the advertisement of narcotics of category II or category III is made directed to a medical practitioner, dental practitioner, pharmaceutical practitioner, first-class veterinary practitioner or
- (2) it is a label or leaflet for the narcotics of category II, category III or category IV on the container or package thereof.

⁽³⁰⁾ Repealed and Replaced by section 13 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



The advertisement which is document, picture, film, or picture record, under paragraph one shall be permitted by licensing authority before advertising.

The application for and the issuance of a license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulations.

⁽³¹⁾ **Section 48/1** No person shall advertise relating to treatment or allow anyone to act thereof by using his name or the name or location or business of his medical establishment or qualifications or abilities of practitioners in his medical establishment unless he is permitted by the licensing authority.

- 25 -

The application for and the issuance of license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulations.

The provisions of paragraph one shall not apply to the medical establishment of the State.

⁽³²⁾ **Section 48/2** In case when the licensing authority decides any advertisement violate Section 48 paragraph two or Section 48/1 paragraph two or there are usage of advertisement wording not in accordance with what has been permitted by the licensing authority, the licensing authority shall have the powers to issue an order or orders as follows:

- (1) to correct wording or methods of advertisement
- (2) to forbid the usage of some specific wording as appear on the advertisement (3) to forbid the advertisement or the use of such method for advertisement
- (4) to advertise in order to correct the misunderstanding that may happened

In the issuance of the order under (4) the licensing authority shall define the rules and methods of advertisement by taking into account of public interest and the good faith in the action of the advertising agency.

CHAPTER 8

Competent Officials

⁽³³⁾ **Section 49** In the execution of this Act, the competent official shall have the powers as follows: (1) to enter the place of business of the import or export licensee, the place of production, and the place of disposal, the storage of narcotics or the premises that require a permission under this Act, in order to inspect compliances with this Act.

(2) to enter the dwelling place, or any place to search when there is a reasonable grounds to believe that there is property which is possessed to be an offence or acquired by committed an offence, or used or will be used to commit an offence this Act or which may be used as evidence, and there are

⁽³¹⁾ Added by section 14 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽³²⁾ Added by section 14 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽³³⁾ Repealed and Replaced by section 15 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

reasonable grounds to believe that by reason of the delay in obtaining a warrant of search the property is likely to be removed hidden, or destroyed or diverted original condition.



(3) to search any person and vehicle when there are reasonable grounds for suspecting that there are narcotics hidden unlawfully.

(4) to search in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code

(5) to seize or attach unlawfully possessed narcotics, or any other properties which is used or will be used to commit an offence in accordance with this Act.

The usage of the power under the paragraph one (2), the competent official making the search shall act compliance with the regulation promulgated by the Committee to identify good faith before searching, to reports reasons and results to the higher commanding official, to records the reasonable grounds to believe and the competent official shall show the document to identify himself and the document of searching power including the reasonable cause to believe that be entitled to do so and submit a document issued to the occupier of the dwelling place, searched place, unless there is no occupier at that place, the competent official making the search shall submit the copy of such papers and documents to the occupier immediately as soon as possible. And in case of a search made during night time, the competent official who is the chief of that search must be a civil official at position of level 7 upward or a police Chief officer or equivalent that has the rank of Lieutenant Colonel or higher.

The competent official of what rank and of what level, who shall have the power and duties as prescribed in paragraph one, wholly or in part, or must be authorized by any person before taking action, shall be designated by the Minister, with the approval of the Committee, who shall issue a document of authorization to the competent official.

In the performance of duties of the competent official under paragraph one, the person concerned shall afford him every reasonable facility.

The Minister shall file a report of the result of the action according to this Section to the cabinet for reporting the annual performance which shall include the facts, problems and obstacles, the amount of performance and the success of the operation in details, for the cabinet to forward the report with its comment to the House of People's Representative and the House of Senate.

Section 50 In the performance of duties, the competent official must provide his identity card and the document of authorization under section 49 paragraph two to the person concerned.

The identity card of the competent official shall be in the form prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 51 In the performance of duties, the competent official shall be official under the Penal Code.

CHAPTER 9



Suspension and Revocation of Licenses

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Section 52 When any licensee violates or does not comply with this Act or Ministerial Regulation or Notification issued under this Act, the licensing authority, with the approval of the Committee, shall have the power to suspend the license for a period of not more than one hundred and eighty days each time; but in the case where the licensee is prosecuted in the court for an offence under this Act, the licensing authority may suspend the license pending the final judgment of the court.

The person whose license has been suspended may not apply for any license under this Act during the period of such suspension.

Section 53 If it appears that any licensee lacks any qualification under section 19 or commits an offence under section 39, the licensing authority, with the approval of the Committee, shall have the power to revoke his license.

The person whose license has been revoked may not apply for any license under this Act until the period of two years from the date of the revocation has elapsed.

Section 54 The licensee shall be notified of the order of suspension and the order of revocation in writing. In the case where the person whose license has been suspended or revoked is not found or refuses to receive the said order, it shall be conspicuously posted at the place specified in the license, and the licensee shall be deemed to have the knowledge thereof from the date of receiving or posting the order.

Section 55 The competent official shall seize the narcotics of the person whose license has been suspended or revoked, and his license which has been suspended or revoked for safe keeping at the office of the Food and Drug Board, Ministry of Public Health, or in case of necessity, at any other place which the Ministry of Public Health may prescribe.

In the case where a license is revoked, the narcotics seized under paragraph one shall become the property of the Ministry of Public Health.

Section 56 After the lapse of the suspension period, the competent official shall return the narcotics and license seized under section 55 to the licensee.

CHAPTER 10

Special Measures of Control

Section 57 No person shall consume narcotics of category I or category V.



Section 58 No person shall consume narcotics of category I, category II, or category V unless it is for the purpose of curing diseases upon the prescription of a medical practitioner or first-class modern medical practitioner in the branch of dentistry who has obtained a license under section 17.

⁽³⁴⁾**Section 58/1** In case of necessity and there are reasonable grounds to believe that any person or any group of persons consumes narcotics of category I, category II, or category V which is the offence in accordance with this Act in dwelling place, any place, or vehicle, the administrative official, or police official or competent official under this Act shall have the powers to examine or test or order to receive examination or test that if whether such person or group of persons have narcotics within their body. **Ayat (3)**

The administrative official, or police official or competent official under this Act of what rank and of what level, who shall have the powers and duties as prescribed in paragraph one, wholly or in part, or must be authorized by any person before taking action, shall be as designated by the Minister, with approval of the Committee, who shall issue a document of authorization to the administrative official, or police official or competent official of this Act.

The method of examination or test under paragraph one shall be in accordance with the rules, procedure and conditions notified by the Committee as published in the Government Gazette. Whereas in the notification, shall at least state the procedure of showing good faith of administrative official, or police official, or competent official when carry out their duties, and the procedure related to non-disclosure of the examination and test resulting to any person who does not have relevant duty, when it appears at the first place that it is suspect that there is narcotics within the body, until there is examination for the final result

Section 59 The Minister shall prescribe the quantity of narcotics of category II to be used annually for medical and scientific purposes throughout the Kingdom by notifying in the Government Gazette not later than January each year, and prescribe the additional quantity in case of necessity by notifying in the Government Gazette in the same manner.

⁽³⁵⁾**Section 60** In case when the licensee would like to dispose of or possess narcotics of category II exceeding the quantity prescribed in Section 8(5), he may apply especially for the license.

The application and the issuance of license shall be in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulations.

The provisions of Section 8(5) shall be applied mutatis-mutandis.

Section 61 In the case where the licensee to dispose of or possess narcotics of category II died before the license expires, the heir or the possessor or the administrator shall notify the licensing authority within ninety days from the date the licensee died, and the competent official shall have the power to seize

⁽³⁴⁾ Added by section 16 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽³⁵⁾ Added by section 17 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



the narcotics of the licensee left for safe keeping at the Office of Food and Drug Board, Ministry of Public Health, the Ministry of Public Health shall pay compensation for the seized narcotics for it thinks fit.

Section 62 The licensee under section 17, section 20 and section 26 shall make receipted and expenditure accounts of narcotics, and submit monthly and yearly reports to the Secretary General. The said accounts shall be kept ready for showing to the competent official at any time during the office hours for a period of five years from the date of entering the final item on the accounts.

The receipted and expenditure accounts of narcotics under paragraph one shall be in accordance with the form prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 63 when a medical establishment for the treatment of the narcotic addicts has been established under section 8 (7), the Minister shall designate rules and regulations for the control of such treatment, and disciplinary rules for the said medical establishment.

CHAPTER 11

Carriage of Narcotics in Transit

Section 64 In carrying narcotics of category I category II, category IV, and category V in transit, the carrier must obtain a license issued by the competent authority of the exporting country accompanying the narcotics, and must produce the said license to the customs official and consent to the keeping of or having the narcotics in custody by the customs official.

The customs official shall keep or control the narcotics of category I, category II, category IV and category V in safe custody at a proper place until such time when the carrier of narcotics in transit shall carry the said narcotics out of the Kingdom.

In the case where the carrier of the narcotics of category I, category II, category IV and category V in transit does not carry the said narcotics out of the Kingdom within the period of thirty days from the date the narcotics are imported, the customs official shall report to the Secretary-General for information. The Secretary-General has the power to order the carrier of narcotics in transit to carry the said narcotics out of the Kingdom within the period of sixty days from the date of the order. In the case where the person so ordered fails to comply therewith, the said narcotics shall become the property of the Ministry of Public Health.

⁽³⁶⁾CHAPTER 11/1

APPEAL

⁽³⁷⁾**Section 64/1** In case when the person who takes the order from the licensing authority according to Section 48/2 disagrees with such order, he shall have the right to appeal to the Committee.

⁽³⁶⁾⁻⁽³⁸⁾ Added by section 18 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



⁽³⁸⁾**Section 64/2** The appeal under Section 64/1 shall be submitted to the Committee within fourteen days from the date of obtaining the order of the licensing authority.

Rules and method of appeal and trial procedure shall be prescribed in the Ministerial Regulations.

The appeal of order according to the first paragraph shall not be a stay of execution of the order from the licensing authority, except when the Committee shall order otherwise for a temporary period before consideration of appeal.

The decision of the Committee shall be final.

- 30 -

Ayat (3)

CHAPTER 12

Penalties

⁽³⁹⁾**Section 65** Any person who produces, imports or exports the narcotics of category I in violation of Section 15, shall be liable to imprisonment for life and to a fine of one million to five million baht. If the commission of the offence under paragraph one is committed for the purpose of disposal, the offender shall be liable to death penalty.

If the commission of the offence under paragraph one is a production by retailing or whole-selling and in quantity computed to the pure substances, or in number of used dosage, or in net weight, that does not reach the quantity prescribed in Section 15 paragraph three, the offender shall be liable to imprisonment for a term of four years to fifteen years, or to a fine of eighty thousand to three hundred thousand baht or to both.

If the commission of the offence under paragraph three is committed for the purpose of disposal, the offender shall be imprisoned for a term of four years to life and to a fine of four hundred thousand to five million baht.

⁽⁴⁰⁾**Section 66** Any person who disposes of or possesses for disposal narcotics of category I without permission and in quantity computed to be pure substances, or in number of used dosage, or in net weight, that does not reach the quantity prescribed in Section 15 paragraph three, shall be liable to imprisonment for a term of four to fifteen years, or to a fine of eighty thousand to three hundred thousand baht, or to both.

If the narcotics under paragraph one is in quantity computed to be pure substances of the quantity prescribed in Section 15 paragraph three, but not over twenty grams, the offender shall be liable to imprisonment for a term of four years to life and to a fine of four hundred thousand to five million Baht.

⁽³⁹⁾⁻⁽⁴⁰⁾ Repealed and Replaced by section 19 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



If the narcotics under paragraph one is in quantity computed to be pure substances of the quantity over twenty grams, the offender shall be liable to imprisonment for life and to a fine of one million to five million baht, or death penalty.

⁽⁴¹⁾**Section 67** Any person who possesses narcotics of category I without permission and in quantity computed to be pure substances, or in number of used dosage, or in net weight, that does not reach the quantity prescribed in Section 15 paragraph three, shall be liable to imprisonment for a term of one year to ten years, or to a fine of twenty thousand to two hundred thousand baht, or to both.

⁽⁴²⁾**Section 68** Any person who, in violation of Section 14, produces, imports, or exports the narcotics of category II, shall be liable to imprisonment for a term of one year to ten years and to a fine of one hundred thousand to one million baht.

If the narcotics which constitute the corpus deficit are morphine, opium, or cocaine, the offender shall be liable to imprisonment for a term of twenty years to life and to a fine of two million to five million baht.

⁽⁴³⁾**Section 69** Any person who, in violation of Section 17, possesses narcotics of category II, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding one hundred thousand baht or to both.

Any person who, in violation of Section 17, disposes of or possesses for disposal narcotics of category II, shall be liable to imprisonment or a term of one year to ten years or to a fine of twenty thousand to two hundred thousand baht or to both.

If the Narcotics which constitute the corpus deficit are morphine, opium, or cocaine, in quantity computed to be pure substances of the quantity of less than one hundred grams, the offender shall be liable to imprisonment for a term of three to twenty years or to a fine of sixty thousand to four hundred thousand baht, or to both. But if such morphine, opium, or cocaine, in quantity computed to be pure substances of the quantity of one hundred grams upward, the offender shall be liable to imprisonment for a term of five years to life and to a fine of five hundred thousand to five million baht.

If the licensee under Section 17 has committed an act in violation of paragraph one, paragraph two, or paragraph three, he shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years and to a fine not exceeding one hundred thousand baht.

⁽⁴⁴⁾**Section 70** Any person who, in violation of Section 20, produces or imports the narcotics of category III, shall be liable to imprisonment for a term of one year to three years and to a fine of one hundred thousand to three hundred thousand baht.

⁽⁴¹⁾ Repealed and Replaced by section 19 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁴²⁾ -⁽⁴³⁾ Repealed and Replaced by section 20 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁴⁴⁾ - ⁽⁴⁸⁾ Repealed and Replaced by section 21 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



⁽⁴⁵⁾**Section 71** Any person who, in violation of Section 20 paragraph one, disposes of, possesses for disposal, or exports the narcotics of category III, in the amount not exceeding as prescribed in Section 20 paragraph four shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht, or to both.

In case of paragraph one, if the narcotics of category III is exceeding the amount of Section 20 paragraph four, the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years and to a fine of not exceeding two hundred thousand baht.

⁽⁴⁶⁾**Section 72** Any person who, in violation of Section 22, imports or exports the narcotics of category III shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year and to a fine not exceeding one hundred thousand baht.

⁽⁴⁷⁾**Section 73** Any person who, in violation of Section 26, produces, imports, exports, disposes of or possesses for disposal narcotics of category IV shall be liable to imprisonment for a term of one to ten years and to a fine of twenty thousand to two hundred thousand baht.

In the case of paragraph one, if the narcotics of category IV are in quantity of ten kilograms upward, the offender shall be liable to imprisonment for a term of one to fifteen years and to a fine of one hundred thousand to one million and five hundred thousand baht.

⁽⁴⁸⁾**Section 74** Any person who, in the violation of Section 26, possesses narcotics of category IV shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding one hundred thousand baht or to both.

⁽⁴⁹⁾**Section 75** Any person who, in violation of Section 26, produces, imports or exports narcotics of category V shall be liable to imprisonment for a term of two to fifteen years and to a fine of two hundred thousand to one million and five hundred thousand baht.

If the narcotics which constitute the corpus delict is Kratom plant (*Mitragyna speciosa*), the offender shall be liable to imprisonment not exceeding two years and to a fine not exceeding two hundred thousand baht.

⁽⁵⁰⁾**Section 76** Any person who, in violation of Section 26, possesses narcotics of category V shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding one hundred thousand baht or to both.

If the narcotics which constitute the corpus delict as defined in paragraph one is Kratom plant (*Mitragyna speciosa*), the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.

⁽⁵¹⁾**Section 76/1** Any person who, in violation of Section 26 paragraph one, disposes of or possesses for disposal narcotics of category V in quantity of less than ten kilograms shall be liable to

⁽⁴⁹⁾ Repealed and Replaced by section 22 of the Narcotics Act (No.5) B.E. 2545 (2002)

⁽⁵⁰⁾ Repealed and Replaced by section 22 of the Narcotics Act (No.5) B.E. 2545 (2002)



imprisonment for a term of two to ten years or to a fine of forty thousand to two hundred thousand baht or to both.

In the case under paragraph one, if the narcotics of category V are in quantity of ten kilograms upward, the offender shall be liable to imprisonment for a term of two to fifteen years and to a fine of two hundred thousand to one million and five hundred thousand baht.

If the narcotics which constitute the corpus deficit as defined in paragraph one is Kratom plant (*Mitragyna speciosa*), the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine not exceeding forty thousand baht or to both.

If the narcotics which constitute the corpus deficit as defined in paragraph two is Kratom plant (*Mitragyna speciosa*), the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years and to a fine not exceeding two hundred thousand baht.

⁽⁵²⁾ **Section 77** Any licensee who violates Section 27 shall be liable to a fine not exceeding twenty thousand baht.

⁽⁵³⁾ **Section 78** Any licensee who violates Section 29, Section 30, or Section 31 shall be liable to a fine not exceeding forty thousand baht.

⁽⁵⁴⁾ **Section 79** Any licensee who violates Section 32, Section 33, or Section 34 shall be liable to a fine not exceeding one hundred thousand baht.

⁽⁵⁵⁾ **Section 80** Any licensee who does not comply with Section 35 paragraph one shall be liable to a fine not exceeding twenty thousand baht.

⁽⁵⁶⁾ **Section 81** Any pharmacist who, having the duty to exercise control, does not act in accordance with Section 36, Section 37 or Section 38 shall be liable to a fine not exceeding twenty thousand baht.

⁽⁵⁷⁾ **Section 82** Any person who, in violation of Section 39(1), produces, imports or exports fake narcotics of category III shall be liable to imprisonment for a term of three to twenty years and to a fine of three hundred thousand to two million baht.

⁽⁵⁸⁾ **Section 83** Any person who, in violation of Section 39(1), disposes of fake narcotics of category III shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years and to a fine not exceeding five hundred thousand baht.

⁽⁵⁹⁾ **Section 84** Any person who, in violation of Section 39(2) or (3), produces, imports or exports narcotics of category III which differ from their standard or are deteriorated shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding sixty thousand baht or to both.

⁽⁵¹⁾ Added by section 23 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁵²⁾-⁽⁵⁶⁾ Repealed and Replaced by section 24 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁵⁷⁾-⁽⁶⁴⁾ Repealed and Replaced by section 24 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



⁽⁶⁰⁾**Section 85** Any person who, in violation of Section 39(4) or (5), disposes of narcotics of category III which differ from their standard or are deteriorated shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.

⁽⁶¹⁾**Section 86** Any person who, in violation of Section 39(4) or (5), produces, imports or exports narcotics of category III which the medicinal formula of which is required to be registered but in fact has not been registered or the registration of the medicinal formula of which has been revoked by the Minister shall be liable to imprisonment for a term not exceeding five years and to a fine not exceeding five hundred thousand baht.

- 34 -

⁽⁶²⁾**Section 87** Any person who, in violation of Section 39(4) or (5), disposes of narcotics of category III which the medicinal formula of which is required to be registered but in fact has not been registered or the registration of the medicinal formula of which has been revoked by the Minister shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three years and to a fine not exceeding three hundred thousand baht.

⁽⁶³⁾**Section 88** Any person who, in violation of Section 44 paragraph one, amends any particular in the registration of the medicinal formula of narcotics of category III shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.

⁽⁶⁴⁾**Section 89** Any person who violates Section 48 or Section 48/1 or fails to comply with the Ministerial Regulations issued under Section 48 or Section 48/1 or fails to comply with the order of the licensing authority under Section 48/2 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine of twenty thousand to two hundred thousand baht or to both

⁽⁶⁵⁾**Section 89/1** If the commission under Section 89 is committed by an advertising agency or a media planner, he shall be liable to one half of the punishment as provided for such offence.

⁽⁶⁶⁾**Section 89/2** If the commission of the offence under Section 89 or Section 89/1 is the connected offence, the offender shall be liable to a fine not exceeding five thousand baht per day or not exceeding double expense for such advertisement for the duration of the violation or the failure to comply. ⁽⁶⁷⁾**Section 90** Any person who does not provide reasonable facilities for

the competent official who is performing the duties under Section 49 or obstructs the performance of duties of the competent official under Section 55 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both.

⁽⁶⁸⁾**Section 91** Any person who consumes narcotics of category I in violation of Section 57 or consumes narcotics of category II in violation of Section 58 shall be liable to imprisonment for a term of six months to three years or to a fine of ten thousand to sixty thousand baht or to both.

⁽⁶⁵⁾⁻⁽⁶⁶⁾ Added by section 25 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁶⁷⁾⁻⁽⁶⁸⁾ Repealed and Replaced by section 26 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



⁽⁶⁹⁾**Section 92** Any person who, in violation of section 92, consumes narcotics of category V shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.

If the narcotics which constitute the corpus delicti as aforesaid is Kraton plant (*Mitragyna speciosa*), the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one month or to a fine not exceeding two thousand baht.

⁽⁷⁰⁾**Section 92/1** Any person who fails to comply with the order, which is given under Section 58/1, of the administrative official, the police official or the competent official shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand baht.

- 35 -

⁽⁷¹⁾**Section 93**
Ayat (3) Any person who deceives threatens uses violent force against exercise under influence over or coerces other persons by whatever means to consume narcotics shall be liable to imprisonment for a term of one year to ten years and to a fine of one hundred thousand to one million baht. If such act is committed by the use of weapons or committed jointly by two persons or more, the offender shall be liable to imprisonment for a term of two to fifteen years and to fine of two hundred thousand to one million and five hundred thousand baht.

If such act under paragraph one or paragraph two is committed against a women or person who is not sui juris, or committed for the purpose of persuading other persons to commit a crime or facilitating himself or other persons to committed a crime, the offender shall be liable to imprisonment for a term of three years to imprisonment for life and to a fine of three hundred thousand to five million baht.

If the narcotics which constitute the corpus delicti under paragraph three are morphine or cocaine, the offenders shall be liable to additional penalty on one half of the normal penalty, and if the offence is committed against a women or person who is not sui juris, the offender shall be liable to imprisonment for life and to a fine of one million to five million baht.

If the narcotics which constitute the corpus delicti under paragraph three is Heroin, the offender shall be liable to double penalty of the normal penalty, and if the offender is committed against a women or person who is not sui juris, the offender shall be liable to death penalty.

⁽⁷²⁾**Section 93/1** Any person who, in violation of the provisions of this Act, instigates another person to consume narcotics of category I or category II shall be liable to imprisonment for a term of one year to five years or to a fine of twenty thousand to one hundred thousand baht or to both.

⁽⁶⁹⁾ Repealed and Replaced by section 27 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁷⁰⁾ Added by section 28 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁷¹⁾ Repealed and Replaced by section 29 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁷²⁾ Repealed and Replaced by section 30 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



If such act under paragraph one is committed by a person to consume narcotics of category V, the offender shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.

⁽⁷³⁾**Section 93/2** Any person who deceives threatens uses violent force against exercises under influence over or coerces other persons by whatever means to produce, import, export, dispose of, possess for disposal or possess narcotics shall be liable to double penalty of the normal penalty imposed by the law for such offence.

⁽⁷⁴⁾**Section 94** Any person who consumes, consumes and possesses, consumes and possesses for disposal, or consumes and disposes of narcotics in accordance with description, type, category and quantity prescribed in the Ministerial Regulations, and applies for a treatment in a medical establishment before his offence is discovered by the competent official or administrative official or police official, and has also strictly complied with the rules of the medical establishment, and has obtained a certificate from the competent official as prescribed by the Minister shall be relieved from the offence prescribed by the law, but all these, the case that the offence is committed after applying for treatment shall not be included.

Applying for the treatment in the medical establishment under paragraph one shall be in accordance with rules and procedure prescribed by the Committee.

⁽⁷⁵⁾**Section 94/1** Any person who, in the ordinary course of business, gives treatment to a narcotics addict by using drugs under the law on drugs, psychotropic substances under the law on narcotics, or gives treatment to narcotics addict by any other means, which does not take place in the medical establishment prescribed by this Act, whether or not a consideration is obtained, shall be liable to imprisonment for a term of six months to three years or to a fine of fifty thousand to three hundred thousand baht.

⁽⁷⁶⁾**Section 95** Any heir, possessor or administrator violates Section 61 shall be liable to a fine not exceeding two thousand baht.

⁽⁷⁷⁾**Section 96** Any licensee who does not comply with Section 62 paragraph one shall be liable to a fine not exceeding ten thousand baht.

Section 97 If any person who, having been sentenced by a final judgment to a term of imprisonment for an offence under this Act, commits an offence under this Act again during the punishment period or within five years from the date he has been released from the punishment, and if the

⁽⁷³⁾ Added by section 31 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁷⁴⁾ Repealed and Replaced by section 32 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁷⁵⁾ Repealed and Replaced by section 33 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁷⁶⁾⁻⁽⁷⁷⁾ Repealed and Replaced by section 34 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)



Court decides to sentence him to imprisonment for the later offence, the punishment to be inflicted upon him shall be increased by one-half of the penalty determined by the Court for the later offence.

Section 98 An offender who has been convicted of an offence under Section 91 or Section 92 for the third time shall, upon his release, be detained by the competent official, upon order of the Minister at a medical establishment specifically established by the Notification of the Minister, and such person shall be given a treatment until he has obtained a certificate from the competent official designated by the Minister to the effect that he has received a complete treatment in accordance with the rules and regulations for the control of treatment and disciplinary rules of the said medical establishment.

⁽⁷⁸⁾**Section 99** Any person who escapes during the detention period from a medical establishment under Section 98 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.

⁽⁷⁹⁾**Section 100** Any member of the Committee and competent official under this Act or Government official or official of a State organization or State agency who produces, imports, exports, disposes of or possesses for disposal narcotics or supports the commission of such act as an offence under this Act shall be liable to treble penalty imposed for such offence.

⁽⁸⁰⁾**Section 101/1** wherever this Act determines that the punishment for an offence is both imprisonment and fine, the Court shall inflict both punishments and fine with regard to the punishment relating to property for controlling the commission of offence relating to narcotics.

The Court may, when having regard to the gravity of the commission of offence, status of the offender and the concerning circumstances, if it thinks fit in a specific case, inflict less punishment of fine than the minimum punishment as provided for the committed offence.

⁽⁸¹⁾**Section 100/2** If the Court is of opinion that any offender has given the important information for the very benefit of suppressing the commission of offence relating to narcotics to administrative official or police official or inquiry official, the Court may inflict less punishment of fine than the rate of minimum punishment as provided for such the committed offence.

⁽⁸²⁾**Section 101** In the case where there is a seizure of narcotics of category I, category II or category III under section 49(2) or by virtue of other laws, and no court proceeding has been instituted, if, within the period of six months from the date of the seizure, no person claims to be the owner thereof, such narcotics shall become the property of the Ministry of Public Health.

⁽⁷⁸⁾⁻⁽⁷⁹⁾ Repealed and Replaced by Section 35 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁸⁰⁾⁻⁽⁸¹⁾ Added by section 36 of the Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

⁽⁸²⁾ Repealed and Replaced by section 11 of the Narcotics Act (No.3) B.E.2530 (1987)



⁽⁸³⁾**Section 101 bis** In the case where there is a seizure of narcotics of category IV or category V under section 49 (2) or by virtue of other laws, whether or not a court proceeding has been instituted, the Ministry of Public Health or person entrusted by the Ministry of Public Health, after having verified the type and quantity to be narcotics of the said category by recording the verification in the report, may destroy or utilize them in accordance with the rules prescribed by the Ministry of Public Health.

Section 102 All the narcotics of category I, category II, category IV, or category V, equipment, tools, vehicles or other articles with the offender used in committing an offence relating to narcotics, which is an offence under this Act, shall be forfeited.

- 38 -

Section 102 bis In the case where the Court proceeding has been instituted for the narcotics of category I or category II, and no contend about the type, quantity or weight of the narcotics, if the Court of First Instance has a decision or an order to seize of the said narcotics under section 102 or by virtue of other laws and, within the period of thirty days from the date of the decision or the order to seize the narcotics, there is no offer that the real owner does not connive at the commission of the offence, the Ministry of Public Health or person entrusted by the Ministry of Public Health may destroy or utilize them in accordance with the rules prescribed by the Ministry of Public Health.

Transitory Provisions

⁽⁸⁴⁾**Section 103** Pending the publication of the Notification specifying the names of narcotics under Section 8 (1) under this Act ;

(1) heroin or salts of heroin as provided in Section 4 bis of the Narcotics Act, B.E. 2465 as amended by the Narcotics Act (No.4), B.E. 2504 shall be narcotics of category I;

(2) narcotics the names of which appear in the schedule attached to the following Ministerial Regulation and in the following Notifications of the Ministry of Public Health shall be narcotics of category II:

(a) in the schedule attached to the Ministerial Regulation (No.7), B.E. 2507 issued under the Narcotics Act, B.E. 2465;

(b) in the Notifications of the Ministry of Public Health specifying the additional names of narcotics issued under the Narcotics Act, B.E. 2465 dated 4th April B.E. 2511, dated 4th March B.E. 2512, dated 30th July B.E. 2512, dated 26th April B.E. 2514, dated 19th September B.E. 2516, and dated 24th December B.E. 2516;

(3) Acetic Anhydride and Acetyl Chloride shall be narcotics of category IV;

⁽⁸³⁾ Added by section 12 of the Narcotics Act (No.3) B.E.2530 (1987)

⁽⁸⁴⁾ Added by section 3 of the Narcotics Act (No.4) B.E.2543 (2000) published in the Government Gazette Vol.117 Part 111A, dated 29th November B.E.2543 (2000)



(4) marijuana under the Marijuana Act, B.E. 2486 and kratom plant under the Kratom Plant Act, B.E. 2486 shall be narcotics of category V.

Section 104 The drugs which are exempted under the laws on narcotics before this Act comes into force shall be narcotics of category III under this Act.

The licensee to produce, sell or import the narcotics of category III referred to in paragraph one under the law on drugs shall file an application for a license to produce, dispose of or import narcotics of category III under Section 20, and in case of the producer or importer, he shall file an application for the registration of the medicinal formula of the narcotics of category III under section 43 within one hundred and eighty days from the date this Act comes into force, and upon the filing of the applications for a license and the registration of the said medicinal formula, the applicant may carry on his business temporarily; But If the licensing authority by a written order refuses to issue the license or such person has neither filed an application for a license to produce, dispose of or import nor filed an application for the registration of the medicinal formula within the said period, his rights under this section shall terminate as from the date of receiving the notice of the order or the day after the expiration of the period of one hundred and eighty days from the date this Act comes into force, as the case may be, and the provision of Section 55 shall be applied mutatis mutandis.

Section 105 The licensee to import the exempted drugs into the Kingdom in accordance with form No.9 attached to the Ministerial Regulation of the Ministry of Interior issued under the Narcotics Act, B.E. 2465 as amended by the Narcotics Act (No.2), B.E. 2479 shall be permitted to import the said drugs under the license but he shall be required to comply with Section 104.

Section 106 The licensee to buy, have and distribute narcotics, or a special license to buy, have and distribute narcotics in excess of the quantity prescribed under the laws on narcotics in force before the date this Act comes into force shall retain the narcotics in possession and carry on the business until such license expires: and if he wishes to carry on the business, he shall file an application in accordance with the provision of this Act before the expiration of the original license. But, If the licensing authority by a written order refuses to issue the license, such person shall not be entitled to carry on the business as from the date of receiving notice of the order, and the provision of Section 55 shall be applied mutatis mutandis.

Countersigned by:
Pol. Col. Taksin Chinavatr
Prime Minister

The rate of fee⁽⁸⁵⁾

(1)	license to produce of narcotics of category II	1,000	Baht each
(2)	license to import of narcotics of category II	1,000	Baht each
(3)	license to export of narcotics of category II	1,000	Baht each
(4)	license to dispose of narcotics of category II	1,000	Baht each
(5)	license to process of narcotics of category III	200	Baht each
(6)	license to dispose of narcotics of category III	1,000	Baht each
(7)	license to produce of narcotics of category III or category IV	6,000	Baht each
(8)	license to import of narcotics of category III or category IV	6,000	Baht each
(9)	license to export of narcotics of category III or category IV	200	Baht each
(10)	license to process of narcotics of category IV	200	Baht each
(11)	license to each import of export of narcotics of category III	100	Baht each
(12)	license to dispose or possession of of narcotics of category II more than as provided by the Minister under section 60	200	Baht each
(13)	the certificate of registration of the medicinal formula	2,000	Baht each of the narcotics of category III
(14)	license to advertise narcotics for commercial purpose under section 48 and 48/1	3,000	Baht each
(15)	license substitute	100	Baht each
(16)	a substitute for the certificate of registration of the medicinal formula of narcotics of category III	100	Baht each
(17)	license to amend the particular in the registration under section 44	1,000	Baht each
(18)	the application for a renewal of a license or the certificate mentioned above	as each license or of registration of the medicinal formula	

⁽⁸⁵⁾ The rate of fee shall be repealed and replaced by section 37 of Narcotics Act (No.5) B.E.2545 (2002)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tifanny Vika Noviadhealiyai
NPM : 5116500196
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 3 November 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Melati Nomor 30, Kramat, Kabupaten
Tegal
Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Bongkok 1	2004	2010
2	SMP Negeri 3 Tegal	2010	2013
3	SMA Negeri 3 Tegal	2013	2016
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2016	-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 27 Januari 2020

Hormat saya,

Tifanny Vika N.